



KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ISSN 2527-3140

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

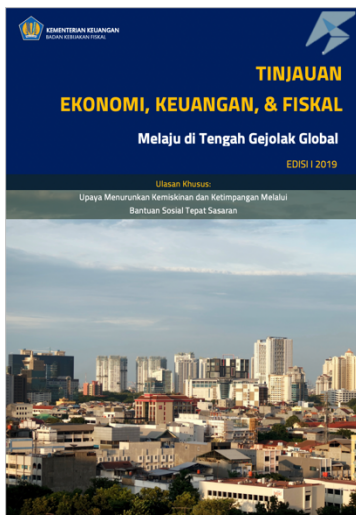
Melaju di Tengah Gejolak Global

EDISI I 2019

Ulasan Khusus:

Upaya Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui
Bantuan Sosial Tepat Sasaran





Edisi I 2019

Foto Sampul : Lanskap Perkotaan

Tinjauan Kebijakan Fiskal diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan dan memuat mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan terkini.

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal

Pengarah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Redaktur Pelaksana:

Sekretaris Badan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Editor:

Andriansyah, Endang Larasati, Evy Mulyani, Kindy Rinaldi S., Riznaldi Akbar, Thomas N.P.D Keraf, Wahyu Utomo, Widiyanto, Yooopi Abimanyu

Dewan Redaksi:

Abdul Aziz, Achmad Budi S., Ahmad Wira Kusuma, Aktiva Primananda, Alfian Mansur, Ali Moechtar, Asep Nurwanda, Bhayu Purnomo, Dwi Anggi Novianti, Fino Valico Waristi, Ginanjar Wibowo, Immanuel Bhekti H., Indra Budi Sucahyo, Irma Marlina, Pipin Prasetyono, Putri Rizki Yulianti, Raditiyo Harya P., Roni Parasian, Yasir Niti Samudro

Desain Grafis:

Teguh Warsito, Arif Taufiq, Bramantiyo, Fatima Medina Septiyanti

Kontributor:

Ari Nugroho, Bakhtiar Rifai, Bramantiyo, Dhoni Siamasyah F.A., Dimas Nurdy, Dwika Darinda, Galuh Chandra Wibowo, Ika Kartika Sari, Indah Kurnia Junirda, Irsyan Maududy, M. Firmansyah Arviandri, Muhammad Olgiano Paellorisky, Nina Hanifah, Nurul Fatimah, Purwaningtyas Dewantoro, Restu Rinayanti, Widiani Putri, Wignyo Parasian

Foto Sampul/Foto Ilustrasi:

Bramantiyo

Sekretariat:

Andi Yoga Trihartanto, Puguh Fajar Triyanto, Suhendi Ery Saputro, Bagus Handoko

Alamat Redaksi:

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya
Nomor 1 Jakarta 10710

Situs Web: www.fiskal.kemenkeu.go.id

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Edisi I 2019

VISI BKF

"Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera."

KATA PENGANTAR

Indonesia sekali lagi mampu menunjukkan ketahanan ekonominya meskipun di tengah lingkungan global yang penuh tantangan dan volatilitas. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meningkat, inflasi yang terkendali, serta cadangan devisa yang memadai menjadi beberapa bukti atas kerangka makroekonomi Indonesia yang solid. Yang menjadi lebih penting, kinerja ekonomi yang positif telah memberi dukungan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, serta perbaikan kesetaraan ekonomi.

Capaian ekonomi dan pembangunan tersebut tentu saja harus didukung oleh kredibilitas kebijakan, termasuk fiskal dan APBN sebagai instrumen utama Pemerintah. Dengan realisasi Pendapatan Negara yang di atas target, penyerapan Belanja Negara yang tinggi, defisit fiskal yang rendah, serta defisit keseimbangan primer yang menurun tajam, APBN 2018 menjadi instrumen kebijakan fiskal yang pruden dan produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi. Perlu dipahami bahwa kinerja positif ekonomi dan APBN 2018 merupakan buah dari reformasi yang konsisten dilakukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi I Tahun 2019 ini mengambil tema **Melaju di Tengah Gejolak Global**, menitikberatkan pada capaian kinerja ekonomi dan fiskal Indonesia yang baik di tahun 2018, meskipun di tengah kondisi global yang menantang. Dalam edisi ini juga terdapat boks yang membahas kebijakan fiskal untuk perumahan serta belanja modal BUMN. Selain itu, Bab III dari tinjauan ini juga mengulas secara khusus dampak dari Bantuan Sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan ini merupakan terbitan triwulanan yang menyajikan data-data dan informasi terkini mengenai ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. Diharapkan, materi yang terangkum dalam tinjauan ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini. Dengan pemahaman tersebut, para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memberikan *quality*

control terhadap kebijakan yang disusun Pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan.

Selamat membaca.

Maret 2019

Suahasil Nazara

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
ABREVIASI	5
perekonomian indonesia 2018 dalam angka	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	11
ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	14
A. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL	16
B. PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DAN MONETER INDONESIA	19
Perkembangan Kinerja IHSG dan Bursa Saham Global	20
Perkembangan Sektoral IHSG	21
Perkembangan Pasar SBN	24
Perkembangan Obligasi Korporasi	26
Perkembangan Rupiah dan Moneter	26
C. PERDAGANGAN INDONESIA	28
D. NERACA PEMBAYARAN INDONESIA	32
E. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018	36

F. INFLASI INDONESIA	39
G. KINERJA SEKTOR PERBANKAN INDONESIA.....	42
Aset dan sumber dana	42
Penggunaan dana	44
Risiko Kredit Perbankan	46
Kinerja Perbankan.....	47
Boks 1. Belanja Modal BUMN	49
ANALISIS KINERJA APBN & KEBIJAKAN FISKAL.....	52
A. ANALISIS KINERJA APBN 2018	54
B. PERKEMBANGAN REALISASI APBN 2019	62
C. Review atas Belanja Barang Kementerian/Lembaga.....	65
D. Capaian Positif APBN Sebagai Hasil Dari Reformasi Fiskal	69
Boks 2. Kebijakan Perumahan di Indonesia dalam Perspektif Fiskal	72
ULASAN KHUSUS: UPAYA MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN MELALUI BANTUAN	
SOSIAL TEPAT SASARAN	76
A. PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DAN BANTUAN SOSIAL.....	78
B. ANALISIS EFEKTIVITAS	80
Efektivitas program secara umum.....	80
C. Total Manfaat Bansos yang diterima RUMAH TANGGA	86
PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO	90

ABREVIASI

7DRR	: 7-day Reverse Repo Rate	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Area	BPS	: Badan Pusat Statistik
AEoI	: Automatic Exchange of Information	bps	: basis points
AKFTA	: ASEAN-Korea Free Trade Area	Brexit	: British exit
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara	BUM	: Bantuan Uang Muka
APBN	: Availability Payment	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
APBN-P	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
AS	: Amerika Serikat	BUSN	: Bank Umum Swasta Nasional
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations	BUSND	: Bank Umum Swasta Nasional Devisa
ASEAN-5	: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand	Capex	: Capital Expenditure
ASN	: Aparatur Sipil Negara	CAR	: Capital Adequacy Ratio
ATMR	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	CBR	: Cultivated Biological Resources
B20	: komposisi BBM biodiesel 20% : solar 80%	CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
B30	: komposisi BBM biodiesel 30% : solar 70%	CPO	: Crude Palm Oil
Bansos	: Bantuan Sosial	DAK	: Dana Alokasi Khusus
BBM	: Bahan Bakar Minyak	Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
BI	: Bank Indonesia	DAU	: Dana Alokasi Umum
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal	DER	: Debt to Equity Ratio
BLU	: Badan Layanan Umum	DID	: Dana Insentif Daerah
BoP	: Balance of Payment	DMO	: Domestic Market Obligation
BOPO	: Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional	DPK	: Dana Pihak Ketiga
BPD	: Bank Pembangunan Daerah	DSCR	: Debt-Service Coverage Ratio
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DT PPFM	: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai	DTK	: Dana Transfer Khusus
		EBITDA	: Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
		FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
		GDP	: Gross Domestic Product

HBA	: Harga Batubara Acuan	PIBT	: Penerbitan Impor Berisiko Tinggi
HBKN	: Hari Besar Keagamaan dan Nasional	PIP	: Program Indonesia Pintar
ICP	: <i>Indonesia Crude Price</i>	PKE	: Paket Kebijakan Ekonomi
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan	PKH	: Program Keluarga Harapan
IJEPA	: <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>	PLN	: Perusahaan Listrik Negara
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>	PMA	: Penanaman Modal Asing
Inpres	: Instruksi Presiden	PMI	: Pekerja Migran Indonesia
IUP	: Izin Usaha Pertambangan	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
JCI	: <i>Jakarta Composite Index</i>	PMN	: Penyertaan Modal Negara
JIBOR	: <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
K/L	: Kementerian/Lembaga	PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
KCBA	: Kantor Cabang Bank Asing	pp	: <i>percentage point</i>
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus	PP	: Peraturan Pemerintah
Kementerian	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PPh	: Pajak Penghasilan
ESDM		PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
KI	: Kredit Investasi	PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
KK	: Kredit Konsumsi	PSN	: Proyek Strategis Nasional
KKKS/K3S	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama	PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
KMK	: Kredit Modal Kerja	PUAB	: Pasar Uang Antar Bank
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rastra	: Beras Sejahtera
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	ROA	: <i>Return on Asset</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat	RT	: Rumah Tangga
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah Tinggal	SBN	: Surat Harga Berharga
KPSH	: Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga	SDA Migas	: Sumber Daya Alam Minyak dan Gas
KUR	: Kredit Usaha Rakyat	SIM	: Surat Izin Mengemudi
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>	SML	: <i>Special Mention Loan</i>
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
LNPRT	: Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>	Susenas	: Survey Sosial dan Ekonomi Nasional
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tapera	: Tabungan Perumahan Rakyat
MSCI Index	: <i>Morgan Stanley Capital International Index</i>	TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>	TMF	: Transaksi Modal dan Finansial
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan	ULN	: Utang Luar Negeri
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>	Umi	: Ultra-mikro
PBCT	: Penertiban Cukai Berisiko Tinggi	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PBI	: Penerima Bantuan Iuran	USD	: <i>United States Dollar</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto	VfM	: <i>Value for Money</i>
PDF	: <i>Project Development Fund</i>	VGf	: <i>Viability Gap Fund</i>
Pefindo	: PT Pemeringkat Efek Indonesia	WCO	: <i>World Custom Organization</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah	WEO	: <i>World Economic Outlook</i>
Pertagas	: PT Pertamina Gas	WTO	: <i>World Trade Organization</i>
PGN	: PT Perusahaan Gas Negara Tbk	yoy	: <i>year-on-year</i>
		ytd	: <i>year-to-date</i>

PEREKONOMIAN INDONESIA 2018

DALAM ANGKA

3,13%

Inflasi

5,17%

Pertumbuhan Ekonomi

6.194

IHSG Akhir Tahun

5,1%

Pertumbuhan Konsumsi RT & LNPRT

Rp14.247

Rupiah Rata-Rata

6,7%

Pertumbuhan Investasi

6,0%

7 Days Reverse Repo Rate

16,6%

Pertumbuhan Pendapatan
Negara & Hibah

6,7%

Pertumbuhan Ekspor Barang

11,5%

Tax Ratio

20,2%

Pertumbuhan Impor Barang

9,7%

Pertumbuhan Belanja

2,98%

Defisit Transaksi Berjalan
terhadap PDB

1,76%

Defisit APBN
terhadap PDB

USD127miliar

Cadangan Devisa

Rp1,8triliun

Defisit *Primary Balance*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2018, perekonomian global memberikan banyak tantangan yang bersumber dari perubahan arah kebijakan negara besar seperti normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut yang dibarengi oleh pelebaran defisit AS telah menimbulkan gejolak pada sektor keuangan negara berkembang seiring dengan terjadinya penarikan arus modal serta penguatan dolar AS. Dinamika global juga diwarnai oleh fluktuasi harga minyak yang cukup tajam yang antara lain terpengaruh oleh faktor pasokan serta tensi geopolitik. Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global diperkirakan akan melambat dibayangi faktor penurunan produktivitas kelompok negara maju serta isu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sementara pada kelompok negara berkembang perlambatan pertumbuhan Tiongkok menjadi salah satu sumber tekanan yang perlu terus diwaspadai.

Dampak dari tekanan global di 2018 tercermin pada peningkatan volatilitas di sektor keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Pembalikan arus modal kembali ke AS membuat pasar saham mencatatkan arus keluar bersih (*net capital outflow*) sebesar Rp49,9 triliun, meskipun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan *net capital inflow* sebesar Rp57,1 triliun. Dengan kondisi tersebut membuat IHSG terkoreksi sebesar 2,5 persen (yoy) sementara imbal hasil SBN juga mengalami peningkatan. Meski demikian, sejak triwulan terakhir 2018, tekanan mulai mereda dan arus modal kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia seiring kondisi fundamental yang mampu menunjukkan ketahanannya. Langkah normalisasi moneter AS yang mulai mereda serta hasil Pemilu sela di negara tersebut turut menciptakan sentimen yang lebih positif bagi pasar keuangan negara berkembang.

Di tengah stagnansi permintaan global, ekspor mampu tumbuh positif meskipun belum dapat mengimbangi pertumbuhan impor yang tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri. Impor yang didominasi oleh bahan mentah dan barang modal turut

mendukung investasi yang tercermin dalam pertumbuhan PMTB sebesar 6,7 persen serta sektor industri pengolahan dan konstruksi. Seiring dengan tingginya impor, neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD8,6 miliar. Di tengah pengetatan likuiditas global, Pemerintah mengambil upaya mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan baik melalui pengendalian impor maupun mendorong ekspor, seperti percepatan implementasi kebijakan B20 dan diversifikasi tujuan ekspor.

Peningkatan impor barang telah berkontribusi pada pelebaran defisit transaksi berjalan pada tingkat 2,98 persen terhadap PDB di tahun 2018. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial masih mencatatkan surplus meski di tengah pengetatan likuiditas global, yang menunjukkan terjaganya persepsi positif investor pada ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan neraca pembayaran membukukan defisit sebesar USD7,1 miliar. Kinerja neraca pembayaran yang defisit juga terefleksi pada depresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 6,89 persen sepanjang tahun 2018, yang merupakan tren yang terjadi secara luas di negara berkembang. Meskipun demikian depresiasi Rupiah masih lebih baik dibanding beberapa negara berkembang besar seperti Argentina, Turki, dan Brazil yang memiliki kerentanan fundamental serta isu kredibilitas kebijakan.

Sementara fundamental ekonomi Indonesia tahun 2018 tetap solid meski di tengah tekanan global. Hal ini nampak dari pertumbuhan ekonomi yang berada pada tingkat 5,17 persen (yoy). Pertumbuhan masih mengalami peningkatan meskipun di tengah kenaikan suku bunga acuan 7DRR sebesar 175 bps yang dilakukan oleh BI untuk menjaga stabilitas. Inflasi yang terkendali telah mendukung konsumsi yang stabil, sementara kontribusi investasi terhadap pertumbuhan juga terus meningkat. Realisasi belanja negara yang sangat baik pada sisi yang lain telah memberi sumbangan positif pada perekonomian domestik dan mendorong pertumbuhan konsumsi Pemerintah. Kondisi ekonomi yang sehat juga nampak dari indikator perbankan masih terjaga berkat dukungan permodalan yang kuat dan pertumbuhan aset yang stabil sehingga berhasil mencatatkan kinerja intermediasi positif yang ditandai oleh pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai *double digit*.

Selain bersumber dari potensi ekonomi Indonesia yang besar, ketahanan ekonomi Indonesia juga merupakan buah dari reformasi ekonomi yang berkesinambungan dan penguatan bauran kebijakan. Dalam meminimalisir dampak ketidakpastian global yang meningkat di 2018, Pemerintah bersama otoritas terkait memperkuat koordinasi dan bauran kebijakan yang efektif untuk melindungi stabilitas ekonomi. Di samping itu, reformasi struktural yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan investasi serta daya saing terus menjadi prioritas. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai terobosan kebijakan seperti akselerasi infrastruktur, penyederhanaan izin bisnis, perbaikan logistik, hingga dukungan pada digital ekonomi telah dilakukan dan menciptakan situasi yang kondusif bagi pertumbuhan permintaan domestik. Ke depan, komitmen pada reformasi akan terus dijaga termasuk pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal terbesar Indonesia.

APBN terus menunjukkan perbaikan realisasi dan bahkan mencatatkan kinerja sangat baik di 2018, juga merupakan hasil positif dari reformasi fiskal yang konsisten dan komprehensif. Penerimaan negara mampu melampaui target dan realisasi belanja negara hampir seratus persen telah menunjukkan optimalnya berbagai langkah kebijakan di sisi fiskal seperti reformasi pajak, perbaikan tata kelola PNB, percepatan pengadaan barang dan jasa, hingga perbaikan penyaluran bantuan sosial. Defisit APBN mampu ditekan di tingkat 1,76 persen terhadap PDB dan defisit keseimbangan primer juga semakin mengecil dan hanya sebesar Rp1,8 triliun. Hal tersebut mencerminkan APBN yang ekspansif namun tetap terkendali serta tidak memberi risiko tambahan pada perekonomian yang masih menghadapi gejolak global.

Kesehatan ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal turut mendukung penurunan kemiskinan ke level *single digit*, atau terendah sejak 1999. Sebagai salah satu instrumen yang penting untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah akan terus mengevaluasi program Bantuan Sosial agar terus efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan hasil analisis yang secara lengkap diulas pada Bab III tinjauan ini, jumlah Bantuan Sosial yang diterima oleh masyarakat menunjukkan adanya perbaikan mekanisme dan lebih bersifat progresif atau pro pada rakyat miskin, dengan PKH dan PIP sebagai program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

EXECUTIVE SUMMARY

Global economy provided various challenges during 2018, sourced from advanced countries policy change, i.e. U.S monetary policy normalization. Coupled with US widening fiscal deficit, this policy led to volatilities in emerging market's financial sector triggered by capital outflow and strengthening of US Dollar. Moreover, global economic development was also affected by oil price fluctuation that caused by geopolitic tension and supply problem. In the future, economy growth and global trade's prospect are expected to be slower. It is caused by productivity decreasing and trade war issues in advanced countries as well as China's slow economy growth.

The impact of global pressure in 2018 was reflected in the increase of volatility in emerging market's financial sector, including Indonesia. The capital flight back to US caused stock market recorded net capital outflow of Rp49.9 trillion, although government bond still recorded net capital inflow of Rp57.1 trillion. That condition made Jakarta Composite Index (JCI) declined by 2.5 percent (yoy) while government bond's yield was also increasing. However, the pressure has started to ease and the capital has returned to Indonesia's financial sector supported by resilient fundamental. Furthermore, slowing monetary normalization and mid-term election in US also created positive sentiment for emerging market's financial sector.

Amidst global demand stagnation, export was able to grow positively though it had not been able to offset high growth in import, particularly to fulfill domestic production needs. It was reflected by raw material import and capital goods in supporting investment (gross fixed capital formation) that grew by 6.7 percent as well as manufacturing and construction. As import grew strongly, trade balance recorded deficit of USD8.6 billion. As global liquidity tightened, the government decided to reduce the pressure of trade deficit through import control and export boost, such as through expediting the implementation of B20 policy and diversifying export destination.

The import-increasing contributed to the current account deficit widening, amounting 2.98 percent to GDP in 2018. Meanwhile, capital and financial transaction still recorded a surplus amidst global tight liquidity, showing the investor's positive perception to Indonesia's

economy. Overall, Balance of Payment (BoP) recorded USD7.1 billion deficit. The deficit in BoP also reflected in Rupiah's currency, depreciated 6.89 percent during 2018, and this trend occurred in most of emerging market countries. Nevertheless, the depreciation in Rupiah was better compared to other emerging market countries, such as Argentina, Turkey, and Brazil, since they had more fundamental risks and credibility issues in their policies.

Meanwhile, the economic fundamental in Indonesia remained solid in 2018 despite global pressure. It was shown by 5.17 percent economic growth (yoy) amid the increase of 7-Day Repo Rate (7DRR) by 175 bps to maintain the stability. Manageable inflation also supported stable consumption, while investment contribution to GDP remained increasing. Moreover, decent spending realization as well provided positive contribution to domestic economy and encouraged government consumption growth. The robust condition in economy also reflected by sound banking indicator due to the solid capital support and stable asset growth. It succeeded in recording positive intermediary performance, reflected by double-digit credit growth.

Aside from large economic potential, the resilience was also the output of sustainable economic reform and strengthening of policy mix. Reducing the impact of global uncertainties increasing in 2018, government with related authorities strengthened coordination and effective policy mix to preserve the economic stability. Besides, structural reform, which is aimed to maintain the purchasing power and increase the investment, remained becoming a priority. In recent years, some policy breakthroughs, such as infrastructure acceleration, business permit simplification, logistic improvement, and digital economy support, have been undertaken and have created favorable condition for domestic demand growth. Government will remain committed to continue the reform, including in human capital development Indonesia's biggest potential.

State budget continues to show the improvement in realization as a positive result from consistent and comprehensive fiscal reform. In 2018, revenue was able to exceed the target and spending realization recorded almost a hundred percent, highlighting optimal fiscal policy implementation such as tax reform, non tax revenue governance improvement, procurement acceleration, as well as social assistance distribution enhancement. Budget deficit was able to be lowered to 1.76 percent to GDP and primary balance deficit was also narrowed down, only Rp1.8 trillion. It reflects the expansive state budget remains manageable and does not give additional risk to the economy amidst the global volatility.

Sound economic and fiscal performances have been supporting to the decrease of poverty rate to the single digit level, or the lowest since 1999. The government will keep on evaluating the effectiveness of Social Assistance Programs as an important instrument to improve people's welfare. According to the analysis available in the Chapter III of this report, the amount of Social Assistance received by the poor households has been more progressive and the mechanism also improves. PKH and PIP are remain the most effective programs in lowering poverty and inequality.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAGIAN I

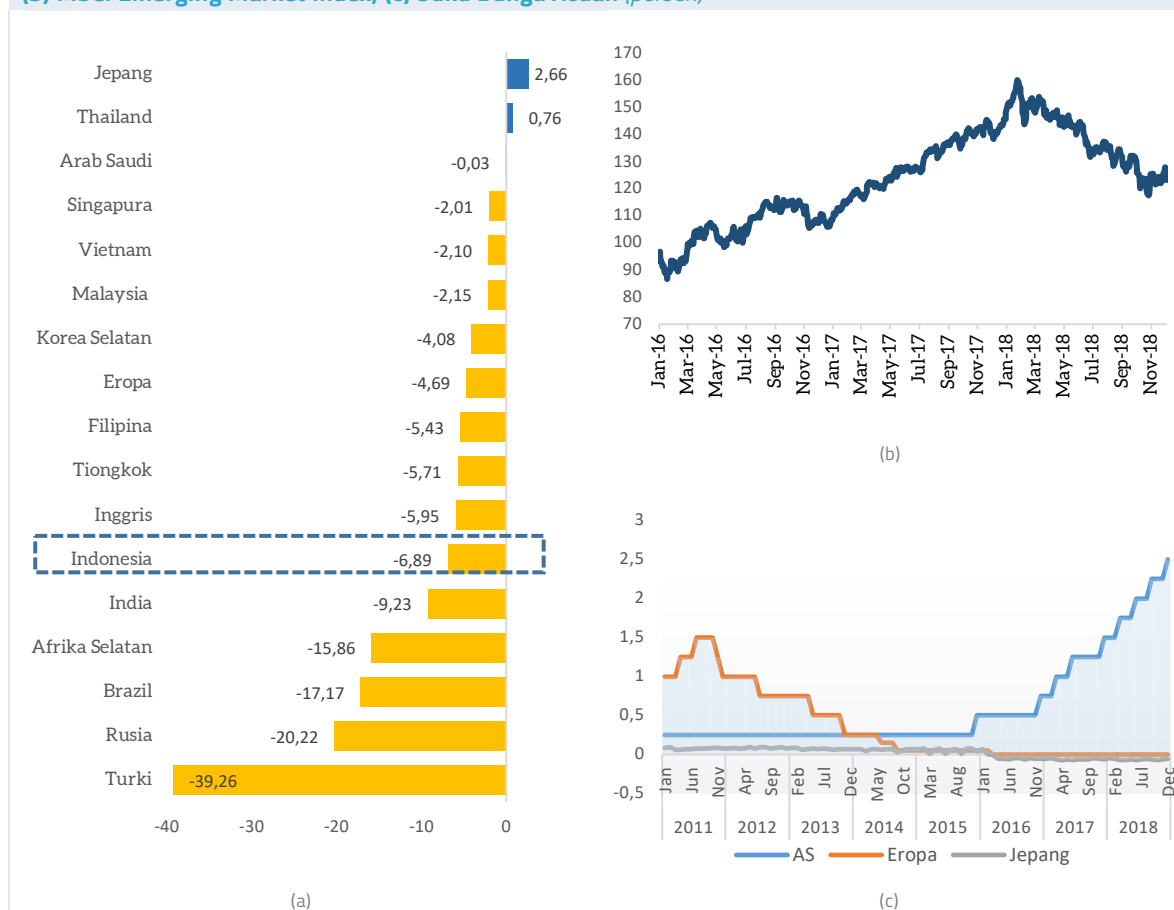
ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO



A. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global diwarnai gejolak sepanjang tahun 2018 yang bersumber dari berbagai tekanan dan ketidakpastian kebijakan. *The Federal Reserve Bank* melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga AS sebanyak empat kali atau 100 bps di tahun 2018. Di sisi lain, perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama ketidakpastian di sisi perdagangan global. Tensi perdagangan juga diperparah dengan adanya kompetisi terkait pengembangan teknologi 5G antara dua negara adidaya tersebut. Pada sisi yang lain, harga-harga komoditas mengalami perubahan arah yang cukup tajam. Minyak mentah misalnya, mengalami tren kenaikan hingga mencapai puncaknya pada awal Oktober namun kemudian turun hingga ke harga terendah pada akhir bulan Desember 2018, utamanya dipengaruhi oleh faktor di sisi pasokan (*supply*). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi perekonomian global di 2018 adalah isu-isu geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, tensi semenanjung Korea, ketidakpastian Brexit, krisis Venezuela, serta lainnya.

Grafik 1. (a) Kinerja Nilai Tukar terhadap Dolar (persen ytd, per 31 Des 2018), (b) MSCI Emerging Market Index, (c) Suku Bunga Acuan (persen)



Sumber: Bloomberg

Kenaikan suku bunga AS didorong oleh perbaikan ekonomi AS yang berjalan lebih cepat dari prediksi. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga 3,0 persen di triwulan III 2018, serta tingkat inflasi yang konsisten berada di atas 2 persen dan

tingkat pengangguran turun ke level 3,7 persen. Normalisasi kebijakan moneter ini menyebabkan pasar keuangan di negara-negara berkembang mengalami gejolak seiring terjadinya pembalikan arus modal dari berbagai negara berkembang ke AS yang memicu terjadinya pengetatan likuiditas. Hal ini berdampak pada kenaikan imbal hasil surat berharga AS dan penguatan dolar AS. Di sisi lain, ekspansi fiskal juga menambah tekanan pada kenaikan imbal hasil surat berharga AS. Kondisi tersebut membuat nilai tukar negara berkembang selama tahun 2018 mengalami depresiasi dan memberi tekanan pada pasar surat berharga maupun saham seperti nampak dari indikator *MSCI Emerging Market Index*. Beberapa negara seperti Argentina dan Turki menghadapi tekanan yang lebih dalam dibanding yang lain disebabkan oleh isu kredibilitas kebijakan serta fundamental yang rentan.

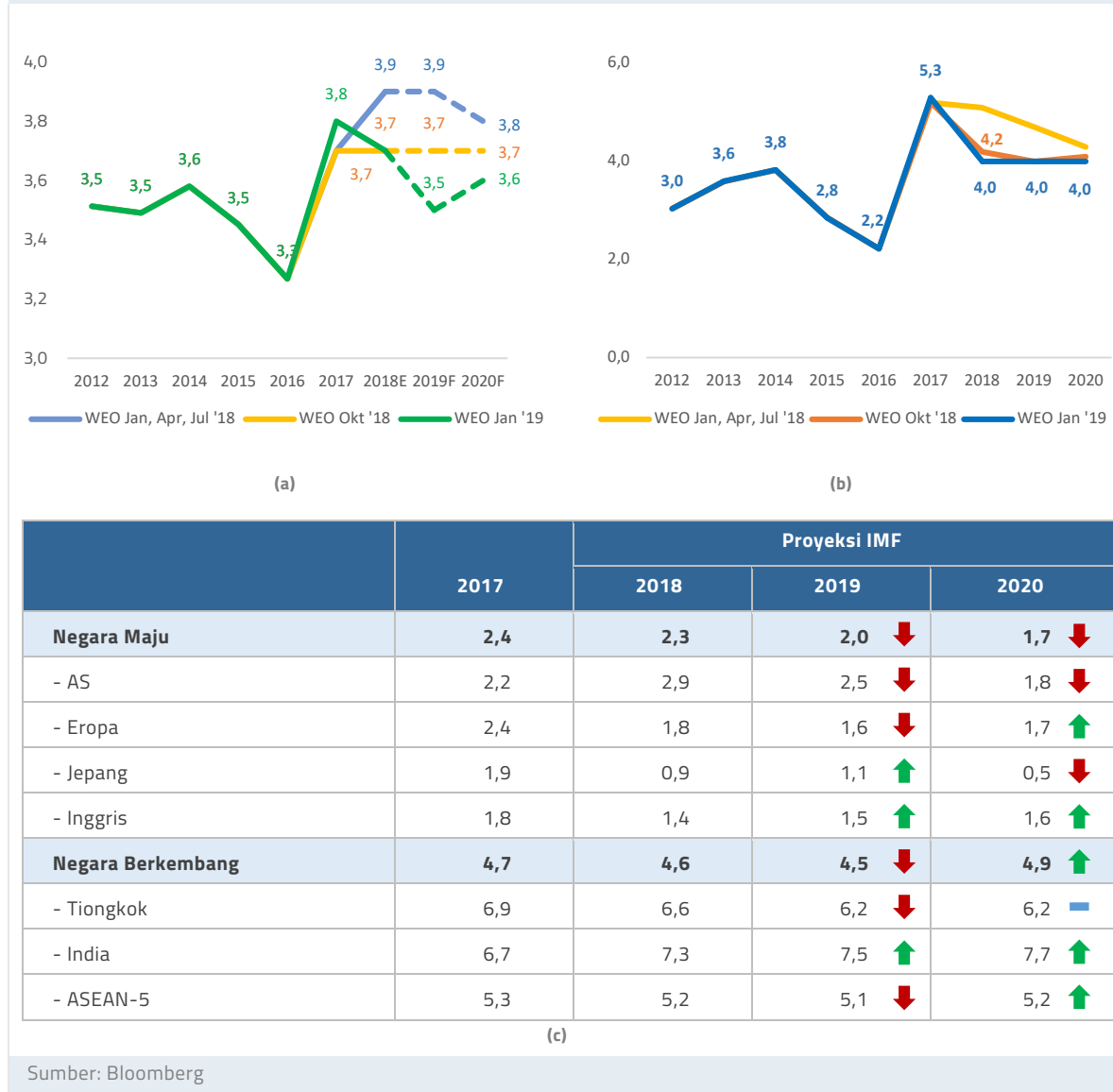
Tekanan di pasar keuangan negara berkembang ini berangsur pulih pada triwulan IV 2018 didorong oleh hasil pemilu sela AS pada 6 November 2018 yang dimenangkan Partai Demokrat di kursi kongres. Perubahan komposisi di kongres mengakibatkan kekuatan antara dua kubu di pemerintahan menjadi lebih berimbang dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menjaga defisit fiskal AS yang selama tahun 2018 melebar sebagai konsekuensi dari kebijakan pemotongan pajak dan ekspansi belanja. Sementara itu, pemberlakuan *government shutdown* sejak 22 Desember 2018 sebagai akibat ketidaksepakatan terkait pendanaan tembok perbatasan (*border wall*) menyebabkan berhentinya sebagian aktivitas pemerintahan dan ketidakpastian terkait perekonomian AS. Hal ini mendorong investor untuk mencari alternatif penanaman modal di negara lain termasuk negara berkembang sehingga arus modal kembali masuk ke kawasan ini.

Gejolak global berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan dan volume perdagangan dunia. IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2019 mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 sebesar 3,7 persen atau sama dengan prediksi WEO Oktober 2018. Perlambatan ekonomi lebih dalam terjadi pada paruh kedua 2018 menyebabkan penurunan estimasi di beberapa negara, baik untuk negara maju (Jerman, Perancis, Italia, dan Jepang) maupun negara berkembang (ASEAN-5 dan Brazil). Ekonomi yang melambat juga tercermin dari estimasi penurunan volume perdagangan global sebesar 4,0 persen di 2018 atau lebih rendah 0,2 *percentage point* (pp) dibanding prediksi pada Oktober 2018. Tensi perdagangan AS-Tiongkok yang semakin meningkat hingga akhir 2018 menjadi pemicu utama ketidakpastian dalam kebijakan dan praktik perdagangan internasional.

Sementara itu perekonomian global di 2019 dan 2020 masih akan dibayangi oleh ketidakpastian dan risiko perlambatan. Di 2019, the Fed diperkirakan akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dibanding dengan yang dilakukan pada 2018. Walaupun demikian, negara-negara di dunia perlu tetap waspada terhadap risiko yang mungkin muncul dari keberlanjutan normalisasi seperti melalui penguatan dolar AS. Di samping itu, perang dagang antara AS-Tiongkok belum menghasilkan kesepakatan yang signifikan meskipun keduanya telah mengadakan beberapa kali perundingan pada Desember 2018 hingga akhir Februari 2019. Kedua negara masih intensif dalam melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang. AS menunda kenaikan tarif impor dari 10 persen menjadi 25 persen terhadap USD200

miliar barang asal Tiongkok yang semestinya dilakukan mulai 1 Maret 2019. Ketidakpastian ini mendorong pengalihan produksi dari kedua negara menuju negara-negara lain yang memiliki komoditas ekspor dengan karakteristik yang sama dengan AS atau Tiongkok. Hal ini sebetulnya membuka peluang bagi negara atau kawasan lain seperti ASEAN.

Grafik 2. (a) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, (b) Proyeksi Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang (dalam persen, yoy)



Isu Brexit juga masih mengalami kebuntuan meskipun waktu batas waktu (*deadline*) keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin dekat yakni pada 29 Maret 2019. Pemerintahan Theresa May belum mampu meyakinkan legislatif (*Member of Parliaments*) terkait kesepakatan yang tercantum dalam *withdrawal agreement*. Beberapa klausul yang masih menjadi topik negosiasi yang alot antara Inggris dan Uni Eropa antara lain status perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara (*Irish backstop*) selepas Brexit dan pembayaran kontribusi Inggris kepada Uni Eropa. Meskipun demikian, Theresa May menyatakan bahwa dirinya akan mengeksekusi Brexit tepat waktu. Keluarnya Inggris dari blok Uni Eropa berpotensi menghambat

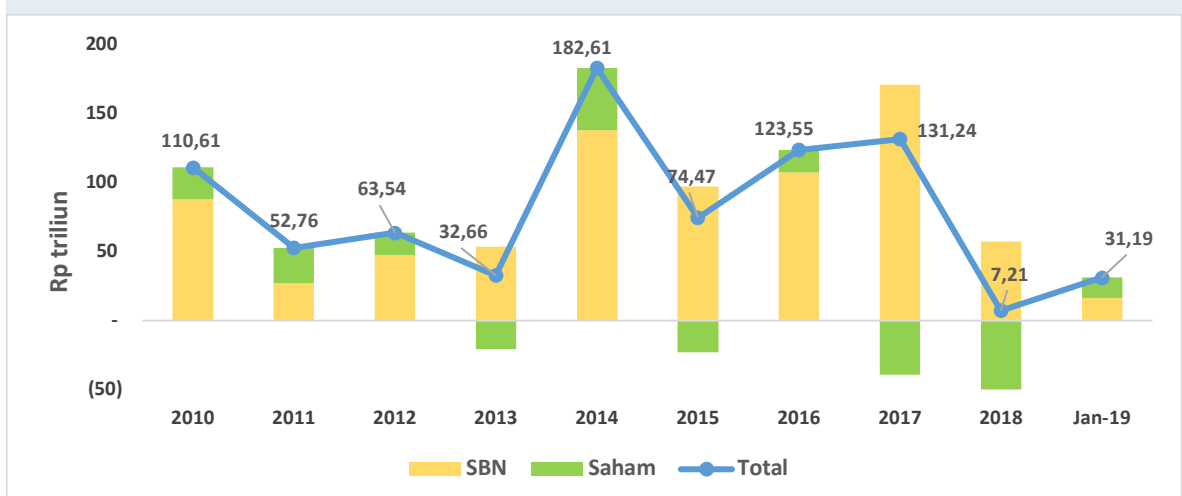
pertumbuhan perdagangan dan ekonomi bagi kedua belah pihak jika kesepakatan tidak tercapai tepat pada waktunya.

Masih tingginya ketidakpastian di perekonomian global membuat IMF dan World Bank melakukan revisi ke bawah atas prediksi pertumbuhan ekonomi global. IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen di 2019 dan 3,6 persen di 2020, atau turun 0,2 pp dan 0,1 pp dibanding prediksi WEO Oktober 2018. Sementara World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8 persen di 2019 dan 2,7 persen di 2020, atau turun masing-masing 0,1 pp dibanding proyeksi bulan Juni 2018. Perlambatan ini juga berdampak terhadap menurunnya permintaan dan prospek pertumbuhan volume perdagangan global yang berdasarkan perkiraan IMF akan stagnan pada level 4,0 persen pada tahun 2019 dan 2020, atau sama dengan estimasi di 2018. Ditinjau dari sumbernya, dalam dua tahun ke depan negara maju diperkirakan akan masih berada dalam tren perlambatan ekonomi, termasuk AS seiring dengan berkurangnya stimulus fiskal. Adapun kelompok negara berkembang masih akan dibayangi oleh keberlanjutan perlambatan ekonomi Tiongkok, namun India dan ASEAN-5 diperkirakan masih cukup solid.

B. PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DAN MONETER INDONESIA

Gejolak yang terjadi pada perekonomian global di tahun 2018 memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya dari kinerja sektor keuangan. Pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) mengalami tekanan sejalan dengan tren yang juga terjadi secara luas di pasar keuangan negara berkembang. Gejolak global telah memicu volatilitas dan penurunan arus modal sehingga membuat nilai saham tertekan dan imbal hasil (*yield*) meningkat. Meski demikian kinerja pasar keuangan Indonesia mampu bertahan lebih baik dibanding beberapa negara seperti Turki dan Argentina yang jatuh pada kondisi krisis.

Grafik 3. Aliran Dana Asing di Pasar Modal selama 2018 dan 2019 (*ytd*)



Sumber: Bloomberg, CEIC, diolah; Ket.: * s.d. akhir Januari 2019

Tekanan arus modal keluar terbesar terjadi di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 2018 mencatatkan kinerja negatif sebesar 2,54 persen dengan dana asing keluar sebesar Rp49,89 triliun. Sementara itu di pasar SBN, *yield* SBN tenor 10 tahun generik naik sebesar 171 bps selama 2018 dengan dana asing masuk sebesar Rp57,10 triliun, jauh lebih kecil dibanding dana asing masuk tahun 2017 yang mencapai Rp170,34 triliun. Meski demikian, arus modal masuk yang masih tercatat positif di pasar SBN meski di tengah pengetatan likuiditas global menunjukkan masih terjaganya persepsi positif investor pada instrumen keuangan Indonesia khususnya SBN. Beberapa faktor global yang memberi sentimen cukup tinggi pada kinerja pasar keuangan Indonesia dan global antara lain adalah fluktuasi tensi perang dagang AS dengan negara mitra seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan Kanada, krisis Turki dan Argentina; Brexit; kekhawatiran peningkatan defisit Italia; serta pengetatan kebijakan moneter the Fed.

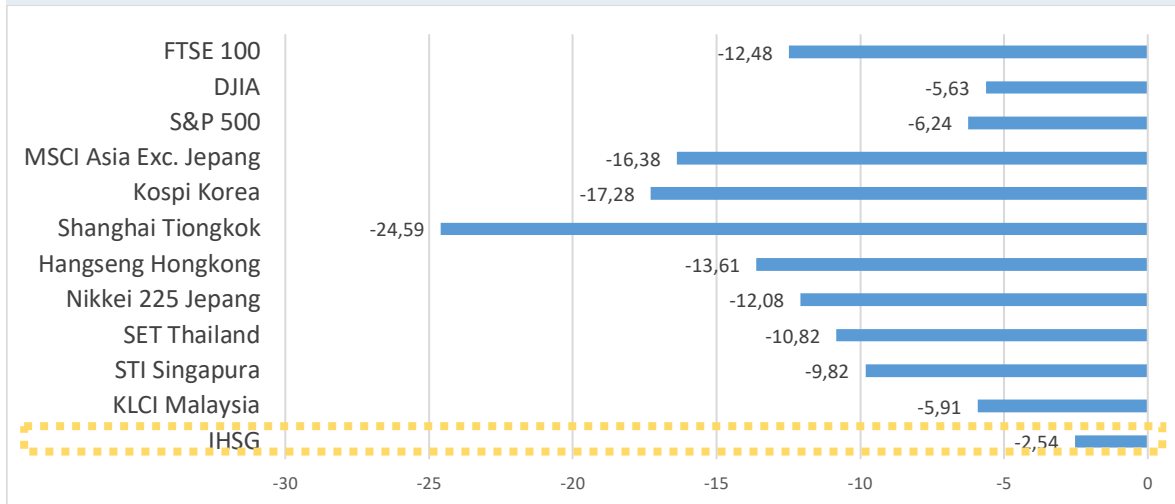
Tekanan di pasar keuangan negara berkembang dan Indonesia mulai mereda sejak triwulan terakhir 2018 dan berlanjut hingga awal 2019. Selama bulan Oktober dan November 2018, pasar modal Indonesia menerima lebih dari Rp100 triliun arus modal masuk dari investor asing. Memasuki 2019, IHSG telah menguat sebesar 5,46 persen sepanjang bulan Januari dengan dana asing kembali masuk sebesar Rp14,51 triliun. Sementara *yield* SBN tenor 10 tahun generik turun sebesar 2 bps sepanjang Januari dengan dana asing masuk sebesar Rp16,68 triliun. Dengan perkembangan ini, investor nonresiden di pasar modal Indonesia mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp7,21 triliun selama 2018 dan pembelian bersih sebesar Rp31,19 triliun sepanjang Januari 2019. Kinerja positif ini didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap sehat meski di tengah volatilitas global serta kebijakan yang kredibel dalam mendukung stabilitas. Di samping itu, tekanan di ekonomi global mulai mereda didukung oleh hasil Pemilu sela di AS yang mendorong keseimbangan kekuatan politik serta berlangsung baiknya proses perundingan dagang AS dengan Tiongkok. Ekspektasi menurunnya kecepatan normalisasi moneter AS di 2019 juga telah mendorong arus modal global kembali ke negara berkembang.

Perkembangan Kinerja IHSG dan Bursa Saham Global

Diterpa berbagai macam sentimen negatif, seluruh bursa saham di dunia mencatatkan kinerja negatif pada 2018. Di kawasan Asia, pelemahan terdalam dialami oleh indeks Shanghai Tiongkok dan Koshi Korea. Namun, memasuki tahun 2019, selama bulan Januari hampir seluruh bursa saham di dunia berbalik menguat dengan penguatan tertinggi dialami oleh indeks saham Hang Seng yang naik sebesar 8,11 persen selama bulan tersebut. Hanya bursa saham Malaysia yang mengalami pelemahan pada bulan Januari 2019. IHSG sendiri telah naik sebesar 5,46 persen selama bulan Januari 2019 ke level 6.533 dibarengi masuknya dana asing. Adapun jumlah emiten baru sepanjang 2018 tercatat sebanyak 62 emiten, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebanyak 46 emiten, dengan nilai penghimpunan dana sebesar Rp166 triliun dan total dana kelolaan investasi mencapai Rp746 triliun atau meningkat 8,3 persen dibandingkan akhir tahun 2017. Sebanyak 57 perusahaan tercatat melakukan penawaran umum perdana atau *initial public offering* (IPO) di bursa saham Indonesia pada 2018

dengan nilai mencapai Rp20,42 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp17,78 triliun dengan 37 perusahaan. Secara sektoral, penawaran tertinggi dilakukan oleh bank, yaitu BRI Syariah dan BTPN Syariah dengan nilai Rp5,63 triliun, disusul oleh sektor properti dengan nilai Rp3,78 triliun serta sektor perfilman dan angkutan senilai Rp3,20 triliun.

Grafik 4. Kinerja Pasar Saham Global 2018 * (dalam persen, ytd)



Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: * s.d. akhir Desember 2018

Perkembangan Sektoral IHSG

Secara sektoral, kinerja negatif IHSG sepanjang 2018 dipicu oleh pelemahan sektor barang konsumsi, infrastruktur, perdagangan, konstruksi dan properti, pertanian, dan manufaktur. Sebaliknya, sektor keuangan, industri dasar, aneka industri serta pertambangan mengalami perbaikan kinerja selama periode tersebut.

Tabel 2. Kinerja Pasar Saham Global 2018 * (persen)

Sektor	2018												2019	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ytd.*	Jan
IHSG	3,93	-0,13	-6,19	-3,14	-0,18	-3,08	2,37	1,38	-5,31	-9,52	-11,60	-2,15	-2,54	3,33
Keuangan	2,98	1,19	-4,47	-6,00	-0,10	-5,42	3,87	4,10	-4,41	-8,36	-9,64	2,66	3,05	10,13
Barang Konsumsi	0,18	-0,92	-9,01	-5,39	1,12	-2,63	1,64	-0,37	-14,81	-12,60	-15,34	-4,86	-10,21	5,08
Infrastruktur	-1,79	-0,12	-8,92	-0,08	-4,46	2,79	-0,55	0,46	-12,42	-10,57	-8,76	-2,45	-10,09	0,72
Perdagangan	4,71	-2,91	-2,39	0,17	-1,34	-3,10	-1,81	-0,84	-7,48	-14,32	-16,70	-13,88	-14,94	-14,42
Industri Dasar	11,51	1,51	-4,03	5,21	2,51	-3,00	1,20	5,23	21,03	6,63	-3,48	7,50	24,01	8,50
Konstruksi dan Properti	8,57	1,38	-7,62	-5,28	-1,85	-7,14	2,24	0,90	-9,44	-21,41	-26,00	-12,58	-9,64	-6,18
Aneka Industri	2,29	-4,28	-8,02	-0,46	-2,52	-3,27	6,01	0,13	-10,28	-11,29	-1,60	14,64	0,96	12,63
Pertambangan	24,97	0,93	-7,86	-3,40	6,02	1,46	9,84	-5,91	24,81	-1,54	-8,47	-7,64	11,45	-0,73
Pertanian	1,91	2,35	2,02	-5,47	-4,20	-6,40	-1,03	14,01	1,78	-3,27	-7,97	-14,57	-3,21	-3,79
Manufaktur	2,86	-0,91	-7,72	-2,09	0,91	-2,83	2,18	1,18	-6,65	-8,07	-10,52	1,08	-1,34	7,13

Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: * s.d. akhir Desember 2018

Sektor Keuangan

Meskipun tertekan selama bulan September hingga November 2018, indeks sektor keuangan masih mencatatkan kinerja positif selama tahun 2018. Dari sisi kinerja, sejumlah emiten perbankan sudah merilis laporan kinerja sepanjang tahun 2018. Bank Mandiri (BMRI) misalnya, mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara konsolidasi sebesar 21,2 persen (yoy) dari Rp20,6 triliun menjadi Rp25 triliun. Adapun penyaluran kredit BMRI sepanjang 2018 mencapai Rp820,1 triliun atau naik 12,4 persen (yoy), sementara rasio *non performing loan* (NPL) *gross* pada 2018 turun dari 3,46 persen pada tahun 2017 ke level 2,75 persen. Emiten lain, yaitu Bank BNI (BBNI) juga mencatatkan kenaikan laba bersih dari Rp13,62 triliun pada 2017 ke Rp15,02 triliun sepanjang 2018 atau tumbuh sebesar 10,3 persen. Sementara itu, penyaluran kredit BBNI sepanjang 2018 mencapai Rp512,78 triliun atau meningkat sebesar 16,2 persen dari realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp441,31 triliun. NPL *gross* BBNI pada akhir Desember 2018 berada di bawah 2 persen. Secara industri, kredit perbankan selama 2018 tumbuh sebesar 11,75 persen dengan NPL *gross* di level 2,37 persen.

Sektor Barang Konsumsi

Sepanjang tahun 2018, kinerja indeks sektor barang konsumsi mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 10,21 persen setelah tertekan sejak September 2018. Namun demikian, kinerja emitennya berbanding terbalik dengan pergerakan harga sahamnya. Sebagai contoh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), penjualannya selama 2018 naik sebesar 1,5 persen, sementara laba bersih meningkat sebesar 30 persen. Inovasi yang dilakukan oleh UNVR antara lain penetrasi ke kategori bisnis baru, peluncuran brand baru, dan digitalisasi pada sistem distribusi. Namun, sektor konsumsi diprediksi akan memiliki kinerja positif memasuki tahun 2019 ini seiring momen pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Sektor Infrastruktur

Indeks sektor infrastruktur tercatat berkontraksi sebesar 10,09 persen selama tahun 2018. Salah satu emiten dengan kapitalisasi besar di sektor ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Pada 2018, emiten sektor telekomunikasi menghadapi sentimen negatif akibat penerapan regulasi registrasi kartu SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengatur bahwa kartu SIM dibatasi, tiga nomor per individu. Sentimen negatif lainnya untuk sektor telekomunikasi muncul dari penurunan permintaan layanan SMS dan Voice. Ke depannya emiten sektor telekomunikasi ini akan mengoptimalkan pendapatan data yang pada tahun 2019 diperkirakan akan menyumbang 62 persen dari total pendapatan. Emiten lain di sektor ini yang juga memiliki kapitalisasi cukup besar, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sepanjang 2018 mencatatkan kinerja keuangan yang positif, membukukan pendapatan sebesar USD3,87 miliar, atau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,57 miliar. Sentimen yang mempengaruhi emiten ini adalah akuisisi 51 persen kepemilikan saham pada Pertagas dari Pertamina yang akhirnya terlaksana pada tanggal 28 Desember 2018.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan, salah satunya adalah tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor infrastruktur, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, memutuskan untuk mengalihkan saham Seri B milik negara pada masing-masing perseroan sebagai setoran modal kepada PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Keputusan pengalihan saham ini dilakukan sebagai realisasi dari rencana pemerintah membentuk *holding* BUMN di sektor infrastruktur. Setelah pengalihan ini, Waskita Karya, Adhi Karya, dan Jasa Marga akan berubah menjadi anak perusahaan Hutama Karya yang ditunjuk menjadi induk usaha atau *holding* BUMN infrastruktur. Status ketiga perseroan tersebut juga akan berubah menjadi non-persero. *Holding* tersebut dilakukan dalam upaya efisiensi dan efektivitas melalui integrasi masing-masing perusahaan serta penguatan keuangan perusahaan.

Sektor Konstruksi dan Properti

Indeks sektor konstruksi dan properti mencatatkan kinerja negatif sepanjang tahun 2018 yang berkontraksi sebesar 9,64 persen (yoy). Upaya bank sentral yang memberikan insentif untuk memicu kembali pergerakan sektor properti melalui relaksasi kebijakan rasio kredit terhadap nilai atau *Loan to Value* (LTV) di sektor properti untuk mendorong pertumbuhan kredit perumahan yang berlaku pada awal Agustus 2018 belum mampu membuat sektor ini kembali mencatatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari empat emiten di sektor properti yaitu PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang secara total mencatatkan *pre-sales* sebesar Rp20,3 triliun atau turun 1,8 persen (yoy) dari *pre-sales* di tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,7 triliun. *Real Estate Indonesia* (REI) optimis pertumbuhan sektor properti nasional akan mencapai 10 persen pada 2019. Sektor properti diyakini tumbuh seiring relaksasi yang diberikan oleh pemerintah maupun BI di sektor properti yang mungkin akan berdampak positif untuk meningkatkan permintaan di sektor properti pasca Pemilu.

Industri Pertambangan

Secara keseluruhan di 2018, sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,45 persen sepanjang tahun 2018 meskipun sempat tertekan di triwulan IV 2018. Kinerja positif sektor ini dipengaruhi iklim sektor pertambangan dalam negeri yang kondusif dan isu mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium yang akan mengambil alih saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Emiten pertambangan nikel ini akan melakukan divestasi sahamnya pada Oktober 2019 mendatang.

Sektor Pertanian/Perkebunan

Sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,21 persen sepanjang tahun 2018. Komoditas pertanian seperti CPO mengalami penurunan harga akibat faktor cuaca yang memasuki musim hujan di Indonesia dan curah hujan yang tinggi menyebabkan penurunan

produksi. Selain itu, melimpahnya jumlah stok minyak sawit di Indonesia dan Malaysia turut menjadi faktor penyebab menurunnya harga CPO. Malaysia mencatatkan peningkatan cadangan minyak kelapa sawit dari bulan Mei 2018 hingga mencapai puncaknya pada November 2018 sebesar 3,01 juta ton. Sementara itu, Indonesia mencatatkan cadangan akhir minyak kelapa sawit sebesar 4,41 juta ton. Selain itu, komoditas ini juga sedang mendapatkan tekanan untuk masuk ke India yang menerapkan tarif bea masuk CPO asal Indonesia hingga 44 persen dan produk turunannya sebesar 54 persen. Penerapan bea masuk minyak sawit India mendorong ekspektasi menurunnya ekspor ke negara tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian salah satunya adalah deregulasi yang dilakukan Kementerian Pertanian, antara lain dengan mencabut 219 Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) yang menghambat investasi.

Industri Manufaktur

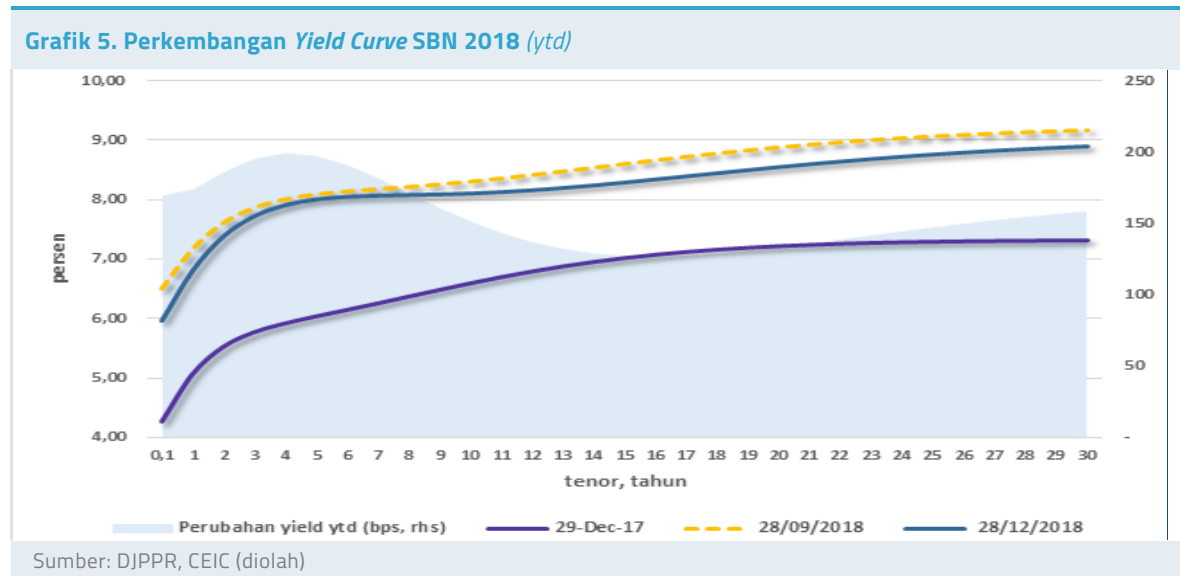
Indeks sektor manufaktur tercatat tumbuh negatif sebesar 1,34 persen selama 2018. Kementerian Perindustrian mencatat, realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur sepanjang tahun 2018 mencapai Rp222,3 triliun. Meskipun demikian, hal tersebut belum mampu mendorong perbaikan kinerja saham sektor tersebut yang terkena imbas dari sentimen pelemahan tingkat permintaan dunia. Ke depan, kinerja sektor ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan fokus Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi serta mendorong industrialisasi.

Perkembangan Pasar SBN

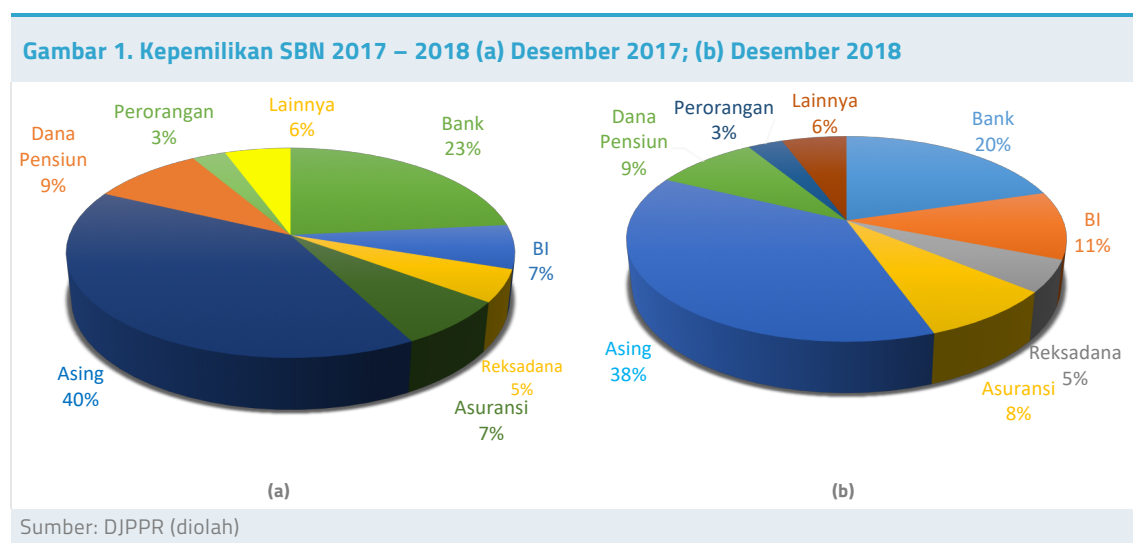
Di pasar SBN, yield SBN tenor 10 tahun generik naik sebesar 171 bps selama 2018 dengan dana asing tercatat masuk sebesar Rp57,10 triliun, jauh lebih kecil dibanding dana asing masuk tahun 2017 yang mencapai Rp170,34 triliun. Meskipun demikian, dari sisi nilai perdagangan, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah total SBN Rupiah yang beredar yang dapat diperdagangkan sebesar Rp2.368,45 triliun selama 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp481,33 triliun atau 20,32 persen-nya diserap oleh bank dan sebanyak Rp1.633,65 triliun atau 68,98 persen-nya dibeli oleh non bank seperti reksadana, asuransi, non residen, dana pensiun, individu, dan lain-lain. Di sisi lain, Bank Indonesia yang selama triwulan III 2018 tercatat melepas SBN sebesar Rp98,65 triliun, berbalik membeli sebanyak Rp142,08 triliun selama triwulan empat 2018 untuk tujuan operasi moneter dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, rata-rata harian perdagangan SBN di pasar sekunder selama 2018 tercatat sebesar Rp37,39 triliun, lebih tinggi dibanding rata-rata perdagangan harian tahun 2017 yang sebesar Rp33,91 triliun.

Meskipun di tengah berbagai sentimen negatif global, kinerja pasar SBN masih sangat baik, terlihat dari minat investor yang tinggi pada lelang SBN. Di pasar primer, rata-rata penawaran (*incoming bid*) yang masuk selama lelang 2018 tercatat sebesar Rp27,87 triliun, sedikit lebih rendah dibanding rata-rata penawaran pada tahun lalu yang sebesar Rp27,99 triliun. Adapun rata-rata penawaran yang dimenangkan (*awarded bid*) meningkat dari Rp11,74 triliun pada

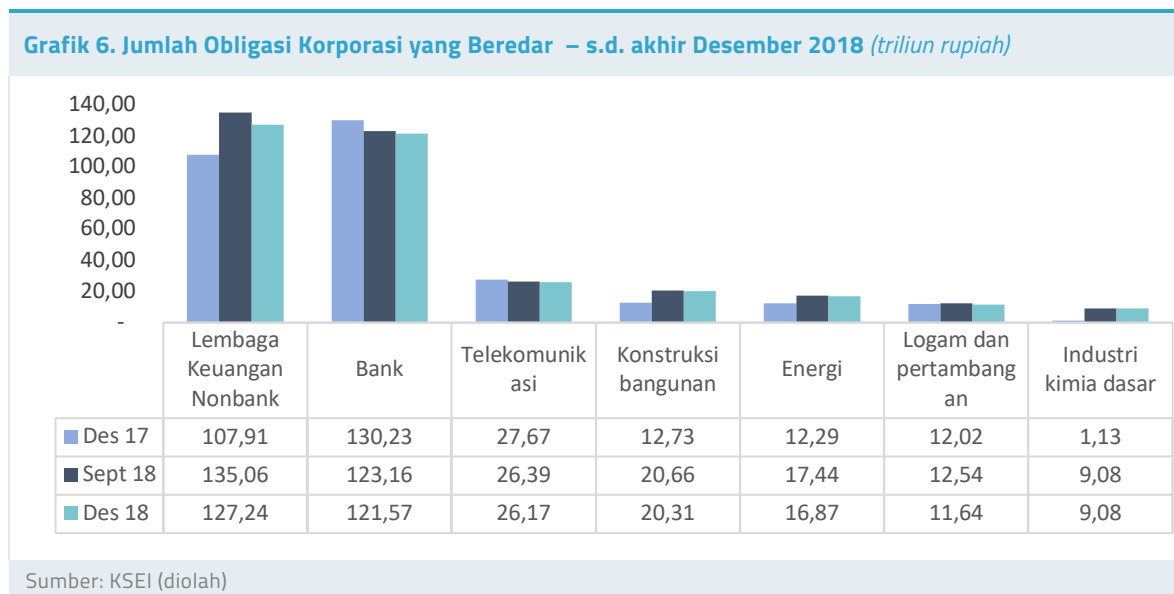
2017 menjadi Rp12,15 triliun pada 2018, dengan *bid to cover ratio* meningkat dari 2,12 ke 2,87. Untuk rekor tertinggi *incoming bid* tahun 2018 tercatat masih pada level Rp86,2 triliun, yaitu pada lelang pertama bulan Januari 2018, sementara *incoming bid* tertinggi pada 2017 berada di angka Rp58,6 triliun, yaitu pada lelang 8 Agustus 2017. Adapun untuk lelang selama 2019 (sampai dengan 19 Februari 2019), nilai rata-rata penawaran yang masuk tercatat sebesar Rp38,89 triliun dengan rata-rata *awarded bid* sebesar Rp17,34 triliun.



Seiring dengan beberapa kali terjadinya peningkatan volatilitas di pasar keuangan, kepemilikan asing (nonresiden) di 2018 menurun dari 40 persen menjadi 38 persen. Selain investor nonresiden, porsi terbesar kepemilikan SBN berikutnya dimiliki oleh bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Kepemilikan SBN oleh bank terlihat mengalami penurunan dari 23 persen pada akhir 2017 menjadi 20 persen pada akhir Desember 2018. Sementara itu, kepemilikan Bank Indonesia naik dari 7 persen ke 10 persen dalam periode yang sama. Hal ini tidak terlepas dari operasi moneter Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar Rupiah melalui pengendalian pasokan Rupiah di pasar.



Perkembangan Obligasi Korporasi



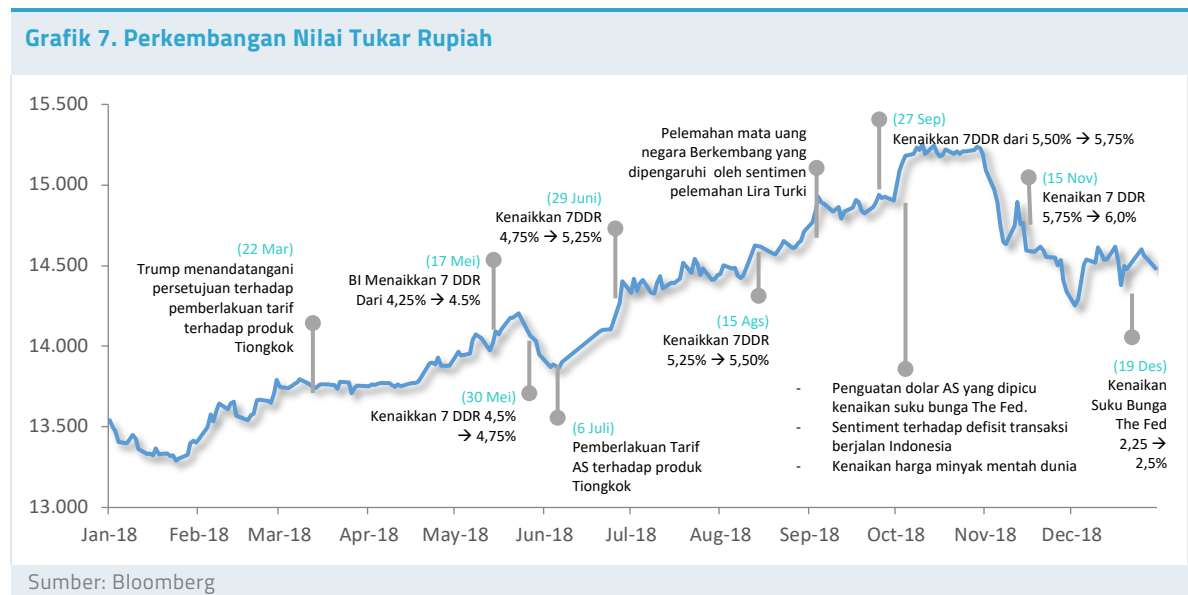
Aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat utang oleh korporasi tumbuh melambat selama 2018. Per akhir Desember 2018, nilai total obligasi korporasi yang beredar mencapai Rp401,95 triliun, naik sebesar 5,83 persen (yoy) dari Rp379,82 triliun pada akhir 2017. Dengan kata lain, terdapat tambahan surat utang baru senilai Rp22,13 triliun selama 2018. Secara sektoral, lima besar penerbit obligasi korporasi ini masih ditempati oleh lembaga keuangan nonbank (31,66 persen), bank (30,24 persen), telekomunikasi (6,51 persen), konstruksi bangunan (5,05 persen), dan sektor energi (4,20 persen). Untuk tahun depan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2019 akan berada di kisaran Rp130 triliun hingga Rp170 triliun.

Perkembangan Rupiah dan Moneter

Volatilitas yang meningkat di pasar keuangan seperti turunnya arus modal yang masuk ke dalam negeri pada akhirnya juga tercermin pada pergerakan Rupiah dan suku bunga domestik Indonesia selama tahun 2018. Dinamika global yang intensif terjadi membuat instrumen-instrumen keuangan AS menjadi buruan investor karena dianggap relatif aman dibandingkan surat utang negara lainnya. Kondisi ini kemudian mendorong permintaan akan dolar AS dan membuat indeks dolar AS (DXY Index) sempat menguat ke titik tertinggi 2018 pada pertengahan November di 97,5 naik 5,88 persen dibanding awal tahun 2018.

Nilai tukar Rupiah selama tahun 2018 cenderung bergerak terdepresiasi, khususnya pada paruh ke-2 tahun 2018. Khusus bulan Oktober 2018, Rupiah terdepresiasi sebesar 2,0 persen dengan titik terendah terjadi pada 30 Oktober sebesar Rp15.237 per dolar AS. Jika dibandingkan dengan penutupan tahun 2017, kondisi Rupiah pada 31 Oktober 2018 terdepresiasi 12,4 persen. Untuk menjaga arus modal di pasar domestik, mengantisipasi tekanan eksternal serta mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa

kebijakan antara lain dengan pengendalian impor barang konsumsi serta mendorong pemanfaatan biodiesel. Dari sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (7-Day Reverse Repo/7DRR) secara bertahap dengan total sebesar 175 bps, dari 4,25 persen menjadi 6,0 persen. Penguatan bauran kebijakan ini telah membantu terciptanya tren apresiasi rupiah pada November dan Desember 2018 sehingga membuat depresiasi tahunan 2018 menjadi hanya 6,89 persen. Sejalan dengan masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia di awal 2019, rupiah mencatatkan tren apresiasi sebesar 2,82 persen selama bulan Januari 2019 hingga mencapai Rp14.072 per dolar AS di akhir periode tersebut.



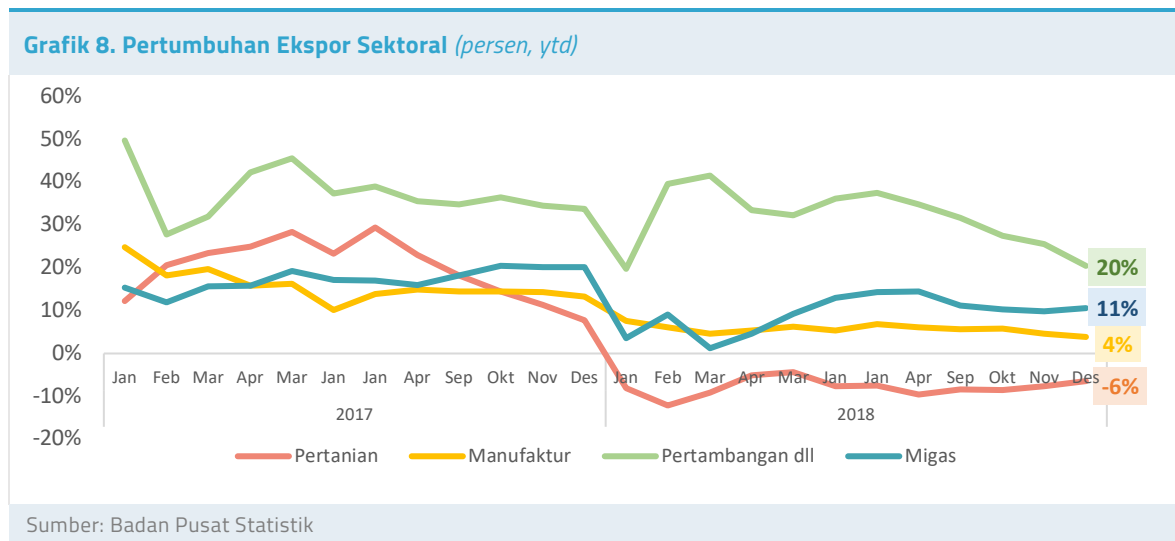
Meski di tengah tantangan volatilitas keuangan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia relatif cukup kuat yang turut ditandai dengan cadangan devisa yang masih berada di level cukup tinggi. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2018 mencapai USD120,7 miliar setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kondisi ini tentunya diharapkan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi stabilitas domestik yang terjaga serta pencapaian inflasi dan realisasi APBN yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya juga menjadi faktor yang menjaga persepsi investor terhadap Indonesia.

Secara umum, kondisi moneter dan pasar keuangan Indonesia tahun 2018 diwarnai oleh isu pengetatan likuiditas, khususnya akibat dampak pengetatan likuiditas global. Selama tahun 2018, 7DRR telah mengalami penyesuaian sebanyak 5 (lima) kali hingga mencapai 6,0 persen di bulan Desember 2018. Hal ini diikuti kenaikan suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) menjadi 5,96 persen per Desember 2018 atau meningkat dibanding Desember 2017 sebesar 3,9 persen. Suku bunga JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) dan suku bunga deposito (tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan) juga berada pada tren meningkat pada tahun 2018. Dari sisi likuiditas, tren penurunan laju pertumbuhan uang beredar (M1 dan M2) juga terjadi selama tahun 2018. Jika

pada tahun 2017 rata-rata pertumbuhan M1 mencapai 14 persen (yoy) dan M2 mencapai 10 persen (yoy), di tahun 2018 laju pertumbuhan ini melambat. Pada tahun 2018, rata-rata pertumbuhan M1 mencapai 8,73 persen (yoy) sementara M2 mencapai 6,89 persen (yoy).

C. PERDAGANGAN INDONESIA

Di tahun 2018, kondisi neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD8,6 miliar, berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya yang membukukan surplus. Hal tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan impor baik migas maupun nonmigas yang lebih cepat. Di samping tergerus lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya, besarnya defisit ini juga tercatat sebagai defisit tertinggi sejak 1975 (berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh BPS). Meski demikian, adanya kebijakan pemerintah baik di sisi impor maupun ekspor mampu mengurangi tekanan defisit yang lebih dalam khususnya pada triwulan terakhir 2018.



Ekspor di tahun 2018 masih tumbuh positif sebesar 6,7 persen, meskipun lebih lambat dibanding tahun 2017 yang sebesar 16,3 persen. Dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekspor yaitu permintaan global dan harga komoditas yang relatif stagnan bahkan jauh lebih rendah sepanjang tahun 2018. Adanya tensi perang dagang yang semakin intensif sejak awal April 2018 juga turut menciptakan ketidakpastian global dan membatasi laju pertumbuhan ekspor. Pelemahan nilai tukar mata uang dunia, termasuk rupiah, yang seyogyanya berperan meningkatkan daya saing, belum memberi dukungan yang optimal pada peningkatan ekspor. Hal ini disebabkan secara *real effective*, nilai tukar rupiah masih cukup kuat dibandingkan pelemahan yang dialami oleh nilai tukar negara mitra dagang dan/atau negara kompetitor seperti India.

Kinerja ekspor nonmigas bertumpu pada sektor pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan 20,5 persen. Pertumbuhan harga komoditas pertambangan, terutama batubara dan nikel yang sangat tinggi pada tahun 2018, telah berkontribusi pada ekspor sektor pertambangan. Di tengah kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 25 persen dari

kuota produksi batubara, Pemerintah juga mendorong penambahan produksi, sehingga volume ekspor batubara masih terjaga. Sementara komoditas nikel, berdasarkan olahan data BPS, pada tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan harga hingga 25,6 persen. Di sisi lain, pertumbuhan sektor manufaktur sebagai sektor dengan kontribusi terbesar masih tertahan oleh rendahnya harga komoditas bahan baku domestik seperti karet dan kelapa sawit. Sementara itu, ekspor sektor pertanian di tahun 2018 tercatat mengalami kontraksi disebabkan oleh adanya *tariff barrier* dan *non-tariff barrier* di negara tujuan ekspor pada komoditas ikan dan udang sebagai penyumbang terbesar di sektor ini. Komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah juga turut menyumbang pertumbuhan negatif, salah satunya dipicu oleh tingginya konsumsi domestik.

Tabel 3. Kontribusi Pertumbuhan Komponen Ekspor (persen, ytd)

Desember 2018	Bulanan		Kumulatif
	Pertumbuhan	Pertumbuhan	Share
Total Ekspor	-4,6	6,70	100,00
Migas	16,7	10,60	9,66
Non Migas	-7,0	6,30	90,34
- Pertanian	8,2	-6,40	2,11
- Manufaktur	-3,8	3,90	79,90
- Pertambangan	-20,8	20,50	17,99

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan ekonomi global yang bergejolak juga berpengaruh terhadap pangsa ekspor nonmigas. Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh tensi perang dagang, pangsa ekspor nonmigas ke AS dan Tiongkok mengalami perubahan. Pangsa ekspor nonmigas ke Tiongkok meningkat dari 14,0 persen di tahun 2017 menjadi sekitar 15,0 persen di tahun 2018. Komoditas ekspor nonmigas berupa bijih, kerak dan abu logam, serta bahan bakar mineral berupa batubara ke Tiongkok menjadi penyumbang peningkatan pangsa ini. Sementara pangsa ekspor nonmigas ke AS tercatat lebih rendah dipicu oleh penurunan pada produk turunan kelapa sawit, karet, dan elektronik yang diekspor ke AS. Mitra ekspor lainnya seperti Jepang, masih mencatatkan peningkatan pangsa ekspor nonmigas, dengan komoditas yang menyumbang tertinggi antara lain batubara dan mutiara (perhiasan/permata).

Pertumbuhan impor di tahun 2018 sebesar 20,2 persen tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Laju impor yang tinggi ini terutama didorong oleh permintaan domestik, khususnya untuk kegiatan produksi dan investasi. Hal tersebut nampak dari pertumbuhan barang modal dan bahan mentah masing-masing sebesar 20,9 persen dan 19,8 persen. Perbaikan daya beli masyarakat juga telah mendorong pertumbuhan impor barang konsumsi mencapai 22,0 persen. Mencermati laju pertumbuhan impor yang tinggi ini, Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan pengendalian impor pada triwulan terakhir 2018. Kebijakan yang diambil adalah kenaikan tarif PPh impor pada 1.147 jenis komoditas

barang konsumsi, percepatan implementasi mandatori 20 persen campuran biodiesel pada solar (B20), himbauan penggunaan kandungan lokal termasuk pada proyek infrastruktur, dan kewajiban Pertamina untuk membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Kebijakan-kebijakan ini diiringi upaya untuk mendorong ekspor seperti melalui penambahan kuota produksi batu bara. Langkah-langkah ini telah memberikan dampak yang baik dalam menahan laju pertumbuhan impor di periode akhir tahun 2018.

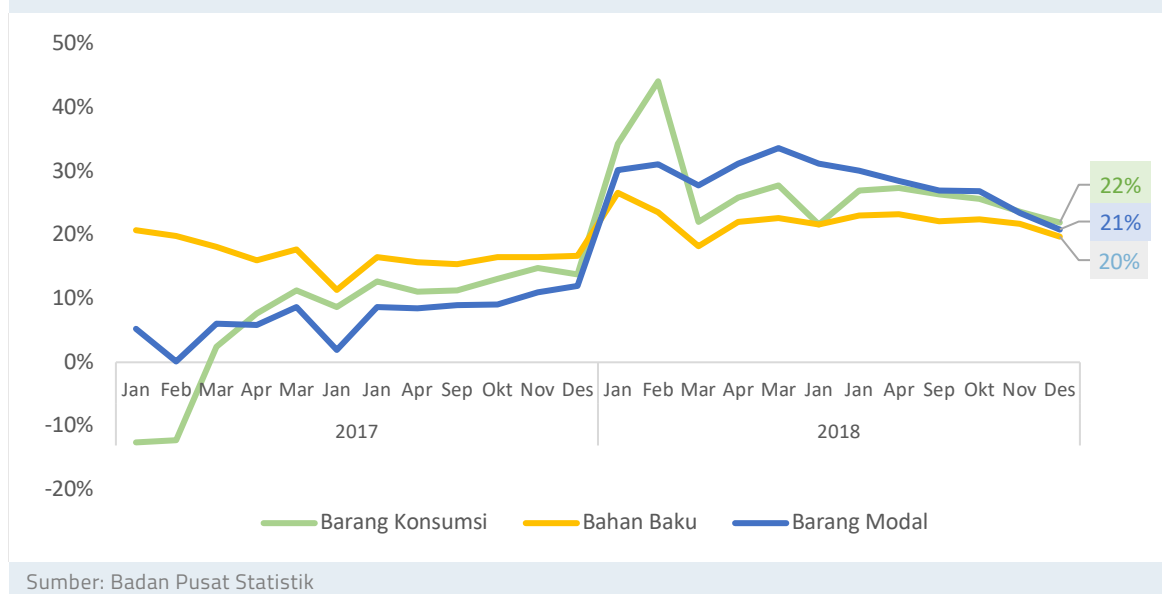
Tabel 4. Kontribusi Pertumbuhan Komponen Impor (persen, ytd)

Desember 2018	Bulanan		Kumulatif
	Pertumbuhan	Pertumbuhan	Share
Total Impor	1,2	20,20	100,00
Migas	-23,3	22,60	15,83
Non Migas	6,2	19,70	84,17
Barang Konsumsi	6,2	22,00	9,11
Bahan Baku	0,9	19,80	74,88
Barang Modal	-0,3	20,90	16,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Impor nonmigas berkontribusi besar terhadap lonjakan total impor seiring dengan laju perbaikan ekonomi dan pembangunan proyek infrastruktur. Hal ini tercermin dari permintaan atas bahan baku industri dan barang modal selain alat angkutan yang meningkat di sepanjang tahun 2018. Sementara impor bahan baku berupa suku cadang dan perlengkapan barang modal meningkat seiring peningkatan impor barang modal (selain alat angkutan). Selain itu, komoditas nonmigas yang juga menunjukkan peningkatan signifikan adalah berupa barang konsumsi yang tergolong ke dalam makanan dan minuman (*processed*) untuk rumah tangga.

Grafik 9. Pertumbuhan Impor Menurut Penggunaan (persen, yoy)



Sementara itu, impor migas kembali melonjak di tahun 2018 disebabkan oleh harga minyak mentah yang sempat bergerak naik cukup tinggi. Ketidakpastian global termasuk yang dalam permintaan dan pasokan minyak oleh OPEC telah memicu fluktuasi harga minyak. Di periode awal hingga triwulan ketiga 2018, harga minyak mentah dunia sempat berada dalam tren kenaikan yang cukup signifikan. Faktor ini sangat dominan dalam mendorong tingginya pertumbuhan impor migas secara keseluruhan di tahun 2018. Tekanan impor migas yang tinggi ini disikapi Pemerintah melalui percepatan implementasi mandatori implementasi campuran 20 persen CPO pada biodiesel (B20) per 1 September 2018. Di samping itu, Pemerintah juga mewajibkan Pertamina membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam menahan laju pertumbuhan impor minyak mentah dan produk minyak meskipun baru diimplementasikan dalam empat bulan terakhir di 2018. Tercatat terjadi penurunan pertumbuhan volume impor minyak mentah dalam periode ini hingga sekitar 20 persen. Sementara untuk impor produk minyak terutama solar, tercatat mengalami penurunan volume sekitar 2 persen. Masih relatif rendahnya penurunan volume impor solar antara lain disebabkan oleh terkendalanya distribusi pasokan bahan baku B20 ke terminal BBM.

Asal barang-barang impor Indonesia masih didominasi oleh negara-negara mitra utama. Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar dengan peran 28,5 persen, diantaranya impor komoditas plastik dan barang dari plastik. Kemudian diikuti oleh Jepang dengan peranan 11,3 persen, yang salah satunya disebabkan posisi Indonesia yang menjadi salah satu negara dalam rantai produksi otomotif Jepang. Di tengah tekanan isu perang dagang, peran Amerika Serikat dalam menyumbang impor Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 5,7 persen. Barang yang diimpor dari Amerika Serikat antara lain berupa mesin dan peralatan listrik.

Perkembangan ekspor dan impor di sepanjang tahun 2018 ini berdampak pada kinerja Transaksi Berjalan tahun 2018. Total perdagangan barang (ekspor dan impor) akan mendorong peningkatan impor jasa, terutama jasa asuransi (*insurance*) dan transportasi barang (*freight*). Di tahun 2018, terjadi pembalikan kondisi neraca barang dan jasa, yang pada tahun sebelumnya mencatatkan surplus sekitar USD11,0 miliar menjadi defisit yang diperkirakan sekitar USD8,4 miliar sehingga akan terdapat risiko pelebaran defisit Transaksi Berjalan di tahun 2018.

Ke depan, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga agar kinerja neraca perdagangan terus terjaga serta daya saing ekspor terus meningkat. Pemerintah akan memperkuat langkah kebijakan yang telah diambil seperti meningkatkan mandatori B20 menjadi B30 (kewajiban penggunaan campuran 30 persen biodiesel) dan terus mendorong diversifikasi tujuan ekspor dengan menysasar kawasan potensial seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Kemudahan ekspor juga akan terus menjadi prioritas termasuk melalui revisi beberapa Peraturan Menteri Perdagangan untuk relaksasi ekspor beberapa komoditas seperti CPO dan turunannya dan gas.

Dalam periode 2014–2018, Pemerintah bersama BI, OJK, dan institusi lainnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mendorong ekspor Indonesia. Pemerintah dalam

mendorong hilirisasi di sektor pertambangan, telah mengeluarkan PP Nomor 1 tahun 2014 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui PP ini, Pemerintah mewajibkan Pemegang kontrak karya dan IUP Operasi Produksi melakukan pemurnian dan pengolahan sebelum melakukan ekspor. Namun dalam perjalanannya, kebijakan ini belum dapat sepenuhnya dijalankan dikarenakan kendala teknis seperti lahan lokasi industri pemurnian dan biaya investasi yang cukup besar.

Sepanjang periode 2015–2018, Pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Paket Kebijakan yang dikeluarkan terfokus pada upaya strategis dalam perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing, percepatan infrastruktur, serta aspek perlindungan masyarakat dan ekonomi pedesaan. Pada PKE I, Pemerintah mendorong peningkatan daya saing industri terutama dengan kepastian bahan baku untuk menunjang ekspor manufaktur. PKE II dukungan Pemerintah diberikan melalui penyediaan insentif kawasan logistik berikat serta penghapusan PPN impor alat transportasi. Pada PKE VI, Pemerintah kembali memberikan insentif bagi industri tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta penyederhanaan perizinan Impor Bahan Baku Farmasi. Paket kebijakan selanjutnya Pemerintah memberikan dukungan ekspor melalui deregulasi di sektor logistik, percepatan infrastruktur listrik, perubahan tata laksana impor (*postborder*), dan sistem logistik nasional.

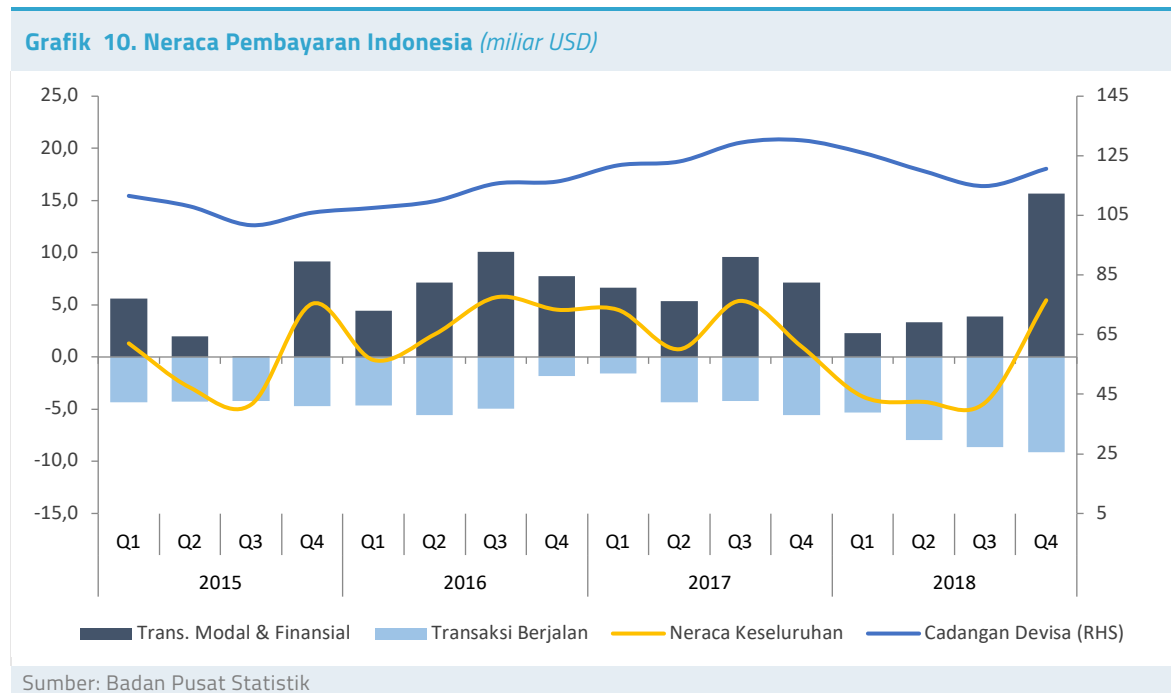
Selain PKE ada beberapa kebijakan lain yang mendukung seperti perubahan sistem klasifikasi barang pada tahun 2017 yang berdasarkan WCO sehingga penomoran klasifikasi barang di Indonesia sama se-ASEAN dan negara-negara anggota WTO. Perubahan tersebut diikuti dengan semua perubahan klasifikasi barang semua kerjasama perdagangan luar negeri Indonesia (ACFTA, AKFTA, IJEPA, dsb).

D. NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Defisit transaksi perdagangan dan pengetatan likuiditas global berkontribusi pada defisit Neraca Pembayaran Indonesia di tahun 2018 yang mencapai USD7,1 miliar. Defisit ini disumbang oleh defisit transaksi berjalan sebesar USD31,1 miliar, yang lebih besar dibanding arus modal masuk pada Transaksi Modal dan Finansial (TMF) sebesar USD25,2 miliar. Meskipun demikian, ketahanan tetap terjaga yang ditunjukkan oleh cadangan devisa yang sebesar USD120,7 miliar sampai dengan akhir Desember 2018. Meskipun cadangan devisa menurun dibanding posisi akhir 2017 sebesar USD130,2 miliar, namun masih berada dalam ambang batas yang aman (6,5 bulan impor dan pembayaran LN; di atas *benchmark* 3 bulan).

Neraca Transaksi Berjalan pada tahun 2018 mengalami pelebaran defisit dan hampir menyentuh level aman 3,0 persen. Tekanan terhadap Neraca Transaksi Berjalan ini terutama bersumber dari defisit neraca perdagangan barang di tengah perbaikan pada tiga komponen lainnya. Neraca Perdagangan Barang mengalami defisit, berkebalikan dengan kondisi di tahun-tahun sebelumnya. Defisit yang dialami pada tahun ini dipicu oleh laju pertumbuhan impor

yang lebih cepat dibandingkan ekspor. Dalam tahun ini surplus nonmigas mengalami penurunan yang sangat dalam dari USD25,2 miliar di tahun 2017 menjadi USD11,6 miliar¹.



Defisit Neraca Migas juga melebar yang disebabkan oleh harga minyak dan gas yang tinggi. Kenaikan harga migas tersebut sebenarnya mendorong peningkatan baik ekspor maupun impor minyak dan gas, akan tetapi di saat yang sama, volume ekspor minyak mengalami penurunan seiring dengan rendahnya *lifting* dan pemenuhan kebutuhan domestik. Di saat yang sama, terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar yang mendorong tingginya impor minyak dan gas.

Sementara itu, defisit Neraca Jasa mengalami penyempitan ditopang oleh kinerja jasa perjalanan (pariwisata) yang masih menjadi tumpuan ekspor jasa. Beberapa bencana yang terjadi sempat memberikan dampak penurunan kunjungan wisatawan asing. Namun dengan adanya *event Asian Games* dan *Annual Meeting IMF-WB* mampu menahan laju penurunan ekspor jasa. Dari sisi impor, perbaikan kinerja ekspor impor barang dan harga minyak yang tinggi, telah memicu peningkatan impor jasa transportasi yang lebih tinggi.

Pendapatan Primer mengalami penurunan defisit seiring lonjakan yang tinggi terutama bersumber dari pendapatan ekuitas atas investasi langsung. Sementara pembayaran atas pendapatan investasi relatif melambat, seiring dengan penurunan performa perusahaan asing di sektor manufaktur. Di sisi lain, Surplus Pendapatan Sekunder meningkat signifikan.

¹ Besaran ini berdasarkan FOB. Data yang dirilis oleh BPS, impor masih menggunakan CIF, sehingga terjadi perbedaan nilai defisit.

Peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus dilakukan oleh Pemerintah telah memberikan hasil yang terlihat pada naiknya neto transfer personal (remitansi). Bertambahnya jumlah PMI sekitar 102 ribu orang terutama di kawasan Asia Pasifik dan penyesuaian upah di negara-negara tersebut menjadi faktor peningkatan remitansi. Penerimaan transfer lainnya juga meningkat terutama yang bersumber dari hibah dan bantuan luar negeri untuk bencana gempa Lombok.

Defisit Transaksi Berjalan yang cukup tinggi menjadi perhatian utama di tahun 2018. Pemerintah mencermati perkembangan defisit Transaksi Berjalan ini dengan mengambil beberapa kebijakan untuk mendorong ekspor barang dan jasa, serta pengendalian impor. Kebijakan yang secara resmi baru terimplementasi di bulan-bulan terakhir tahun 2018 mampu menahan laju pelebaran defisit migas, meskipun belum mampu menahan penurunan surplus nonmigas.

Di tengah tingginya tekanan pasar keuangan global, kinerja Transaksi Modal dan Finansial (TMF) masih mampu mencatatkan surplus. Perbaikan fundamental perekonomian domestik mampu menjaga perspektif investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun sempat mengalami penurunan performa di awal tahun, aliran dana mulai meningkat di triwulan IV terutama dari tingginya surplus investasi portofolio. Dana masuk dari investasi langsung dan investasi lainnya juga mendorong kinerja TMF hingga mampu mencatatkan surplus sebesar USD25,2 miliar selama tahun 2018. Surplus ini mampu mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah di akhir tahun dan mendorong peningkatan cadangan devisa yang sempat tergerus selama tiga triwulan awal.

Aliran dana masuk pada investasi portofolio di akhir periode mampu membalikkan performa yang selama tiga triwulan awal mencatatkan defisit. Kinerja investasi portofolio selama tahun 2018 dibayangi oleh aksi penarikan dana oleh investor asing di pasar saham sebagai dampak kebijakan moneter yang terjadi di AS. Kepemilikan asing di pasar SBN juga sempat membukukan neto penjualan di triwulan II yang menyebabkan turunnya performa investasi portofolio selama tiga triwulan awal. Meredanya tekanan keuangan global di akhir tahun 2018 mendorong mulai derasnya aliran masuk ke pasar domestik, baik di pasar saham maupun SBN hingga mencapai Rp43,7 triliun di triwulan IV. Pada periode tersebut, Pemerintah melakukan penerbitan obligasi global sebesar USD4 miliar guna pembiayaan awal tahun 2019, serta terjadi penerbitan obligasi global korporasi yang cukup besar mencapai USD6,23 miliar. Aliran dana tersebut mendorong terjadinya surplus investasi portofolio sebesar USD9,3 miliar sampai akhir tahun 2018.

Sementara itu, surplus investasi langsung masih terjaga sejalan dengan perspektif positif investor asing terhadap perekonomian yang terus membaik. Di tahun 2018 ini terjadi peningkatan penempatan aset residen di luar negeri, namun hal tersebut masih mampu diimbangi dengan aliran dana masuk yang cukup tinggi ke perusahaan domestik. Penempatan aset di luar negeri oleh perusahaan Indonesia tercatat meningkat menjadi sebesar USD6,3 miliar, yang berasal dari aksi akuisisi beberapa perusahaan tambang di luar negeri, serta

ekspansi perusahaan domestik sektor e-commerce dan industri ke luar negeri. Peningkatan aset ini mencerminkan perusahaan Indonesia mulai dapat diterima di luar negeri dan diharapkan hal ini dapat mendorong kenaikan penerimaan pendapatan primer dan dapat mengurangi defisit transaksi berjalan. Sementara itu, aliran dana masuk ke perusahaan domestik masih cukup besar yakni mencapai USD20,2 miliar, yang sebagian besar mengalir ke perusahaan e-commerce serta berasal dari akuisisi perusahaan domestik oleh asing di sektor perbankan. Namun demikian, peningkatan surplus investasi langsung lebih lanjut tertahan dengan adanya pengalihan kepemilikan saham perusahaan asing di sektor pertambangan ke perusahaan domestik, sehingga nilai surplus investasi langsung di akhir tahun 2018 tercatat sebesar USD13,8 miliar.

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan domestik, perusahaan swasta melakukan aksi penarikan simpanan dan pinjaman yang menyebabkan tingginya surplus di investasi lainnya. Aset perusahaan swasta di luar negeri mengalami penurunan seiring dengan tingginya penarikan uang dan simpanan yang dilakukan oleh perusahaan swasta guna memenuhi peningkatan kebutuhan bisnisnya. Perusahaan swasta juga melakukan penarikan pinjaman yang lebih besar dibandingkan pembayaran yang dilakukan, sehingga secara sektoral perusahaan swasta mencatatkan surplus investasi lainnya mencapai USD3 miliar. Di sisi lain, selama tahun 2018 ini pemerintah melakukan pembayaran pinjaman yang lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman. Tingginya pembayaran pinjaman terjadi di triwulan kedua dan keempat menyebabkan defisit investasi lainnya dari sektor pemerintah sebesar USD1 miliar, sehingga secara keseluruhan investasi lainnya masih mampu membukukan surplus sebesar USD2 miliar.

Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagian besar indikator sustainabilitas eksternal di tahun 2018 menunjukkan kondisi yang relatif baik meskipun beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan risiko, diantaranya:

- Rasio Transaksi Berjalan terhadap PDB mencapai defisit 2,98 persen (mengalami pelebaran defisit), meskipun masih berada di bawah standar internasional sebesar 3 persen (2017: defisit 1,6 persen , 2016: defisit 1,82 persen),
- Rasio Ekspor ditambah Impor Barang dan Jasa terhadap PDB mencapai 40,8 persen (2017: 37,1 persen, 2016: 35,1 persen), yang menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan Indonesia selama tahun 2018,
- Rasio Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) terhadap PDB meningkat menjadi 35,8 persen (2017: 34,8 persen, 2016: 34,3 persen), yang menunjukkan adanya peningkatan nilai ULN yang melebihi peningkatan nilai kumulatif PDB selama 1 tahun,
- Rasio ULN terhadap Cadangan Devisa mengalami kenaikan menjadi sebesar 309 persen (2017: 271,2 persen , 2016: 275 persen), yang menunjukkan kerentanan dalam menutupi ULN melalui besaran cadangan devisa yang dimiliki saat ini.

E. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018

Di tengah peningkatan volatilitas global yang mempengaruhi posisi eksternal, Indonesia tetap mampu menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi. Kondisi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, serta didukung oleh permintaan domestik yang sehat dan kebijakan yang kredibel. Capaian ini juga merupakan salah satu yang paling baik dan stabil dibandingkan negara berkembang lainnya atau bahkan di antara kelompok G-20. Hal ini menunjukkan prospek pembangunan ekonomi Indonesia ke depan yang sangat baik serta terjaganya fundamental ekonomi di tengah lingkungan global yang penuh dinamika.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2018 mencapai 5,18 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17 persen, meskipun sedikit lebih rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,19 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 ini cukup menggembirakan karena lebih tinggi dari konsensus beberapa lembaga domestik dan asing yang memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh 5,12 persen. Secara tahunan, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir (sejak tahun 2014).

Tabel 5. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen, yoy)

Komponen Pengeluaran	2017					2018				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Kons Rumah Tangga dan LNPRT	5,00	5,03	4,93	4,98	4,98	5,01	5,23	5,07	5,20	5,13
Kons Rumah Tangga	4,94	4,95	4,91	4,98	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Kons LNPRT	8,08	8,53	6,04	5,26	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Kons Pemerintah	2,69	-1,94	3,46	3,80	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
PMTB	4,77	5,34	7,08	7,26	6,15	7,49	5,85	6,96	6,01	6,67
Ekspor	8,36	2,73	16,48	8,42	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	4,78	0,18	15,40	11,91	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
PDB	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari komponen pengeluaran (Tabel 5), tingginya kinerja pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih mampu tumbuh masing-masing di atas 5 persen dan 6 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,08 persen didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran dan tingkat inflasi yang stabil. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh konsumsi LNPRT yang tumbuh 10,79 persen sejalan dengan tingginya aktivitas sosial dan partai politik menjelang Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, meskipun mengalami perlambatan, PMTB (investasi) masih mampu tumbuh 6,01 persen. Perlambatan ini terkait dengan penurunan pertumbuhan pada komponen PMTB

terutama mesin dan perlengkapan, bangunan dan peralatan lainnya. Penurunan pada komponen tersebut juga ditandai oleh penurunan pertumbuhan impor barang modal.

Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh positif dan cukup tinggi yaitu sebesar 4,56 persen didorong oleh membaiknya realisasi APBN di triwulan IV yang mencapai 31,09 persen, lebih tinggi dari realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat terkait kenaikan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja sosial menjadi faktor tingginya realisasi APBN di triwulan IV 2018 ini.

Perdagangan internasional masih defisit karena pertumbuhan ekspor masih lebih rendah dari pertumbuhan impor. Ekspor tumbuh 4,33 persen, lebih rendah dari triwulan IV 2017 karena melambatnya volume perdagangan global dan pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sementara komponen impor tumbuh masih relatif cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor, impor tumbuh sebesar 7,10 persen yang juga lebih rendah dari triwulan IV 2017. Penurunan ini terkait dengan adanya penurunan permintaan domestik, terutama terhadap bahan pangan yang telah memenuhi kuota impor. Selain itu, penurunan impor minyak mentah akibat kebijakan pembelian minyak mentah dari produksi KKKS dalam negeri juga berkontribusi terhadap penurunan impor ini.

Sepanjang tahun 2018, dua driver utama pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi dan investasi, dapat tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari kontribusi kedua komponen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran dan tingkat inflasi yang rendah sebesar 3,13 persen di tahun 2018. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta kinerja pertumbuhan konsumsi LNPRT yang cukup tinggi sejalan dengan tingginya aktivitas sosial sepanjang tahun dan partai politik menjelang Pemilu pada triwulan IV tahun 2018. Komponen konsumsi Pemerintah juga menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan. Realisasi penyerapan belanja APBN yang mencapai 99 persen serta pelaksanaan anggaran yang lebih merata sejak awal tahun menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja konsumsi Pemerintah. PMTB juga mampu tumbuh lebih baik dibanding tahun 2017. Kinerja investasi masih tumbuh menggembirakan di tengah kebijakan bank sentral dalam menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (*7-Day Reverse Repo Rate*) sebesar 175 bps di 2018 sebagai respon terhadap volatilitas global.

Namun di sisi lain, kinerja perdagangan internasional di tahun 2018 masih belum optimal. Pertumbuhan ekspor yang relatif melambat dibanding pertumbuhan tahun lalu terutama disebabkan moderasi pertumbuhan volume perdagangan global dan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Jepang. Sementara itu, impor masih tumbuh tinggi terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi terutama didorong oleh kenaikan impor migas dan

mesin yang cukup tinggi guna pemenuhan permintaan domestik termasuk untuk kebutuhan barang modal dan bahan baku.

Tabel 6. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen, yoy)

Lapangan Usaha	2017					2018				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,11	3,32	2,83	2,39	3,87	3,34	4,72	3,66	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	-1,30	2,11	1,83	0,04	0,66	1,06	2,65	2,67	2,25	2,16
Industri Pengolahan	4,28	3,50	4,88	4,51	4,29	4,60	3,88	4,35	4,25	4,27
Konstruksi	5,96	6,95	6,98	7,24	6,80	7,35	5,73	5,79	5,58	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran	4,61	3,47	5,22	4,53	4,46	4,99	5,22	5,28	4,39	4,97
Transportasi & Pergudangan	8,06	8,80	8,88	8,21	8,49	8,56	8,70	5,65	5,34	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,35	5,60	5,52	5,11	5,39	5,17	5,60	5,91	5,95	5,66
Informasi dan Komunikasi	10,48	11,06	8,82	8,27	9,63	7,76	5,11	8,14	7,17	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,01	5,93	6,13	3,82	5,47	4,23	3,06	3,14	6,27	4,17
Jasa-jasa lainnya	4,32	3,89	4,78	6,26	4,83	5,56	6,17	6,79	6,45	6,25
PDB	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi produksi (Tabel 6), seluruh sektor ekonomi mampu tumbuh positif di triwulan IV. Beberapa sektor yang mampu menunjukkan kinerja peningkatan antara lain Sektor Pertanian, Pertambangan, dan Sektor Keuangan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh relatif stabil terutama ditopang oleh kinerja produksi kelompok tanaman pangan dan perikanan yang menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, kelompok perkebunan tumbuh melambat sebagai dampak produksi minyak kelapa sawit (CPO) konsisten dengan kinerja industri makanan-minuman.

Sektor Industri Pengolahan masih bergerak di bawah ekspektasi dengan hanya tumbuh 4,25 persen. Hal ini diakibatkan oleh perlambatan kinerja kelompok industri makanan-minuman seiring dengan menurunnya produksi CPO, terutama karena adanya hambatan ekspor CPO di negara-negara mitra yang disertai harga global CPO yang relatif turun. Sementara itu, kelompok industri nonmigas lainnya seperti tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan mampu tumbuh *double digit* didukung tingginya permintaan, baik di dalam maupun luar negeri.

Sektor Perdagangan tumbuh 4,39 persen, cenderung stabil sejalan dengan perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga dan stabilnya tingkat penjualan kendaraan bermotor. Aktivitas ekspor dan impor yang relatif melambat (jika dibanding triwulan IV 2017) sedikit menahan laju pertumbuhan sektor ini. Sementara itu, kinerja Sektor Jasa Keuangan kembali mampu tumbuh tinggi sebesar 6,27 persen ditopang oleh perbaikan aktivitas perbankan dan pasar modal yang tumbuh meningkat didukung oleh indikator pertumbuhan kredit perbankan serta peningkatan likuiditas pasar modal seiring dengan penerapan waktu penyelesaian yang lebih cepat.

Sepanjang tahun 2018, sektor-sektor utama dapat berkontribusi lebih baik dibanding tahun sebelumnya antara lain Sektor Pertanian, Pertambangan, dan Perdagangan. Kinerja pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang cukup baik ditopang oleh peningkatan kinerja produksi kelompok hortikultura dan peternakan, serta stabilitas produksi pangan dan perikanan. Sementara itu, sektor-sektor lainnya tumbuh relatif stabil dengan kecenderungan sedikit melambat, termasuk pada sektor dengan kontribusi terbesar yakni Sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan sektor ini masih bergerak di bawah ekspektasi yang disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan beberapa kelompok industri, seperti industri pengilangan migas, kimia dan farmasi, serta industri barang logam dan elektronik. Sementara itu, beberapa kelompok industri nonmigas seperti tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan masih mampu tumbuh lebih tinggi untuk pemenuhan kebutuhan baik dalam negeri maupun ekspor.

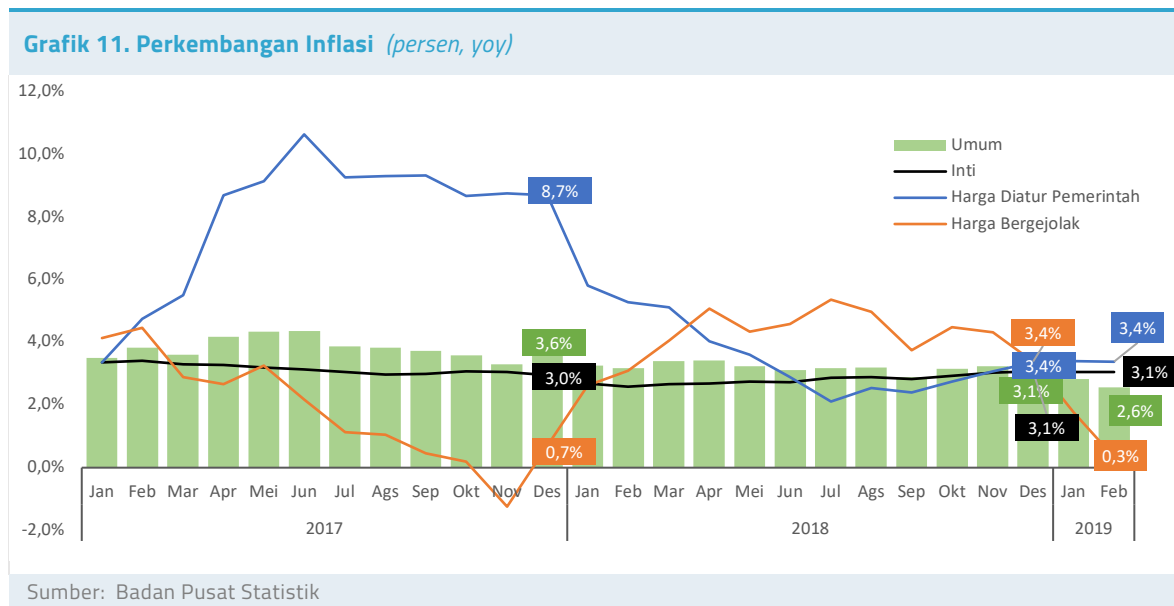
Secara kewilayahan, struktur perekonomian Indonesia pada tahun 2018 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa kemudian diikuti oleh Sumatera dan Kalimantan. Terdapat tiga wilayah yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional, yakni Maluku & Papua, Sulawesi, serta Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan menjadi sinyal yang baik dalam mencapai pemerataan sumber pertumbuhan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang tumbuh cukup rendah terkait dengan proses pemulihan pasca bencana alam.

F. INFLASI INDONESIA

Fundamental ekonomi Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh inflasi yang secara konsisten terkendali. Faktor ini telah mendukung daya beli masyarakat, sehingga konsumsi tetap terjaga. Di tengah tekanan pada sisi perdagangan internasional, menjaga stabilitas permintaan domestik termasuk konsumsi, menjadi faktor yang sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tetap sehat. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya agar inflasi terkendali termasuk dengan memperbaiki sisi penawaran dan penguatan koordinasi.

Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2018 yang stabil dan rendah menunjukkan capaian positif. Laju inflasi tercatat sebesar 3,13 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,61 persen (yoy). Realisasi ini mencerminkan konsistensi pencapaian sasaran inflasi selama empat tahun berturut-turut sehingga ikut berkontribusi positif dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan konsumsi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkendalnya laju inflasi 2018 didukung oleh terjaganya inflasi *volatile food*, rendahnya inflasi *administered price*, dan relatif stabilnya inflasi inti di tengah tekanan eksternal, khususnya dampak pelemahan Rupiah. Sepanjang tahun 2018, tekanan inflasi terbesar bersumber dari inflasi *volatile food* yang didorong oleh tingginya harga beras di awal tahun serta meningkatnya harga daging dan telur ayam ras. Di sisi lain, laju inflasi *administered price* mengalami perlambatan di tahun 2018 didukung oleh tidak adanya kebijakan harga energi oleh Pemerintah. Sementara itu, inflasi inti masih relatif stabil pada kisaran 3 persen, meskipun mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan pergerakan faktor fundamental inflasi inti, khususnya dari sisi permintaan.

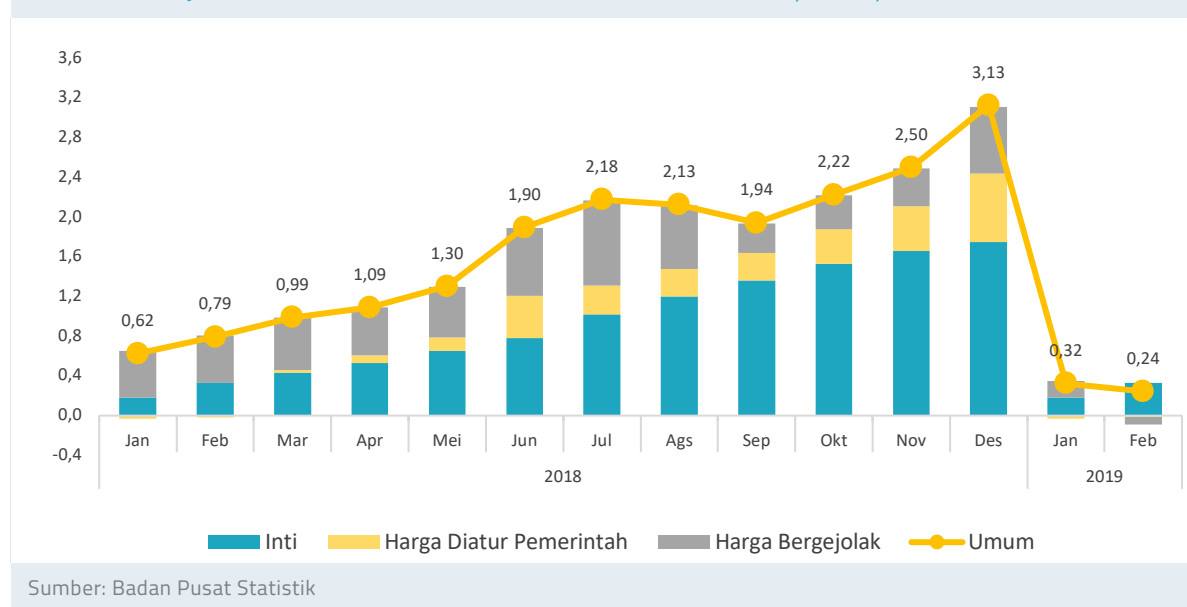


Tekanan inflasi komponen *volatile food* di triwulan akhir 2018 terutama dipengaruhi faktor musim tanam, cuaca, serta peningkatan permintaan seiring periode HBKN Natal dan libur akhir tahun. Sumbangan inflasi *volatile food* terutama berasal dari peningkatan harga daging dan telur ayam ras. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan akibat depresiasi Rupiah, faktor cuaca yang menyebabkan menurunnya produktivitas, serta peningkatan permintaan terutama pada masa HBKN. Sementara itu, meningkatnya intensitas hujan mengganggu produksi dan panen komoditas hortikultura sehingga menyebabkan kenaikan harga terutama pada bawang merah dan sayuran. Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas ikan segar. Faktor gangguan cuaca juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan sehingga mengurangi pasokan. Selain itu, harga beras yang mulai meningkat sejak September terus berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan masuknya musim tanam. Namun demikian, Pemerintah telah mengantisipasi kekurangan produksi beras domestik dengan memperkuat cadangan beras. Melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) oleh Bulog, lonjakan kenaikan harga beras dapat diantisipasi sehingga kenaikan yang terjadi tidak setajam akhir tahun 2017. Sepanjang tahun 2018, andil komoditas *volatile food* yang menyumbang tekanan inflasi terbesar berasal dari beras, daging ayam ras, dan ikan segar. Secara kumulatif, inflasi *volatile food* di tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017, namun dapat terjaga pada level 3,39 persen (yoy).

Sementara itu, tekanan inflasi *administered price* meningkat akhir 2018 seiring naiknya permintaan pada masa Natal dan liburan akhir tahun. Peningkatan tarif transportasi bersumber dari naiknya tarif angkutan udara, kereta api, dan angkutan antarkota. Di sisi lain, meningkatnya harga bensin nonsubsidi, yaitu Pertamina dan Dex series di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia juga memberikan sumbangan inflasi di bulan Oktober dan November. Sepanjang tahun 2018, komoditas *administered price* yang cukup memberikan tekanan inflasi berasal dari bensin nonsubsidi, rokok, dan tarif angkutan udara. Namun demikian, inflasi *administered price* di tahun 2018 tetap terkendali pada level yang cukup rendah, yaitu 3,36 persen (yoy) seiring tidak adanya kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah. Realisasi ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mengalami inflasi 8,70 persen (yoy).

Inflasi inti masih relatif stabil pada kisaran 3 persen meskipun dengan tren sedikit meningkat. Laju inflasi inti mulai mengalami tren meningkat sejak Februari 2018. Peningkatan ini terjadi seiring dengan tekanan dari pelemahan nilai tukar Rupiah. Laju inflasi inti meningkat terutama didorong kenaikan kontrak dan sewa rumah yang dipengaruhi oleh kenaikan ongkos pemeliharaan serta harga bahan bangunan. Selain itu, komoditas nasi dengan lauk, upah tukang bukan mandor juga memberi sumbangan inflasi di akhir tahun. Meskipun dalam tren meningkat sejak Februari, inflasi komponen inti masih dapat terkendali hingga akhir tahun dikarenakan terjaganya ekspektasi inflasi. Inflasi komponen inti pada tahun 2018 mencapai 3,07 persen (yoy), meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar 2,95 persen (yoy).

Grafik 12. Komponen Pembentuk Inflasi Tahun 2018 dan Januari 2019 (persen, ytd)



Terkendalnya laju inflasi masih berlanjut di awal tahun 2019. Hingga Februari 2019, laju inflasi mencapai 0,24 persen (ytd) atau 2,57 persen (yoy) didukung oleh terkendalnya harga beberapa komoditas pangan serta penurunan harga bensin nonsubsidi dan tarif kereta api. Terkendalnya harga pangan, terutama didorong oleh kenaikan harga beras yang sangat terjaga didukung dengan cadangan beras Bulog pada level yang aman. Selain itu, terdapat penurunan

harga komoditas hortikultura (bawang merah dan aneka cabai) serta daging dan telur ayam ras seiring melimpahnya pasokan. Sementara itu, laju inflasi inti masih bergerak stabil pada kisaran 3 persen.

G. KINERJA SEKTOR PERBANKAN INDONESIA

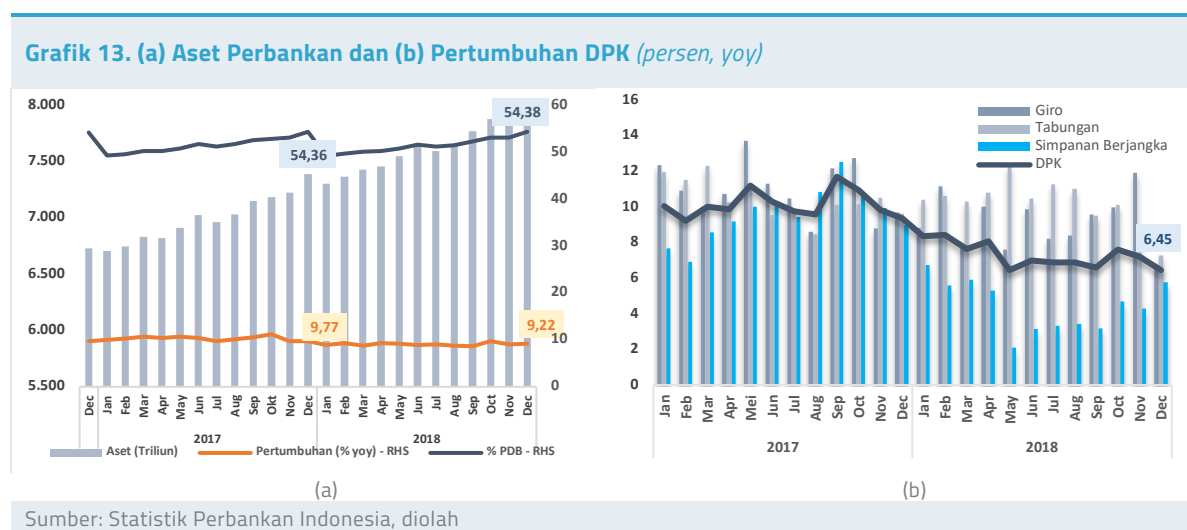
Di tengah gejolak perekonomian global serta volatilitas yang terjadi di pasar keuangan domestik sepanjang tahun 2018, kondisi perbankan Indonesia masih terjaga berkat dukungan permodalan yang kuat dan pertumbuhan aset yang stabil sehingga berhasil mencatatkan kinerja intermediasi positif yang ditandai oleh pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai *double digit*. Risiko kredit terpantau menurun meskipun dari sisi likuiditas sedikit mengalami pengetatan seiring tren melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di sepanjang tahun 2018.

Aset dan sumber dana

Aset perbankan tumbuh sedikit melambat di tahun 2018 yang terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK. Pada akhir tahun 2018, aset perbankan mencapai Rp8.068,3 triliun atau tumbuh 9,21 persen (yoy) yang merupakan level terendah sejak 2016. Pertumbuhan aset yang sedikit melambat tersebut menyebabkan rasio aset perbankan terhadap PDB stagnan di kisaran 54 persen dalam tiga tahun terakhir meskipun apabila dibandingkan dengan posisi tahun 2012 terdapat kenaikan sekitar 5 *percentage point* (pp). Secara komposisi, porsi aset atau pangsa pasar tertinggi dimiliki oleh Bank Persero yaitu sebesar 41,4 persen, diikuti oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa sebesar 38,8 persen dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan porsi 8,1 persen. Sementara itu, porsi aset pada kelompok Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Bank Campuran dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) secara berturut-turut sebesar 5,6 persen, 4,8 persen, dan 1,3 persen. Secara umum, semua kelompok bank mencatatkan pertumbuhan aset yang melambat pada tahun 2018 kecuali kelompok bank asing yang berbalik tumbuh hingga 9,8 persen, dari tahun sebelumnya yang berkontraksi hingga 12,2 persen, sementara aset kelompok bank campuran tumbuh hingga 17,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang 3,9 persen.

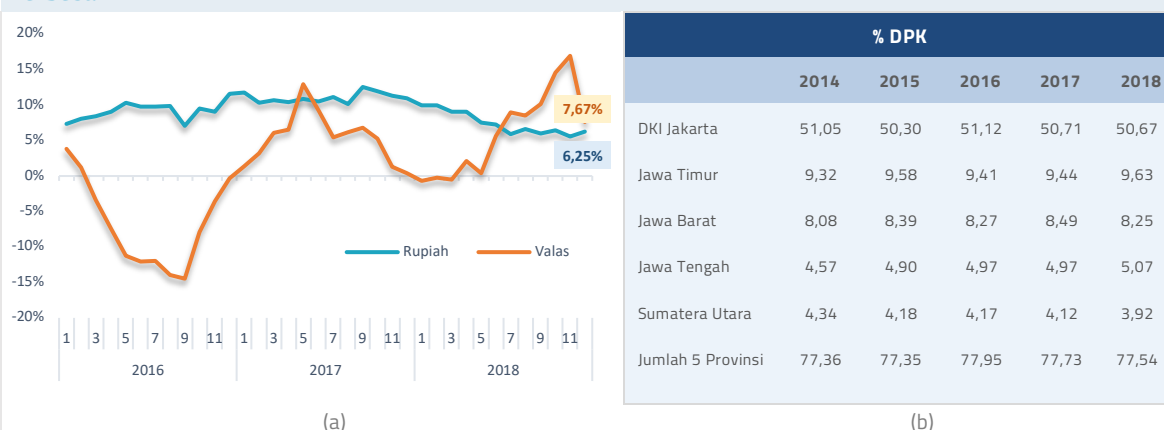
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun 2018 cenderung melambat jika dibandingkan dengan tahun 2017. DPK perbankan hingga Desember 2018 tercatat sebesar Rp5.630 triliun atau tumbuh 6,4 persen (yoy) dibandingkan Desember 2017. Pertumbuhan DPK terus menurun jika dibandingkan semester II 2017 dan semester I 2018 yang sebesar 9,4 persen dan 7,0 persen secara yoy. Sementara itu, DPK perbankan masih terkonsentrasi pada BUKU 3 dan BUKU 4 dengan *share* sebesar 86 persen kemudian disusul BUKU 2 sebesar 13 persen.

Perlambatan DPK selama tahun 2018 dipicu oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan suku bunga acuan BI yang terjadi sebanyak 6 kali selama 2018 sehingga turut mempengaruhi kenaikan imbal hasil instrumen investasi lainnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yield SBN seri *benchmark* tenor 10 tahun pada awal tahun berada di kisaran 6,47 persen, sementara pada akhir Desember naik menjadi 7,95 persen. Sementara itu, suku bunga rata-rata bank umum untuk tabungan dalam Rupiah justru turun dari 1,56 persen (Desember 2017) menjadi 1,31 persen (Desember 2018), sedangkan suku bunga rata-rata deposito Rupiah dengan tenor diatas 1 tahun turun dari 6,73 persen (Desember 17) menjadi 6,65 persen (Desember 2018). Hal ini menjadi kurang menarik bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan seperti asuransi dan dana pensiun untuk menyimpan dananya di bank dan berpotensi beralih ke instrumen SBN yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Selain itu, perlambatan DPK juga didorong oleh penerbitan surat utang oleh pemerintah dalam rangka membiayai infrastruktur.



Berdasarkan jenis simpanannya, DPK perbankan Indonesia sebagian besar merupakan simpanan berjangka dengan *share* 44 persen, kemudian tabungan sebesar 31 persen, dan giro 25 persen. Sementara berdasarkan valuta, per akhir tahun 2018, 90 persen DPK perbankan merupakan DPK Rupiah dan sisanya merupakan DPK valas. Sejak pertengahan tahun 2018, pertumbuhan DPK valas tercatat melebihi DPK rupiah meskipun pada akhir tahun pertumbuhan DPK valas menurun. DPK valas tumbuh sebesar 7,67 persen secara (yoy) pada Desember 2018, jauh lebih besar dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar 0,38 persen (yoy). Sementara itu, DPK rupiah hanya tumbuh sebesar 6,25 persen (yoy) pada November 2018, atau mengalami tren penurunan jika dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar 10,99 persen (yoy). Pertumbuhan DPK valas salah satunya disebabkan oleh peningkatan giro valas sebesar 34,31 persen ditengah meningkatnya suku bunga rata-rata bank umum atas giro valas dan melemahnya mata uang Rupiah.

Grafik 14. Pertumbuhan DPK Rupiah dan Valas (persen yoy) dan Tabel 7. Lima Provinsi dengan DPK Terbesar



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

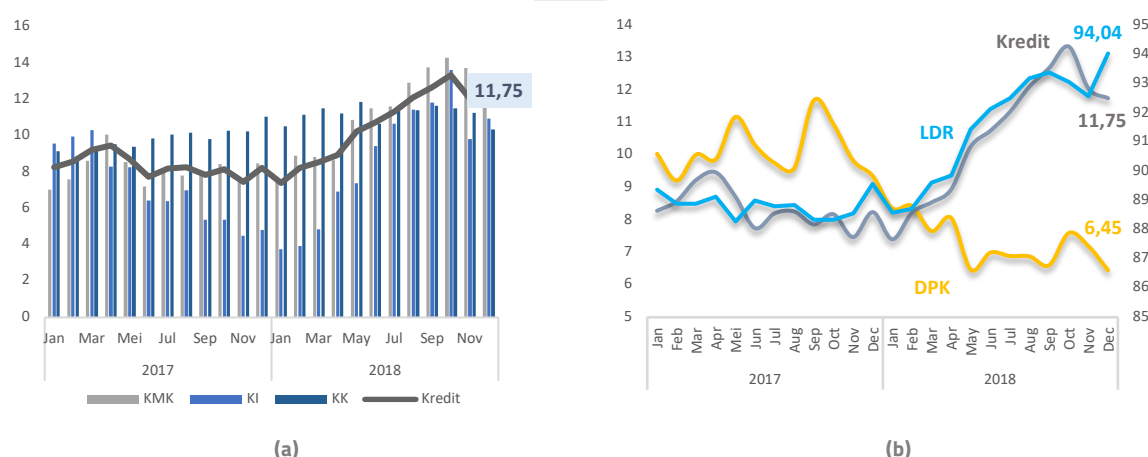
Secara spasial, jika dibandingkan dengan tahun 2017, perlambatan pertumbuhan DPK terjadi hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia dengan penurunan DPK tertinggi terjadi pada provinsi Aceh dan Gorontalo. Adapun penghimpunan DPK masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan pangsa 77,54 persen dari total DPK. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa aktivitas perekonomian nasional masih terpusat di 5 provinsi tersebut.

Penggunaan dana

Secara umum, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan menuju kkan tren penguatan sepanjang tahun 2018. Pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan kepada pihak ketiga bukan bank pada akhir tahun 2018 mencapai Rp5.294,9 triliun atau tumbuh sebesar 11,75 persen secara (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 8,24 persen maupun 2016 yang sebesar 7,87 persen. Harga komoditas yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi faktor penting dari menggeliatnya penyaluran kredit perbankan selain fokus Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Pada saat bersamaan, dua sektor terbesar untuk penyaluran kredit, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, juga memperoleh momentum di sepanjang tahun 2018, terutama industri pengolahan berbasis komoditas dan sektor perdagangan besar, terutama dari aktivitas ekspor dan impor. Tercatat, dengan porsi masing-masing sebesar 18,4 persen dan 17,0 persen dari total kredit, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,1 persen dan 10,2 persen. Selain itu, proses konsolidasi dan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan sejak 2016–2017 turut mendorong perbankan untuk memperkuat penyaluran kredit pada tahun 2018. Langkah ini ditempuh perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah dan memangkas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Terakhir, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang mencapai Rp120 triliun atau tumbuh hingga 24,1 persen dibanding realisasi tahun 2017 juga menjadi salah satu faktor penting dari kuatnya pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2018.

Grafik 15. (a) Pertumbuhan Kredit Perbankan (persen, yoy) dan

(b) Pertumbuhan DPK dan Kredit (persen, yoy)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Berdasarkan valuta, pertumbuhan kredit rupiah pada tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 11,12 persen, lebih tinggi dibanding 8,25 persen pada tahun 2017 maupun 9,16 persen pada 2016. Secara nominal, kredit Rupiah pada akhir tahun 2018 Rp4.494,4 triliun. Sementara itu, kredit valas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya tumbuh 8,22 persen pada tahun 2017 menjadi 15,47 persen dengan nominal mencapai Rp800,5 triliun. Selain didorong pelemahan Rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam tahun 2018, pertumbuhan kredit dalam valas juga didorong oleh aktivitas perdagangan yang kuat serta harga komoditas yang lebih tinggi meskipun pada triwulan IV harga komoditas berbalik melemah. Sepanjang tahun 2018, ekspor mencapai USD180,06 miliar atau tumbuh 6,65 persen dibanding 2017 sementara impor mencapai USD188,63 miliar atau tumbuh 21,90 persen.

Berdasarkan jenis penggunaannya, keseluruhan jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dibanding tahun 2017. Porsi penyaluran kredit terbesar masih diberikan untuk KMK, KK, dan KI dengan porsi terhadap total kredit masing-masing sebesar 47,45 persen, 27,83 persen, dan 24,72 persen. KMK hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp2.512,48 triliun atau tumbuh 13 persen, jauh lebih tinggi dibanding pada 2017 dan 2016. Apabila dilihat berdasarkan sektor yang diberikan KMK, dua sektor dengan porsi kumulatif lebih dari 60 disalurkan oleh perbankan, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, masih konsisten menjadi motor pendorong pertumbuhan. Sepanjang tahun 2018, KMK yang disalurkan untuk sektor industri pengolahan tumbuh hingga 14,91 persen sedangkan untuk sektor perdagangan tumbuh 10,92 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun.

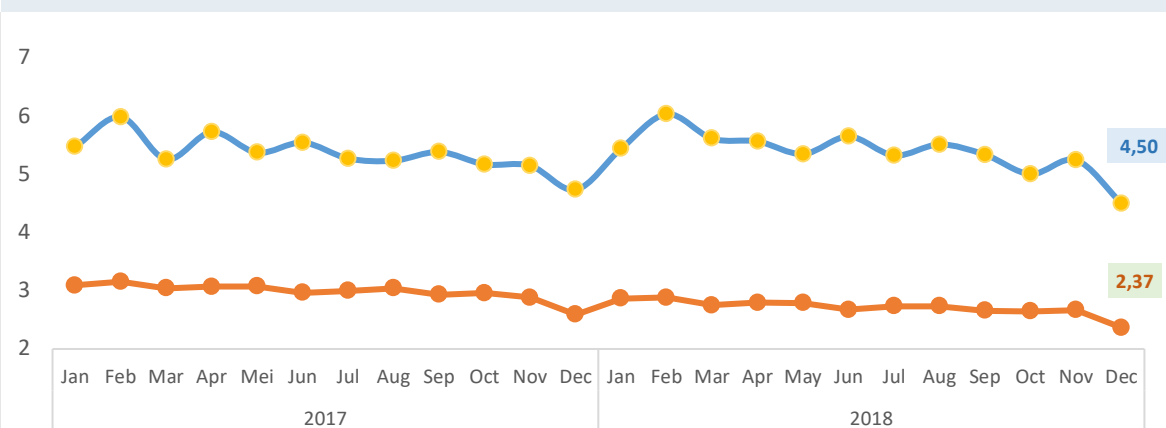
Di sisi lain, pertumbuhan KK sepanjang tahun 2018 mencapai 10,35 persen dengan nominal mencapai Rp1.473,66 triliun terutama didukung oleh kuatnya pertumbuhan kredit multiguna, kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) dan kredit kendaraan bermotor yang masing-masing tumbuh 11,92 persen, 13,31 persen dan 12,78 persen. Pertumbuhan kredit multiguna yang kuat merupakan gambaran kuatnya pengeluaran dan konsumsi rumah tangga,

sementara untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor merupakan dampak dari kebijakan pelonggaran *Loan to Value* (LTV) untuk kredit *proper* serta uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Mulai tanggal 1 Agustus 2018, Bank Indonesia membebaskan rasio LTV semua tipe rumah pertama dan rasio LTV 80–90 persen untuk rumah kedua dan seterusnya serta uang muka paling sedikit 20 persen untuk kredit kendaraan bermotor. Sementara itu, KI yang disalurkan perbankan mencapai Rp1.308,7 triliun atau tumbuh sebesar 10,93 persen sepanjang tahun 2018, jauh lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan yang sebesar 4,82 persen pada tahun 2017. Kuatnya pertumbuhan kredit investasi terutama didorong oleh penyaluran kredit pada sektor-sektor utama seperti pertanian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, dan perdagangan. Komitmen Pemerintah untuk meneruskan pembangunan infrastruktur mendorong penyaluran kredit perbankan yang besar untuk sektor konstruksi dan pengadaan listrik dan gas sehingga masing-masing tumbuh 52,38 persen dan 15,38 persen. Kredit investasi untuk sektor pertanian tumbuh hingga 9,20 persen seiring tingginya investasi untuk perluasan perkebunan, sarana pertanian, dan distribusi produk. Sementara kredit investasi untuk sektor perdagangan tercatat tumbuh 6,38 persen, jauh lebih tinggi dibanding 2017 yang tumbuh 1,75 persen terutama didukung oleh kuatnya kredit untuk perdagangan besar dan eceran.

Risiko Kredit Perbankan

Seiring dengan menguatnya pertumbuhan kredit di tengah volatilitas di pasar keuangan domestik, profil risiko kredit perbankan tetap terkendali tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang turun di akhir tahun 2018. NPL *gross* pada Desember 2018 tercatat sebesar 2,37 persen, membaik jika dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar 2,59 persen. Penurunan NPL pada tahun 2018 terutama sebagai hasil dari proses konsolidasi dan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh perbankan sejak tahun 2016.

Grafik 16. Perkembangan Risiko Kredit Perbankan (persen)

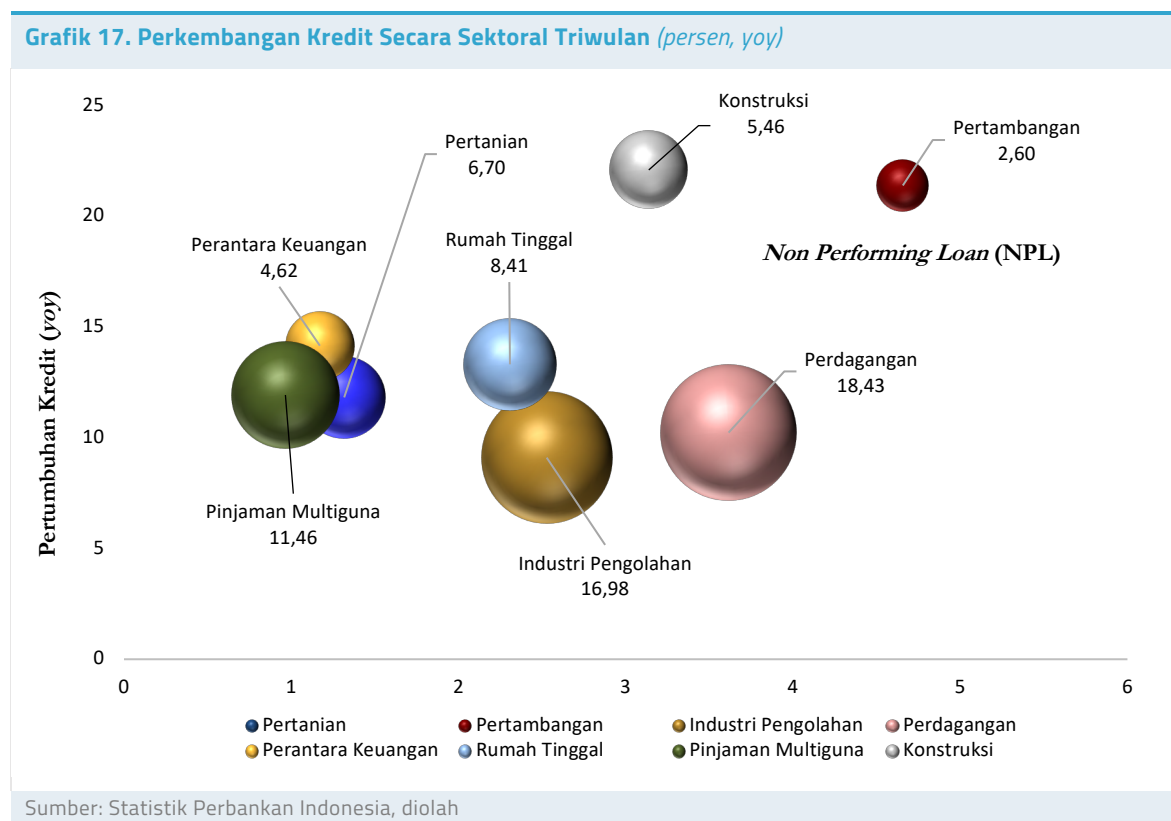


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Berdasarkan sektor ekonomi, penyumbang terbesar penurunan NPL perbankan pada tahun 2018 adalah sektor perdagangan dan pertambangan dengan penurunan nominal NPL masing-

masing sebesar Rp798 miliar (2,21 persen) dan Rp597 miliar (8,50 persen). Adapun persentase NPL untuk kedua sektor tersebut masing sebesar 3,62 persen dan 4,66 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang masing-masing sebesar 4,08 persen dan 6,18 persen. Membaiknya NPL sektor pertambangan tidak lepas dari terus membaiknya harga komoditas, terutama batubara dan minyak bumi selama tahun 2018 dan peningkatan kredit di sektor pertambangan sebesar 21,38 persen (yoy) pada Desember 2018. Sementara itu, NPL sektor perdagangan membaik khususnya dari sektor perdagangan ritel seiring dengan meningkatnya permintaan kredit.

Indikator risiko kredit lainnya yaitu *Special Mention Loan (SML)* atau kredit dalam pengawasan khusus juga harus tetap diwaspadai mengingat penanganan yang kurang tepat akan mendorong kredit pada kategori ini untuk menjadi NPL. Pada Desember 2018, SML perbankan turun menjadi 4,50 persen dari total kredit dibandingkan Desember 2017 sebelumnya sebesar 4,74 persen. Secara nominal, SML tumbuh 6,15 persen sampai dengan akhir Desember 2018, masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit yang sebesar 11,75 persen. Perkembangan SML hingga akhir tahun 2018 mencerminkan terjadinya peningkatan kualitas kredit perbankan seiring menurunnya risiko.



Kinerja Perbankan

Secara umum, kinerja perbankan Indonesia selama tahun 2018 tetap terjaga dengan didukung oleh tingginya rasio permodalan perbankan, fungsi intermediasi yang positif, dan kinerja perbankan yang semakin efisien. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* perbankan pada

Desember 2018 mencapai 22,9 persen. Angka ini masih berada jauh diatas ketentuan minimum dan telah memenuhi standar permodalan Basel III yang mencakup *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge* untuk bank yang tergolong sistemik. Secara komposisi, permodalan bank masih didominasi oleh modal inti (Tier 1) dengan pangsa yang stabil di kisaran 92 persen sementara rasio modal inti terhadap ATMR tercatat sebesar 21,29 persen pada tahun 2018.

Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan masih positif dengan pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK, sehingga mendorong *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank umum konvensional bulan Desember 2018 naik ke 94,78 dari 90,04 persen pada Desember 2017. Meskipun demikian, rasio kredit bermasalah menurut laporan Bank Indonesia, rasio likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio AL/DPK masih berada dalam batas aman yaitu sebesar 19,3 persen. Likuiditas akhir tahun 2018 cenderung menurun sejalan dengan pola musiman di akhir tahun karena meningkatnya permintaan likuiditas (peningkatan uang kartal dan kredit akhir tahun).

Tabel 8. Rangkuman Kinerja Perbankan (Bank Umum Konvensional)

Indikator Umum	Satuan	2016	2017	2018			
		Des	Dec	Mar	Jun	Sep	Dec
Aset	(T Rp)	6.730	7.387	7.430	7.651	7.769	8.068
DPK	(T Rp)	4.837	5.289	5.293	5.399	5.482	5.630
DPK (yoy)	(%)	9,60	9,36	7,66	6,99	6,60	6,45
Kredit	(T Rp)	4.377	4.738	4.743	4.974	5.120	5.295
Kredit (yoy)	(%)	7,87	8,24	8,54	10,75	12,69	11,75
LDR	(%)	90,70	90,04	90,19	92,76	94,09	94,78
NPL	(%)	2,93	2,59	2,75	2,67	2,66	2,37
CAR	(%)	22,93	23,18	22,65	22,01	22,91	22,97
BOPO	(%)	82,22	78,64	78,76	79,46	79,13	77,86
NIM	(%)	5,63	5,32	5,07	5,11	5,14	5,14
ROA	(%)	2,23	2,45	2,55	2,43	2,50	2,55

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Dari sisi efisiensi perbankan, *Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) perbankan mengalami penurunan dari 78,64 persen di Desember 2017 menjadi 77,86 persen pada Desember 2018. Kinerja perbankan yang lebih efisien dan pertumbuhan kredit yang positif mendorong profitabilitas perbankan yang tercermin dari rasio *Return On Asset* (ROA) perbankan tumbuh lebih besar di akhir tahun 2018. Indikator ROA bulan Desember 2018 naik ke level 2,55 persen dari 2,45 persen di Desember 2017.

Boks 1. Belanja Modal BUMN

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan adalah melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Investasi adalah salah satu komponen penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penguatan investasi perlu terus dilakukan karena dengan investasi yang meningkat maka akses lapangan pekerjaan baru akan semakin terbuka, produktivitas masyarakat berpotensi semakin tinggi, dan pada gilirannya kondisi ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Produk Domestik Bruto (PDB), aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. Konsep PMTB sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu, erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap yang dilibatkan dalam proses produksi. Berdasarkan metode penghitungan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, ada beberapa komponen yang menjadi penopang dalam pembentukan PMTB di Indonesia, yaitu: (a) Sektor Bangunan, (b) Mesin dan Perlengkapan, (c) Kendaraan, (d) Peralatan Lainnya, (e) *Cultivated Biological Resources* (CBR), dan (f) Produk Kekayaan Intelektual.

Perkembangan investasi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini menunjukkan tren yang meningkat, namun tidak terlalu signifikan. PMTB tahun 2018 masih mampu tumbuh sebesar 6,01 persen meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Perlambatan ini terkait dengan penurunan pertumbuhan pada komponen PMTB terutama mesin dan perlengkapan, bangunan dan peralatan lainnya.

Kegiatan investasi ini dilakukan oleh beberapa pihak seperti, yakni: (a) sektor swasta; (b) pemerintah baik pusat maupun daerah melalui belanja modal; (c) investor asing, melalui Penanaman Modal Asing (PMA); (d) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan (f) Perusahaan Publik (Non-BUMN). Dengan porsi sebesar 10,5 persen dari total kebutuhan investasi selama 2018, BUMN merupakan pihak kedua terbesar yang melakukan kegiatan investasi setelah sektor swasta. Dengan mempertimbangkan BUMN sebagai *agent of development*, maka Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian PMN kepada BUMN, dalam rangka meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan antara lain melalui penugasan pada proyek strategis nasional (PSN).

Data *capital expenditure* (capex) konsolidasi dari investasi BUMN dan anak-anak usahanya, menunjukkan bahwa kinerja capex BUMN selama periode 2014-2017 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi investasi BUMN hanya 79 persen dari target di tahun 2014 menjadi 69 persen di tahun 2017. Dalam rentang waktu tersebut, rata-rata realisasi investasi BUMN hanya mencapai 76 persen dari perencanaan. Investasi BUMN ini didominasi oleh realisasi proyek PSN. Berdasarkan pendekatan bottom-up, investasi BUMN di tahun 2019 diperkirakan akan menurun sekitar 31 persen dari investasi di tahun 2018, dikarenakan BUMN – BUMN akan fokus pada penyelesaian PSN yang memasuki tahun akhir di 2019. Beberapa hambatan yang paling banyak dihadapi BUMN dalam proses investasi merupakan masalah administrasi diantaranya: (i) proses perizinan, (ii) proses lelang, (iii) akuisisi lahan, dan (iv) ketidakjelasan skema pendanaan suatu proyek.

Terkait akuisisi lahan yang sangat penting bagi infrastruktur jalan dan irigasi, perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Proses pembebasan lahan di Indonesia biasanya memakan waktu lebih dari 12 bulan, sementara dokumen perencanaan/pengadaan hanya mengalokasikan periode 6–12 bulan, sehingga terdapat *gap* antara perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, dua faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan dalam proses pembebasan lahan adalah (a) perselisihan harga kompensasi dan (b) kepemilikan yang tidak jelas/status hukum tentunya sangat mempengaruhi kinerja BUMN.

Faktor eksternal secara total menyumbang 73 persen keterlambatan penyelesaian PSN termasuk adanya kendala pembiayaan, terjadi ketika proyek tidak sepenuhnya didanai. Hal ini mengurangi minat pihak eksternal dalam memberikan pinjaman. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian PSN lainnya adalah peraturan berkaitan dengan izin, lisensi, persetujuan, aplikasi, penerbitan dukungan Pemerintah, dan hubungan dengan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk dukungan pembiayaan antara lain *Viability Gap Fund (VGF)*, *Project Development Fund (PDF)*, dan *Availability Payment (AP)*. Terdapat juga faktor-faktor lain yang masih menjadi permasalahan, antara lain dalam hal perencanaan, *Standard Operating Procedure (SOP)* dan target investasi yang tidak fleksibel.

Untuk memahami ketidakjelasan skema pendanaan suatu proyek terdapat dua indikator yang dapat digunakan yaitu (a) *Debt to Equity Ratio (DER)* dan (b) *Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)*. DER menunjukkan porsi relatif dari *leverage* (utang) dibandingkan dengan ekuitasnya dimanfaatkan dalam bisnis. Dalam kebanyakan kasus, biaya utang lebih rendah daripada biaya ekuitas dan karenanya memanfaatkan lebih banyak utang lebih dipilih daripada menurunkan biaya modal. Meskipun demikian, memanfaatkan lebih banyak utang meningkatkan risiko perusahaan karena perusahaan harus memenuhi kewajiban utangnya sebelum membagikan laba kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan asumsi berikut:

- DER rendah ($DER < 1,00x$) menyatakan bahwa perusahaan memanfaatkan biaya modal terlalu tinggi namun menggunakan utang yang lebih kecil,
- DER menengah ($1,00 < DER < 2,25x$) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai utang yang cukup,
- DER tinggi ($DER > 2,25x$) menyatakan bahwa perusahaan sangat berisiko karena mengandalkan utang yang terlalu besar.

DSCR dihitung dengan membagi *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan kewajiban utang saat ini (pokok dan bunga jatuh tempo) dalam waktu kurang dari satu tahun. DSCR menunjukkan bagaimana perusahaan dinyatakan sehat (*solvent*) untuk memenuhi kewajiban utangnya saat ini melalui operasi regulernya. Semakin tinggi rasionya semakin baik. DSCR lebih rendah dari 1 menyiratkan bahwa perusahaan memiliki peluang lebih tinggi untuk gagal bayar karena tidak dapat membayar kewajiban utangnya saat ini dari operasinya. Minimal, perusahaan lebih disukai memiliki DSCR 1,4x atau lebih tinggi. DSCR 1,4x menyiratkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban utang saat ini (*solvabilitas*) dan dapat mengejar pembiayaan lain setelah 12 bulan. Dalam menilai *solvabilitas*, DER dan DSCR saling terkait. Meskipun memiliki DER yang rendah, sebuah perusahaan dianggap memiliki masalah *solvabilitas* ketika DSCR-nya rendah dan sebaliknya. Pada tingkat ini, perusahaan seperti itu akan sulit untuk memperoleh pembiayaan utang luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 BUMN, beberapa BUMN khususnya di bidang konstruksi dinilai memiliki masalah pembiayaan karena memiliki angka DSCR yang rendah walaupun memiliki angka DER yang rendah. Ada juga BUMN khususnya yang bergerak di bidang pelabuhan laut, walaupun memiliki angka DER diatas 1, tetapi masih memiliki ruang untuk pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, pembiayaan bukanlah merupakan kendala utama bagi mereka. Sedangkan BUMN seperti Pertamina, Telkom, Angkasa Pura II, serta PGN dinilai tidak memiliki kendala pembiayaan yang mendesak.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi BUMN dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama melalui PSN, perlu dilakukan beberapa kebijakan jangka pendek, antara lain dengan memperbaiki *pipeline* perencanaan proyek untuk memangkas waktu penyelesaian proses administrasi. Perlu juga memberikan skema pendanaan proyek yang lebih jelas sebelum proyek ditawarkan kepada BUMN maupun sektor swasta. Selain itu, perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur baik dalam pembiayaan maupun operasi melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau KPBU. Terkait akuisisi lahan yang sangat penting bagi infrastruktur jalan dan irigasi, perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik.

BAGIAN II

ANALISIS KINERJA APBN & KEBIJAKAN FISKAL



A. ANALISIS KINERJA APBN 2018

Pemerintah senantiasa menjaga peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih optimal. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh antara lain dengan tetap melakukan optimalisasi pendapatan negara terutama dari sisi perpajakan dan PNBPN dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa meningkatkan kualitas belanja secara lebih produktif yang didukung dengan keberlanjutan efisiensi belanja nonprioritas, serta mendorong pengembangan pembiayaan yang efisien dan inovatif dalam mengakselerasi pembangunan.

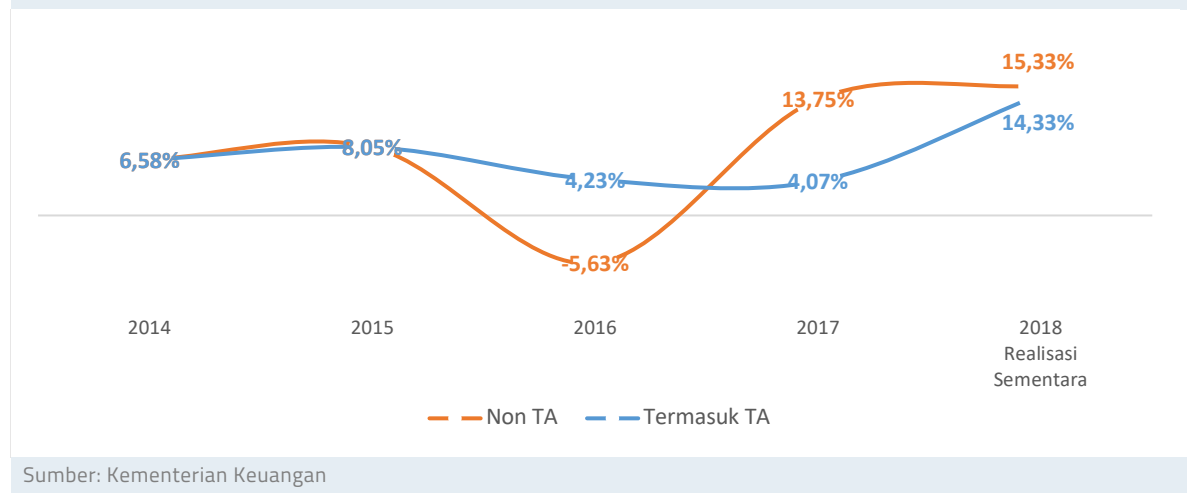
Meskipun di tengah tantangan perekonomian baik global maupun domestik, kinerja APBN menunjukkan capaian yang sangat optimal dan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, membaiknya kinerja APBN tahun 2018 dapat dilihat baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 realisasi pendapatan negara melampaui target, yaitu mencapai 102,5 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara juga mencapai 99,2 persen dari APBN yang merupakan penyerapan tertinggi selama lima tahun terakhir. Kinerja realisasi APBN tahun 2018 yang optimal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan APBN yang lebih prudent, kredibel serta berkesinambungan. Diharapkan, reformasi APBN yang terus dilakukan bersamaan dengan reformasi ekonomi lainnya dapat terus mendukung dalam akselerasi penciptaan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

Tabel 9. Kinerja APBN 2017 dan 2018 (triliun Rupiah)									
Uraian (Rp Triliun)	2017				2018				
	APBN-P	LKPP	% thd APBN-P	growth (%)	APBN	Realisasi Sementara	% thd APBN	growth (%)	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,1	1.666,4	96,0	7,1	1.894,7	1.942,4	102,5	16,6	
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.733,0	1.654,7	95,5	7,0	1.893,5	1.928,5	101,8	16,5	
1. Penerimaan Perpajakan	1.472,7	1.343,5	91,2	4,6	1.618,1	1.521,4	94,0	13,2	
2. PNBPN	260,2	311,2	119,6	18,8	275,4	407,1	147,8	30,8	
II. Hibah	3,1	11,6	374,2	29,4	1,2	13,9	1.161,4	19,5	
B. Belanja Negara	2.133,3	2.007,4	94,1	7,7	2.220,7	2.202,2	99,2	9,7	
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.367,0	1.265,4	92,6	9,6	1.454,5	1.444,4	99,3	14,2	
A. Belanja K/L	798,6	765,1	95,8	11,8	847,4	836,2	98,7	9,3	
B. Belanja Non K/L	568,4	500,2	88,0	6,5	607,1	608,2	100,2	21,6	
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,3	742,0	96,8	4,5	766,2	757,8	98,9	2,1	
1. Transfer Ke Daerah	706,3	682,2	96,6	2,8	706,2	697,9	98,8	2,3	
2. Dana Desa	60,0	59,8	99,6	28,0	60,0	59,9	99,8	0,2	
C. Keseimbangan Primer	(178,0)	(124,4)	69,9	(0,9)	(87,3)	(1,8)	2,1	(98,6)	
% keseimbangan primer thd PDB		(0,92)			(0,59)	(0,01)			
D. Surplus/Defisit Anggaran	(397,2)	(341,0)	85,8	10,6	(325,9)	(259,8)	79,7	(23,8)	
% defisit thd PDB	(2,92)	(2,51)			(2,19)	(1,76)			
E. Pembiayaan	397,2	366,6	92,3	9,6	325,9	300,4	92,2	(18,1)	
I. Pembiayaan Utang	461,34	429,08	93,0		399,22	366,70	91,9	(14,5)	
1. Surat Berharga Negara (neto)	467,31	441,83	94,5		467,31	358,40	76,7	(18,9)	
2. Pinjaman (neto)	(5,97)	(12,74)	213,4		(5,97)	8,30	(139,0)	(165,1)	
II. Pembiayaan Investasi	(59,73)	(59,75)	100,0		(65,65)	(61,10)	93,1	2,3	
III. Pemberian Pinjaman	(3,67)	(2,05)	55,9		(6,69)	(4,30)	64,3	109,5	
IV. Kewajiban Perjanjian	(1,01)	(1,01)	100,0		(1,12)	(1,10)	98,1	0,0	
V. Pembiayaan Lainnya	0,30	0,36	119,7		0,18	0,20	109,3	(44,3)	
Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan		25,6				40,5			

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau tumbuh 16,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 7,1 persen. Peningkatan kinerja Pendapatan Negara di tahun 2018 tersebut ditopang dengan membaiknya kinerja realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.521,4 triliun (tumbuh 13,2 persen) dan realisasi PNBPN sebesar Rp407,1 triliun (tumbuh 30,8 persen). Membaiknya kinerja Pendapatan Negara tahun 2018 dapat mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian domestik sudah bergerak ke arah yang lebih baik, yang antara lain didorong dengan tetap terjaganya daya beli dan konsumsi domestik, peningkatan layanan publik, serta peningkatan laju aktivitas perdagangan internasional.

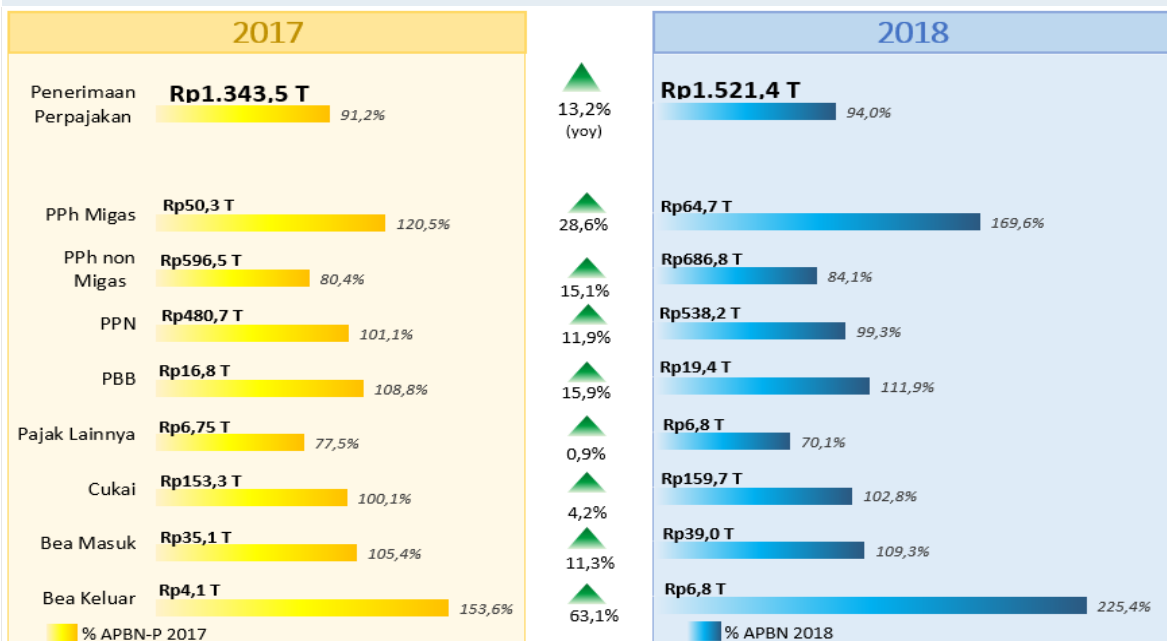
Grafik 18. Pertumbuhan Penerimaan Pajak (persen, yoy)



Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 tumbuh sebesar 13,2 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2018 utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp1.315,9 triliun atau tumbuh 14,3 persen (15,3 persen di luar *tax amnesty*). Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Positifnya kinerja penerimaan pajak juga tercermin dari pertumbuhan realisasi tahun 2018 yang lebih besar dari pertumbuhan tahun lalu (4,07 persen, yoy). Berkat pertumbuhan pajak yang cukup menggembirakan tersebut, maka *tax ratio* di tahun 2018 meningkat menjadi 11,5 persen dari sebelumnya hanya sebesar 10,7 persen di tahun 2017.

Kinerja penerimaan pajak tahun 2018 yang cukup menggembirakan tersebut berasal dari kinerja jenis-jenis pajak utama, seperti PPh nonmigas yang tumbuh 15,1 persen. Peningkatan kinerja penerimaan pajak tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi terutama yang bersumber dari kegiatan konsumsi dan perdagangan internasional serta keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mendorong optimalisasi pemungutan perpajakan. Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir yang hanya sebesar 5,9 persen. Adapun pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2018 antara lain didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan internasional serta keberhasilan reformasi kepabeanan dan cukai.

Grafik 19. Kinerja Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi PNPB hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp407,1 triliun atau 147,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi PNPB tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh 30,8 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan PNPB tahun sebelumnya yang hanya sebesar 18,8 persen. Peningkatan kinerja PNPB tahun 2018 terutama didorong oleh tingginya kinerja penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas) yang mencapai Rp143,3 triliun atau sekitar 174,7 persen dari target APBN 2018. Realisasi penerimaan SDA migas tahun 2018 tumbuh 75,1 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih tingginya rata-rata realisasi ICP tahun 2018 (USD67,47 per barel), dibandingkan dengan rata-rata realisasi ICP tahun 2017 (USD51 per barel). Adanya kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) juga turut mendorong peningkatan kinerja penerimaan SDA nonmigas yang mencapai Rp37,8 triliun atau tumbuh 29,1 persen dari tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja PNPB juga tidak terlepas dari adanya perbaikan kinerja BUMN serta peningkatan layanan publik yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Secara umum, pelaksanaan Belanja Negara di tahun 2018 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan kualitas belanja negara di tahun 2018 antara lain tercermin dari perbaikan pola dan tingkat penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara tahun 2018 tercatat sebesar Rp2.202,2 triliun atau sekitar 99,2 persen dari pagu APBN 2018, secara nominal mengalami pertumbuhan 9,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun realisasi Belanja Negara tahun 2018 tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.444,4 triliun (tumbuh 14,2 persen) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757,8 triliun (tumbuh sebesar 2,1 persen). Membaiknya kinerja Belanja Negara

tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pengelolaan belanja negara yang lebih berkualitas.

Tabel 10. Kinerja Realisasi PNPB (triliun Rupiah)							
	2017			2018			
	APBN-P	LKPP	% thd APBN-P	APBN	Realisasi Sementara	% thd APBN	growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	260,2	311,2	119,6	275,4	407,1	147,8	30,8
a. Penerimaan SDA	95,6	111,1	116,2	103,7	181,1	174,7	63,0
i. Migas	72,2	81,8	113,3	80,3	143,3	178,3	75,1
ii. Non Migas	23,4	29,3	125,0	23,3	37,8	162,0	29,1
b. Bagian Laba BUMN	41,0	43,9	107,1	44,7	45,1	100,9	2,7
c. PNPB Lainnya	85,1	108,8	128,0	83,8	127,2	151,9	16,9
d. Pendapatan BLU	38,5	47,3	122,8	43,3	53,7	123,9	13,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 menunjukkan kinerja yang lebih optimal dari tahun-tahun sebelumnya baik dari tingkat penyerapan maupun pertumbuhannya. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 mencapai Rp1.444,4 triliun atau sekitar 99,2 persen dari pagu APBN 2018, yang meliputi realisasi belanja K/L sebesar Rp836,2 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp608,2 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 tumbuh sebesar 14,1 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2017 yang hanya sebesar 9,6 persen. Lebih tingginya kinerja Belanja Pemerintah Pusat di tahun 2018 dipengaruhi oleh tingginya penyerapan sebagian besar komponen Belanja Pemerintah Pusat. Tingginya penyerapan tersebut antara lain dipengaruhi dengan tidak adanya perubahan atas APBN sehingga pemerintah lebih fokus dalam melaksanakan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Membaiknya kinerja Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh bantuan sosial yang tumbuh cukup tinggi. Adapun realisasi bantuan sosial mencapai Rp103,2 triliun atau tumbuh 51,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja bantuan sosial tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah yang senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah tekanan perekonomian global yang masih *volatile*. Pemerintah senantiasa melakukan perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari belanja bantuan sosial. Adapun beberapa *output* nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari membaiknya kinerja dan bantuan sosial tahun 2018 antara lain berupa penyaluran:

- Kartu Indonesia Pintar untuk 19,8 juta siswa,
- Bantuan Operasional Sekolah bagi 8,7 juta siswa,
- Bidik Misi kepada 392,0 ribu mahasiswa,
- Kartu Indonesia Sehat kepada 92,3 juta jiwa penerima bantuan iuran,

- e. Program Keluarga Harapan bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat, dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk 15,2 juta keluarga.

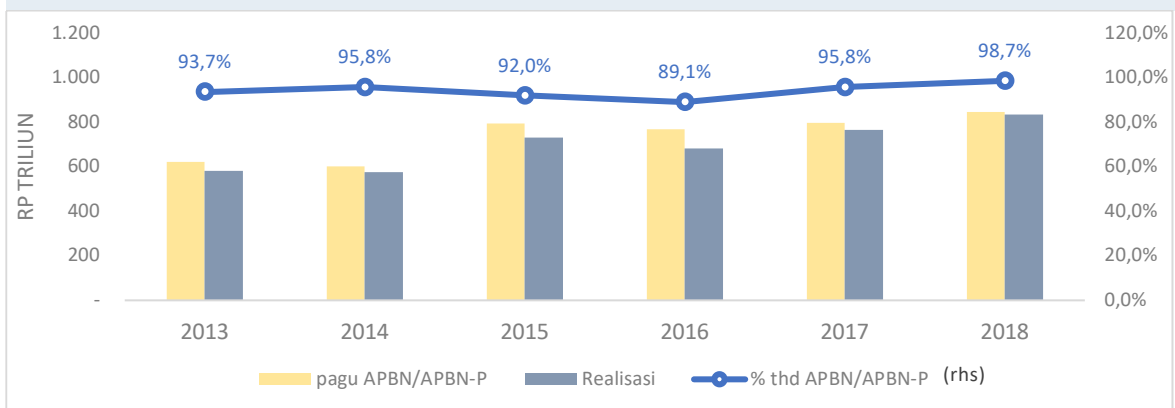
Tabel 11. Kinerja Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)

	2017		2018		growth (%)
	LKPP	% thd APBN-P	APBN	Real Sementara	
Belanja Pemerintah Pusat	1.265,4	92,6	1.454,5	1.444,4	14,2
1. Belanja Pegawai	312,7	91,0	365,7	346,7	10,9
2. Belanja Barang	291,5	98,4	340,1	337,0	15,6
3. Belanja Modal	208,7	92,9	203,9	184,9	(11,4)
4. Pembayaran Bunga Utang	216,6	98,8	238,6	258,1	19,2
5. Subsidi	166,4	98,5	156,2	216,8	30,3
6. Belanja Hibah	5,4	98,4	1,5	1,5	(71,9)
7. Bantuan Sosial	55,3	93,8	81,3	83,9	51,7
8. Belanja Lain-lain	8,8	17,7	67,2	15,6	77,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja penyerapan Belanja K/L tahun 2018 yang mencapai Rp836,2 triliun atau 98,7 persen dari pagu APBN 2018, merupakan penyerapan tertinggi sejak tahun 2014. Capaian yang sangat menggembirakan tersebut antara lain terwujud karena adanya keputusan pemerintah yang tidak melakukan perubahan APBN 2018. Tidak adanya perubahan APBN tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam 15 tahun terakhir. Ditempuhnya kebijakan untuk tidak melakukan perubahan APBN tersebut terbukti efektif mendorong K/L melakukan pengelolaan anggaran secara lebih optimal di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengelolaan APBN yang dilakukan secara lebih *prudent*, kredibel, dan berkualitas.

Grafik 20. Perkembangan Kinerja Kementerian/Lembaga



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja K/L tahun 2018 menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah yang terus menempuh kebijakan yang dapat mendorong peningkatan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Lebih optimalnya belanja K/L tahun 2018 antara lain dipengaruhi kebijakan percepatan pengadaan barang dan jasa yang tetap dilanjutkan, percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan Bidik Misi, pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti pelaksanaan Pilkada serentak, Asian Games di Jakarta dan Palembang, Asian Para Games di Jakarta, dan IMF-WBG *annual meetings* di Bali. Selain itu, adanya beberapa kegiatan strategis tambahan yang memerlukan dukungan tambahan belanja juga turut mempengaruhi peningkatan realisasi belanja K/L tahun 2018. Adapun kegiatan strategis tambahan tersebut antara lain berupa penguatan reformasi birokrasi K/L, penambahan alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penerima manfaat baru, kegiatan penanganan bencana yang terjadi selama tahun 2018, serta keperluan strategis lainnya.

Di sisi lain, realisasi belanja non K/L tahun 2018 mencapai Rp608,2 triliun atau sekitar 100,2 persen dari pagu APBN tahun 2018, utamanya dipengaruhi tingginya belanja subsidi. Adapun realisasi belanja subsidi mencapai Rp216,8 triliun atau sekitar 138,8 persen dari pagu APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 30,3 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan belanja subsidi tersebut antara lain dipengaruhi adanya kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan tingkat inflasi dari risiko kenaikan harga minyak, pemerintah juga menempuh kebijakan penyesuaian subsidi solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter. Tentunya kebijakan penyesuaian subsidi solar tersebut berimplikasi terhadap peningkatan realisasi belanja subsidi, khususnya subsidi energi. Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menjaga *good governance* dan kinerja keuangan BUMN yang diberikan penugasan penyaluran subsidi, maka di tahun 2018 pemerintah juga melakukan pembayaran sebagian kurang bayar subsidi tahun sebelumnya. Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan belanja subsidi yang lebih tepat sasaran dengan tetap menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah konsisten untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan bantuan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan akurasi data penerima, simplifikasi mekanisme penyaluran, dan penguatan sinergi baik antar K/L maupun Pemerintah Pusat dengan Pemda. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,66 persen pada bulan September 2018 dari sebelumnya 11,13 persen di September 2015. Keberhasilan tingkat kemiskinan menjadi satu digit (*single digit*) di tahun 2018 tersebut menjadi catatan sejarah keberhasilan Pemerintah Indonesia.

Perbaikan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung desentralisasi fiskal serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Realisasi TKDD tahun 2018 mencapai Rp757,8 triliun atau sekitar 98,9 persen dari pagu APBN tahun 2018. Secara umum, hampir seluruh komponen TKDD di

tahun 2018 menunjukkan adanya tingkat penyerapan yang semakin baik dibandingkan tahun lalu. Membaiknya kinerja realisasi TKDD tahun 2018 antara lain didukung dengan adanya perbaikan mekanisme penyaluran yang dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* serta proses penyaluran yang relatif lebih cepat dibandingkan periode tahun sebelumnya.

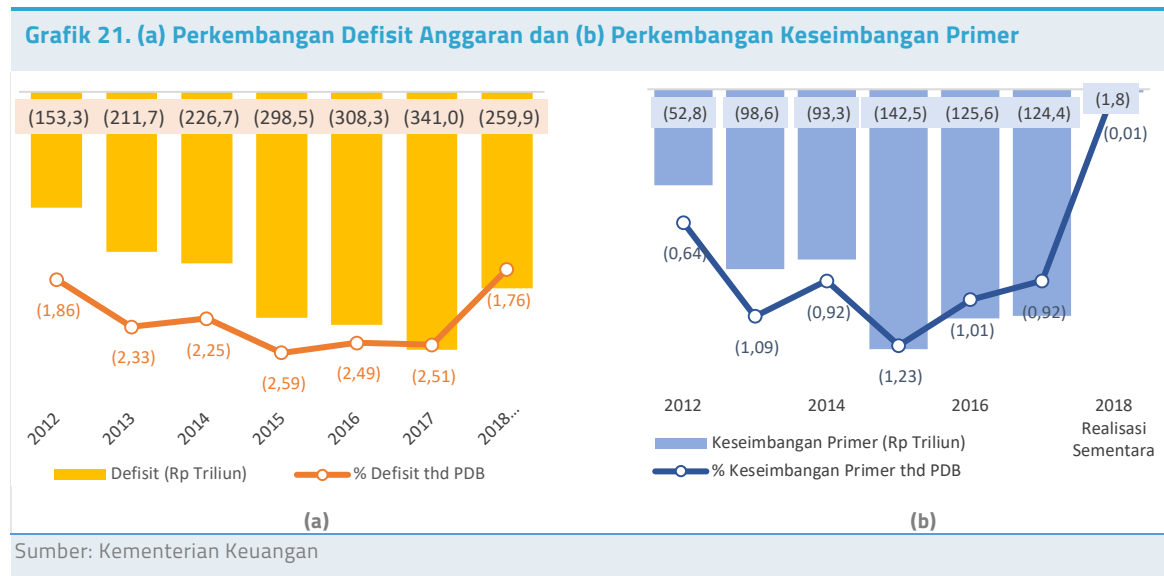
Tabel 12. Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun Rupiah)						
	2017		APBN	2018		growth (%)
	LKPP	% thd APBN-P		Real Sementara	% thd APBN	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	742,0	96,8	766,2	757,8	98,9	2,1
1 Transfer ke Daerah	682,2	96,6	706,2	697,9	98,8	2,3
a. Dana Perimbangan	654,5	96,4	676,6	668,6	98,8	2,2
i. Dana Transfer Umum	486,8	98,6	490,7	495,2	100,9	1,7
ii. Dana Transfer Khusus	167,7	90,8	185,9	173,4	93,3	3,4
b. Dana Insentif Daerah	7,5	100,0	8,5	8,2	96,8	9,3
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	20,2	100,0	21,1	21,1	100,0	4,2
2 Dana Desa	59,8	99,6	60,0	59,9	99,8	0,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Dana Perimbangan yang merupakan komponen terbesar dari TKDD mengalami pertumbuhan sebesar 2,2 persen, utamanya ditopang oleh pertumbuhan Dana Transfer Khusus (DTK) yang mencapai 3,4 persen dari tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan layanan yang terjadi antar daerah, pemerintah menerapkan *earmarking* dalam penggunaan DTK oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Adanya *earmarking* tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pola belanja di daerah dengan lebih mengutamakan perbaikan kualitas layanan publik. Sementara itu, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) meskipun secara persentase penyerapannya lebih rendah dari tahun lalu, tetapi masih tumbuh 9,3 persen dari tahun sebelumnya. Lebih rendahnya persentase penyerapan DID di tahun 2018 tersebut utamanya dipengaruhi adanya perbaikan mekanisme penyaluran di tahap II yang mensyaratkan pemda untuk juga menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TKDD.

Peningkatan kinerja Pendapatan Negara dan terjaganya kualitas realisasi Belanja Negara telah mengantarkan pada tingkat defisit APBN yang terjaga pada kisaran 1,76 persen PDB, atau lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2018 yakni 2,19 persen PDB. Realisasi rasio defisit di tahun 2018 tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2012. Sementara itu, kesinambungan fiskal juga ditandai dengan realisasi keseimbangan primer tahun 2018 yang menuju ke level positif, yaitu berada pada posisi negatif Rp1,8 triliun atau sekitar negatif 0,01 persen terhadap PDB. Realisasi negatif keseimbangan primer di tahun 2018 tersebut juga

merupakan yang terendah sejak tahun 2013, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.



Realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp300,4 triliun atau sekitar 9,2 persen dari target APBN 2018, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp366,6 triliun (92,3 persen dari APBN-P 2017). Realisasi Pembiayaan terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp366,7 triliun atau 91,9 persen dari target APBN 2018, yang meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp358,4 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp8,3 triliun. Realisasi pembiayaan utang tahun 2018 tumbuh negatif sebesar 14,5 persen dari realisasi tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan utang sepanjang tahun 2018 yang semakin membaik dibanding tahun sebelumnya. Dengan pengelolaan utang yang dilakukan secara pruden dan kredibel di tengah kondisi pasar 2018 yang *volatile*, pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap terkendali, yaitu berada di kisaran 29,98 persen terhadap PDB. Pembiayaan utang selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran, juga digunakan untuk mendukung pengelolaan portofolio utang yang efisien serta pengembangan pasar SBN. Pengembangan pasar SBN masih diperlukan mengingat pasar Indonesia yang masih sangat luas. Meningkatnya kesadaran generasi muda Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara merupakan momentum yang positif bagi pengembangan pasar SBN.

Selain untuk menutupi defisit APBN, kebijakan pembiayaan anggaran juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga keberlanjutan pendidikan. Hal ini ditempuh melalui kebijakan pembiayaan investasi pemerintah yang diberikan kepada BUMN, BLU, dan Lembaga/Badan lainnya seperti BP Tapera. Realisasi pembiayaan investasi pemerintah hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp61,1 triliun, yang antara lain meliputi pemberian PMN kepada PT KAI sebesar Rp3,6 triliun dan BP Tapera sebesar Rp2,9 triliun, penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp5,5 triliun, dan dukungan pendanaan LMAN sebesar Rp31,2 triliun. Sebagai bagian dari pembiayaan investasi tahun 2018, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp15,0 triliun untuk Dana

Pengembangan Pendidikan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan terciptanya keberlanjutan pendidikan bagi generasi masa mendatang.

B. PERKEMBANGAN REALISASI APBN 2019

APBN 2019 merupakan instrumen fiskal tahunan yang terakhir dari dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019). Melalui APBN 2019, pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut maka tema kebijakan fiskal yang diangkat dalam APBN 2019 adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing”. Berkenaan dengan tema tersebut, maka pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu menjaga kesehatan fiskal serta mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan antara lain dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, serta mampu mengendalikan risiko. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor antara lain akan dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Secara umum, kebijakan fiskal yang ditempuh dalam APBN tahun 2019 diarahkan pada kebijakan yang ekspansif terarah dan terukur dalam mewujudkan tercapainya target pembangunan tahun 2019. Adapun target pembangunan yang hendak dicapai di tahun 2019 antara lain adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan pada level yang cukup tinggi 5,4 hingga 5,8 persen, yang diikuti perluasan kesempatan kerja dengan mendorong pengurangan tingkat pengangguran pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen, pengentasan kemiskinan pada kisaran 8,5 hingga 9,5 persen, pengurangan kesenjangan yang terefleksi pada indeks Rasio Gini pada kisaran 0,38 hingga 0,39 serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi sebesar 71,98. Pengelolaan APBN 2019 juga diupayakan menjadi lebih produktif dan efisien dalam pengalokasian anggarannya, lebih handal dan berdaya tahan dalam mengantisipasi ketidakpastian serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat dengan risiko terkendali.

Pemerintah secara konsisten menempuh kebijakan yang dapat mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Peran penting APBN 2019 sebagai instrumen fiskal akan tetap dijaga agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka arah dan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah di tahun 2019 antara lain adalah (i) optimalisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha, (ii) meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung penguatan belanja berkualitas, (iii) mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dalam akselerasi pembangunan, (iv) memperkuat daya tahan fiskal dalam merespon dinamika perekonomian dan menjaga terlaksananya program prioritas, serta (iv) mengendalikan risiko untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manusia Indonesia yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan pemerintah di tahun 2019 antara lain akan difokuskan pada (i) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), (ii) peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (iii) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, (iv) pemanfaatan *demographic dividend* untuk mengantisipasi *aging population*, dan (v) peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan beberapa penguatan kebijakan dalam merespon isu-isu strategis di tahun 2019 antara lain berupa permasalahan *stunting*, kesetaraan *gender*, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko bencana (*disaster management*).

Pada awal tahun 2019 ini, realisasi APBN menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Hingga akhir Januari 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh sebesar 6,24 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2019 juga tumbuh sebesar 10,35 persen dari tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja yang cukup baik di sisi pendapatan dan belanja tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa kinerja APBN hingga akhir tahun 2019 akan melanjutkan catatan positif yang terjadi di tahun sebelumnya.

Tabel 13. Kinerja APBN bulan Januari 2019 (triliun Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	APBN	Real s.d 31 Jan	% thd APBN	APBN	Real s.d 31 Jan	% thd APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.894,7	101,7	5,4	2.165,1	108,1	5,0
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.893,5	101,7	5,4	2.164,7	108,1	5,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,1	82,6	5,1	1.786,4	89,8	5,0
2. PNPB	275,4	19,1	6,9	378,3	18,3	4,8
II. Hibah	1,2	0,1	6,0	0,4	(0,0)	(1,0)
B. Belanja Negara	2.220,7	139,4	6,3	2.461,1	153,8	6,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5	64,6	4,4	1.634,3	76,1	4,7
A. Belanja K/L	847,4	20,2	2,4	855,4	32,0	3,7
B. Belanja Non K/L	607,1	44,4	7,3	778,9	44,1	5,7
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,2	74,8	9,8	826,8	77,7	9,4
1. Transfer Ke Daerah	706,2	74,2	10,5	756,8	77,4	10,2
2. Dana Desa	60,0	0,6	1,0	70,0	0,3	0,5
C. Keseimbangan Primer	(87,3)	(14,2)	16,2	(20,1)	(22,8)	113,3
% keseimbangan primer thd PDB		(0,10)			(0,14)	
D. Surplus/ Defisit Anggaran	(325,9)	(37,7)	11,6	(296,0)	(45,8)	15,5
% defisit thd PDB	(2,39)	(0,26)		(1,84)	(0,28)	
E. Pembiayaan	325,9	27,6	8,5	296,0	122,5	41,4
I. Pembiayaan Utang	399,22	27,0	6,76	359,3	122,5	34,1
II. Pembiayaan Investasi	(65,65)	0,0	0,00	(75,9)	-	-
III. Pemberian Pinjaman	(6,69)	0,6	(8,94)	(2,4)	0,1	(2,5)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,12)	0,0	0,00	-	-	-
V. Pembiayaan Lainnya	0,18	0,0	18,47	15,0	0,00	0,00
Kelebihan/ Kekurangan Pembiayaan		(10,1)			76,7	

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga Januari 2019 tercatat mencapai Rp108,8 triliun atau sekitar 4,99 persen dari target APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi

penerimaan perpajakan sebesar Rp89,8 triliun dan PNBPN sebesar Rp18,32 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan periode Januari 2019 tumbuh sebesar 8,7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp86,0 triliun (tumbuh 8,82 persen) dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp3,8 triliun (tumbuh 6,70 persen). Sementara itu, realisasi PNBPN hingga Januari 2019 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi utamanya dipengaruhi tren pergerakan harga ICP dan batubara di Januari 2019 yang lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kinerja penerimaan perpajakan di awal tahun 2019 ini cukup memberikan optimisme, terutama dengan melihat kinerja penerimaan pajak. Penerimaan pajak periode Januari 2019 mampu tumbuh sebesar 8,82 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 6,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut utamanya ditopang oleh kinerja PPh non migas dan PPh migas yang tumbuh *double digits*, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 19,07 persen dan 38,23 persen dari periode tahun sebelumnya. Dilihat secara lebih detail, pertumbuhan penerimaan PPh non migas tersebut terutama dipengaruhi kinerja yang cukup baik dari penerimaan PPh Pasal 25/29, PPh Badan, dan PPh Orang Pribadi. Faktor yang mendukung pertumbuhan penerimaan PPh non migas di periode Januari 2019 antara lain adalah masih tingginya aktivitas perdagangan internasional Indonesia, terutama aktivitas impor. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai didukung adanya dampak positif dari kebijakan kepabeanan dan cukai antara lain yang dilakukan melalui program Penerbitan Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PBCT).

Realisasi Belanja Negara hingga akhir Januari 2019 sebesar Rp153,8 triliun atau tumbuh sekitar 10,35 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp76,1 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp77,7 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Januari 2019 tumbuh sebesar 17,8 persen yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan penyerapan anggaran. Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang persentase penyerapannya terbesar di periode Januari 2019 adalah belanja bantuan sosial yang sudah mencapai 15,6 persen dari pagu APBN 2019. Di sisi lain, realisasi TKDD di bulan Januari 2019 mencapai Rp77,7 triliun atau sekitar 9,40 persen dari pagu APBN 2019, terdiri dari realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp77,4 triliun (10,7 persen dari APBN) dan realisasi Dana Desa sebesar Rp0,32 triliun (0,45 persen dari APBN). Cukup tingginya persentase penyerapan TKD di bulan Januari antara lain dipengaruhi adanya proses penyaluran Dana Bagi Hasil yang relatif lebih cepat.

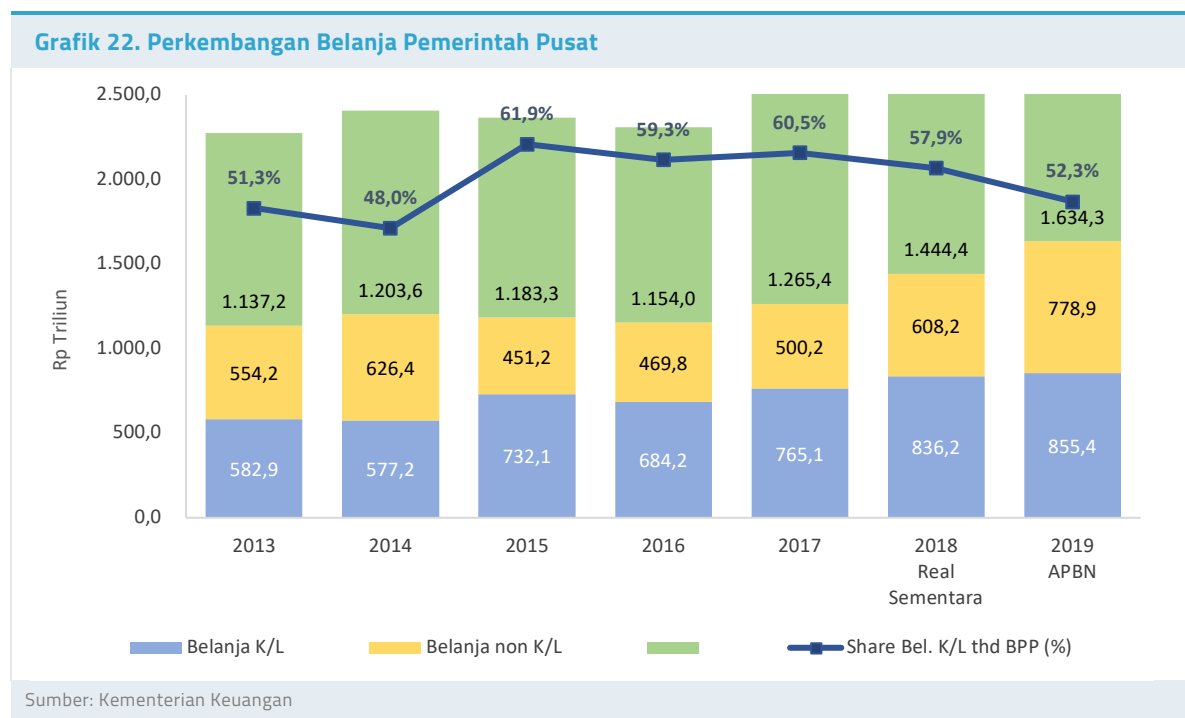
Defisit APBN hingga Januari 2019 tercatat sebesar Rp45,8 triliun atau sekitar 0,28 persen terhadap PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer berada posisi negatif Rp22,8 triliun. Untuk menutupi defisit, realisasi pembiayaan anggaran telah dilakukan di Januari 2019 adalah sebesar Rp122,5 triliun, yang utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Secara lebih detail, pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp119,5 triliun dan

pinjaman (neto) sebesar Rp2,9 triliun. Seiring dengan perbaikan fundamental ekonomi dan persepsi yang semakin positif atas Indonesia yang antara lain tercermin dari kenaikan peringkat utang, maka pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperoleh dengan biaya yang semakin rendah. Dengan demikian, beban fiskal yang timbul dari pengelolaan pembiayaan utang dapat berkurang.

C. REVIEW ATAS BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pemerintah secara konsisten melakukan upaya perbaikan agar pengelolaan APBN dilakukan secara lebih realistis, kredibel, dan pruden baik dari sisi pendapatan dan belanja maupun pembiayaan anggaran. Di sisi belanja, pemerintah senantiasa berkomitmen melakukan upaya penguatan belanja yang berkualitas dengan tetap mendorong peningkatan efisiensi belanja yang kurang produktif. Sementara di sisi pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan skema pembiayaan yang kreatif dan efisien untuk meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN/BUMD dalam mengakselerasi pembangunan.

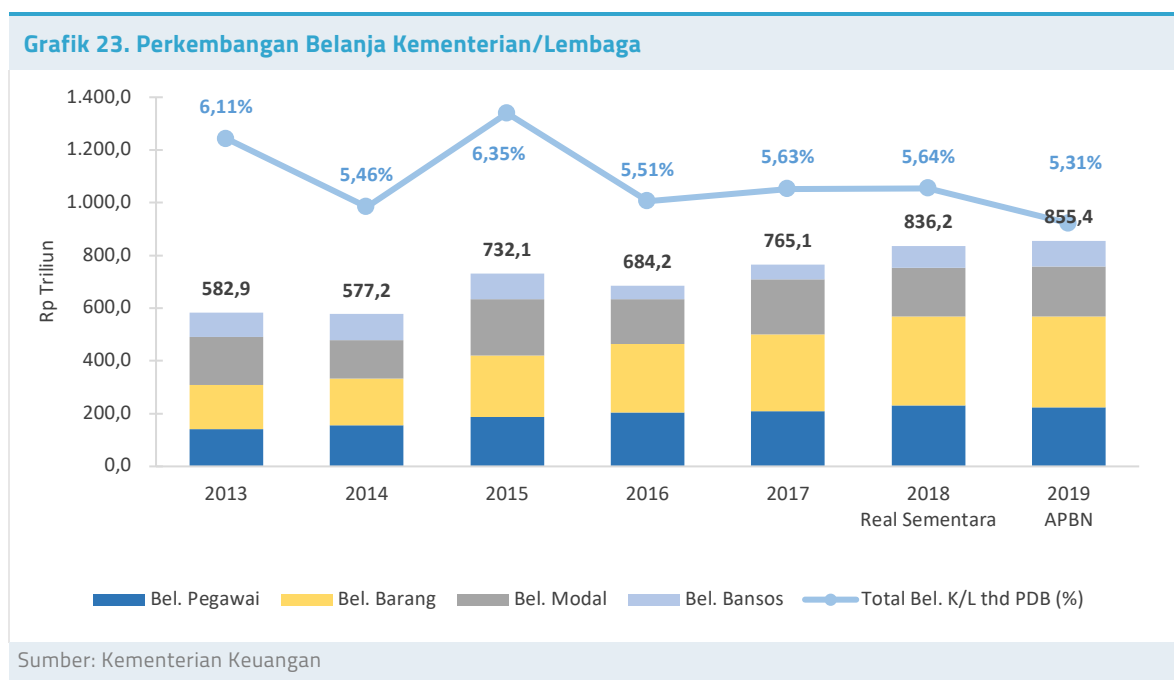
Kebijakan yang diambil Pemerintah untuk meningkatkan kualitas antara lain adalah dengan melakukan penguatan belanja yang lebih produktif seperti anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penguatan belanja yang berkualitas tersebut tentunya harus didukung dengan upaya efisiensi atas belanja yang sifatnya kurang produktif antara lain seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, dan honorarium tim. Upaya efisiensi tersebut diperlukan untuk memperlebar ruang fiskal yang saat ini masih relatif terbatas dalam mendukung penguatan belanja berkualitas.



Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, pemerintah terus mengedepankan konsep *Value for Money* (VfM) dalam pelaksanaan APBN. Esensinya adalah agar setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan dapat memberikan hasil atau dampak yang lebih optimal. Untuk itu, proses *review* dan upaya perbaikan atas berbagai komponen belanja perlu terus dilakukan, terutama belanja yang bersifat konsumtif seperti belanja barang. Sejalan dengan hal tersebut, *review* atas pelaksanaan belanja barang terutama yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penting untuk dilakukan dalam mendukung upaya penguatan konsep VfM.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menunjukkan tren yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Realisasi BPP di tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.137,2 triliun, meningkat menjadi Rp1.444,4 triliun pada realisasi sementara APBN 2018. Secara rata-rata, sekitar 55,9 persen dari total BPP adalah merupakan Belanja K/L dan porsinya sudah menurun menjadi sekitar 52,3 persen dari BPP dalam APBN 2019. Jika dibandingkan dengan PDB Nominal, maka secara rata-rata rasio belanja belanja K/L adalah sebesar 5,72 persen terhadap PDB.

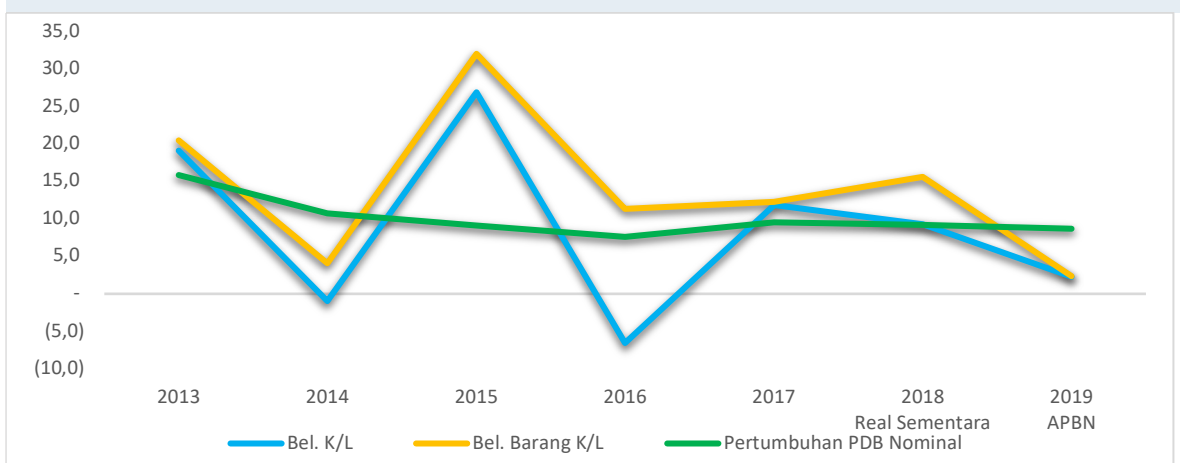
Rata-rata pertumbuhan Belanja K/L dalam kurun waktu 2013–2019 adalah sebesar 8,8 persen per tahun. Meskipun rasio Belanja K/L dalam APBN 2019 (5,31 persen PDB) sudah lebih rendah dari rata-rata (5,72 persen PDB), akan tetapi Belanja K/L dalam APBN 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen dibandingkan realisasi sementara APBN 2018. Jika dirinci menurut jenis belanjanya, Belanja K/L didominasi oleh belanja barang yang rata-rata mencapai 35,4 persen dari total Belanja K/L. Proporsi belanja barang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya sebesar 29,1 persen di tahun 2013, meningkat menjadi 40,3 persen dari total Belanja K/L dalam APBN 2019.



Salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan Belanja Barang adalah adanya kebijakan reklasifikasi Belanja Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah yang dilakukan pada tahun 2015. Adanya kebijakan reklasifikasi Belanja Bansos menjadi Bantuan Pemerintah ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah (PMK Nomor 168/2015). Salah satu faktor yang melatarbelakangi reklasifikasi tersebut adalah adanya hasil temuan KPK dan reviu BPKP atas penyaluran bansos yang dilakukan oleh beberapa K/L pada saat itu. Salah satu temuan kedua instansi tersebut adalah terdapatnya penyaluran bantuan sosial di beberapa K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak tepat sasaran dan tumpang tindih sehingga direkomendasikan untuk direvisi menjadi belanja pegawai atau belanja barang sesuai dengan peruntukannya.

Rata-rata pertumbuhan Belanja Barang K/L selama beberapa tahun terakhir selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Belanja K/L dan PDB Nominal. Rata-rata pertumbuhan belanja barang K/L adalah sebesar 14,0 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan belanja K/L (tumbuh 8,8 per tahun). Selain itu, rata-rata pertumbuhan belanja barang K/L juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB Nominal yang hanya tumbuh sebesar 10,1 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan belanja barang K/L dalam APBN 2019 sudah mengalami perlambatan (hanya tumbuh 2,4 persen), tetapi secara nominal terhadap PDB (2,1 persen PDB) masih lebih tinggi dari rata-rata realisasi tahun 2013–2017 (1,9 persen PDB). Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan upaya yang dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja barang.

Grafik 24. Pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (persen)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan Belanja Barang K/L yang cukup tinggi utamanya dipengaruhi oleh komponen Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pemda/Masyarakat yang tumbuh cukup tinggi. Jenis belanja ini merupakan komponen Belanja Barang yang termasuk kelompok Bantuan Pemerintah berdasarkan PMK 168/2015. Alokasi anggaran Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda digunakan untuk penyaluran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria bantuan sosial. Adapun jenis Bantuan Pemerintah yang dapat dialokasikan dalam akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pemda/Masyarakat adalah

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dan bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pemerintah terus mendorong K/L untuk melakukan efisiensi terutama pada belanja barang namun dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat serta pencapaian target output asing-masing K/L. Untuk itu, dalam melakukan efisiensi Belanja Barang, masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri (*self blocking*) atas belanja yang akan dihemat, antara lain seperti belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, serta belanja langganan dan jasa. Dengan demikian, upaya efisiensi belanja yang dilakukan oleh asing-masing K/L tidak akan mengganggu aktivitas/kegiatan mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun beberapa kebijakan penghematan dan efisiensi belanja yang pernah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, antara lain adalah dengan diterbitkannya:

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2014;
- b. Inpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan *meeting*/konsinyering K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2015;
- c. Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016;
- d. Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN Perubahan TA 2016; dan
- e. Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2017.

Secara umum, belanja barang K/L masih perlu terus dievaluasi guna penajaman dalam rangka mendukung penguatan *value for money* pengelolaan APBN. Proses evaluasi tersebut dapat dilakukan pada komponen belanja barang yang tumbuh tinggi dan/atau porsi cukup besar, antara lain seperti Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. Meskipun belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berkarakter belanja modal, tetapi perlu disinkronisasikan agar tidak terjadi *overlapping* antar jenis Bantuan Pemerintah yang disalurkan. Selain itu, perlu juga evaluasi ketepatan waktu dan sasaran dalam penyaluran bantuannya agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, terutama pada penyaluran Bantuan Pemerintah berupa peralatan dan mesin.

Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja terutama pada belanja barang di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif, efisien, dan fokus pada pencapaian *output*. Untuk itu, upaya yang akan dilakukan di tahun 2019 antara lain adalah

dengan melanjutkan efisiensi belanja barang operasional dan non operasional, penghematan perjalanan dinas terutama perjalanan dalam negeri dan paket *meeting*, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda serta mendorong pengembangan skema KPBU yang lebih efektif.

D. CAPAIAN POSITIF APBN SEBAGAI HASIL DARI REFORMASI FISKAL

Kinerja APBN di tahun 2018 merupakan hasil positif dari berbagai reformasi fiskal yang telah dijalankan Pemerintah. Langkah-langkah terobosan dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka mendukung terciptanya APBN yang lebih berkesinambungan dan kebijakan fiskal yang optimal mendukung kemajuan perekonomian. Dalam menjalankan segala terobosan kebijakan tersebut, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan salah satu terobosan kebijakan paling penting di sisi Pendapatan Negara yang telah sukses membawa manfaat besar pada perbaikan perpajakan nasional. Kebijakan yang dilaksanakan pada 2016-2017 tersebut memiliki tujuan makro untuk mendukung sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan dan inklusif melalui repatriasi aset. Selain itu, *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk memperbaiki penerimaan perpajakan Indonesia yang masih belum optimal, serta turut terkena imbas dari pelemahan ekonomi global. Secara definisi, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

***Tax Amnesty* disambut baik oleh masyarakat dengan menghasilkan penerimaan pajak mencapai Rp134,8 triliun, dimana Rp114,2 triliun di antaranya merupakan pembayaran uang tebusan.** Total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.884 triliun serta diikuti oleh lebih dari 965 ribu peserta. *Tax Amnesty* yang dijalankan Indonesia merupakan yang paling sukses dibanding program serupa di negara lain seperti Chile, India, Afrika Selatan, dan Italia. Melalui terobosan kebijakan ini basis data perpajakan menjadi lebih luas dan kepatuhan meningkat. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari langkah untuk implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau inisiatif pertukaran informasi perpajakan secara otomatis dengan negara-negara lain.

Reformasi perpajakan menjadi salah satu prioritas utama dalam reformasi fiskal mengingat perannya yang sentral sebagai tulang punggung APBN dan pembangunan. Selain *Tax Amnesty*, Pemerintah terus melakukan penguatan baik di sisi kebijakan maupun administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat sistem perpajakan adalah melalui kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Revaluasi Aset, hingga penurunan tarif PPN bagi UMKM. Di sisi administrasi, manajemen data, perbaikan sistem informasi dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan institusi terus menjadi area yang menjadi perhatian. Dalam hal pendapatan Kepabeanan dan Cukai juga telah

diambil beberapa kebijakan penting seperti Penertiban Cukai Berisiko Tinggi, Penertiban Impor Berisiko Tinggi, hingga efisiensi *dwelling time*.

Untuk optimalisasi Pendapatan Negara, Pemerintah juga telah melakukan revisi Undang-Undang PNPB. Pada revisi UU PNPB tersebut, penyempurnaan tata kelola dan peningkatan pelayanan yang bersih dikedepankan sebagai kunci agar penerimaan negara menjadi lebih optimal. Beberapa perubahan utama dalam revisi tersebut antara lain pengelompokan PNPB pada 6 klaster yaitu SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Selain itu terdapat penyesuaian tarif yang lebih memperhatikan dampaknya pada masyarakat, bisnis, lingkungan, dan sosial budaya.

Reformasi pada sisi pengeluaran dilakukan untuk memastikan terciptanya Belanja Negara yang berkualitas. Reformasi belanja diawali dengan perubahan rezim Subsidi BBM dengan mencabut subsidi untuk bahan bakar Premium, serta menetapkan subsidi tetap untuk Solar di tahun 2014. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif seperti infrastruktur serta perlindungan sosial. Alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara tajam untuk mengejar ketertinggalan fisik yang selama ini menjadi salah satu penghambat pembangunan. Alokasi belanja infrastruktur diarahkan baik melalui belanja K/L di pusat maupun Pemerintah Daerah seperti melalui DAK atau Dana Desa. Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah pada peningkatan produktivitas, telah diimplementasikan kewajiban 25 persen alokasi DAU untuk infrastruktur.

Dukungan pada infrastruktur tidak hanya melalui Belanja Negara tetapi juga dengan memanfaatkan Pembiayaan Negara. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan untuk pengembangan infrastruktur khususnya yang dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah menyediakan penjaminan dan pembiayaan dalam bentuk *Viability Gap Fund* atau *Project Development Fund*. Selain itu, Pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang salah satu tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Melalui pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diharapkan proses pembebasan lahan untuk kepentingan infrastruktur akan lebih lancar dan tidak memberikan hambatan bagi pembangunan proyek. Agar realisasi Belanja Negara dapat lebih optimal, berbagai langkah perbaikan seperti melalui percepatan lelang dan simplifikasi pengadaan barang terus dilakukan.

Sebagai salah satu bagian utama dalam Belanja Negara, Subsidi dan Bantuan Sosial terus mengalami perbaikan baik dari sisi alokasi maupun penyaluran. Salah satu terobosan pada program perlindungan sosial ini ialah melalui implementasi sistem non-tunai untuk memperbaiki ketepatan sasaran. Agar efektivitas program bantuan sosial terus meningkat di dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, Pemerintah melakukan perluasan jangkauan. Salah satu program yang jangkauannya terus diperluas adalah Jaminan Kesehatan Negara bagi para Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 96,8 juta orang. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah

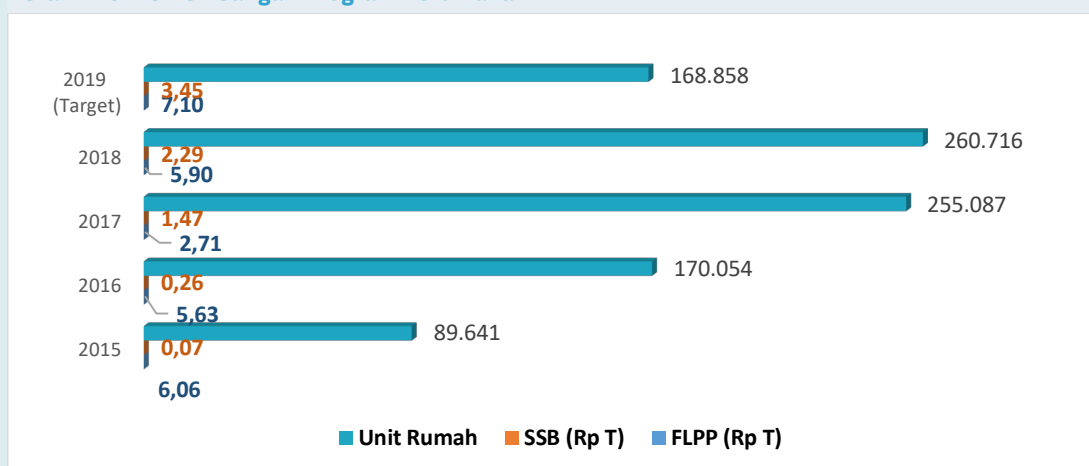
satu program paling penting dalam pengentasan kemiskinan terus diperkuat melalui peningkatan jumlah penerima maupun besaran manfaat. Untuk memutus rantai kemiskinan, Pemerintah juga memberi prioritas pada program bantuan untuk pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi. Sementara itu program subsidi pangan juga sudah mengalami transformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai.

Salah satu bagian penting dari pengelolaan fiskal adalah menjaga ketahanan APBN dan kesinambungan pembiayaan. Pada komponen ini telah dilakukan berbagai inovasi yang antara lain bertujuan untuk diversifikasi pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan. Salah satu inovasi tersebut diwujudkan melalui penerbitan *Green Sukuk* untuk mendukung keberlangsungan lingkungan serta Sukuk untuk pembiayaan infrastruktur. Dalam rangka menjangkau investor dalam negeri termasuk menarik minat generasi muda untuk mendukung pembangunan, Pemerintah juga meningkatkan penerbitan SBN ritel seperti Surat Berharga Ritel dan Sukuk Tabungan.

Boks 2. Kebijakan Perumahan di Indonesia dalam Perspektif Fiskal

Perumahan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan, karena mencakup pemenuhan dimensi sosial dan dimensi ekonomi masyarakat. Dari dimensi sosial, perumahan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Sementara dari dimensi ekonomi, perumahan memiliki *backward* (konstruksi, barang modal, dll) dan *forward linkage* (wilayah ekonomi baru) yang kuat terhadap berbagai sektor sehingga mampu memberikan daya jalar terhadap perekonomian. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan opsi kebijakan yang efektif sehingga tidak hanya tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi, namun juga penganggaran yang *sustainable* dengan risiko fiskal yang termitigasi.

Grafik 25. Perkembangan Program Perumahan



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Dalam lima tahun terakhir, pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar.

- Pertama**, *gap* antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia, atau lebih dikenal dengan *backlog* perumahan. Diperkirakan *backlog* perumahan berada dalam kisaran 10–12 juta unit rumah. Sementara jumlah suplai pembangunan rumah per tahun hanya sekitar 200–300 ribu unit rumah. Disinilah pemerintah menekankan perlunya mengakselerasi program perumahan dalam mengatasi *backlog* perumahan tersebut.
- Kedua**, kemampuan fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan program rumah terjangkau dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
- Ketiga**, faktor teknis lainnya, seperti akses *financing* kepada *stakeholders* (pengembang, regulasi, harga bahan baku, dll). Meningkatnya harga bahan baku pendukung rumah, terutama lahan, yang membuat harga rumah semakin tinggi, sementara harga yang dipatok belum mengalami kenaikan signifikan (Rp130–Rp145 juta).

Dalam hal memenuhi *gap* kebutuhan rumah, pemerintah berupaya agar program pembiayaan rumah terjangkau (*affordable housing*) dapat diakses seluas-luasnya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendorong sisi *supply* (ketersediaan rumah dengan harga terjangkau) dan sisi *demand* (fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR) sektor perumahan. *Existing* program yang dimiliki pemerintah saat ini dalam mendorong sisi *demand* program adalah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BUM (Bantuan Uang Muka) sebagai program komplementer. Adapun program tersebut menawarkan fasilitas pembiayaan terjangkau kepada MBR untuk kepemilikan rumah pertama dengan *fixed rate* 5 persen pertahun dan lazimnya bundling dengan bantuan BUM sebesar Rp4 juta per unit. Dalam empat tahun

(2015-2018) terakhir, program pembiayaan rumah terjangkau yang diinisiasi pemerintah baru dapat memenuhi sekitar 775 ribu rumah secara kumulatif, sementara jumlah tersebut baru mampu memenuhi sekitar 9% dari total backlog perumahan. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi kebijakan maupun inovasi teknologi yang dapat mendorong pemenuhan rumah terjangkau menjadi lebih efektif dan efisien, baik secara anggaran, waktu, maupun modal.

Terkait dengan kemampuan fiskal, program rumah terjangkau sebenarnya memiliki perbedaan fundamental dari sumber APBN, dimana FLPP bersumber dari anggaran investasi pemerintah (*revolved*) sementara SSB dan BUM berasal dari pos belanja negara (*non-revolved*). Dengan kata lain, semakin meningkatnya MBR yang mengakses program tersebut setiap tahunnya, ditambah dengan adanya ketidakpastian volatilitas suku bunga dimasa mendatang, akan berpotensi menggerus ruang fiskal APBN sehingga hal ini perlu dimitigasi. FLPP memiliki keunggulan dibandingkan skema pembiayaan perumahan lainnya baik dari sisi sumber dana (pembiayaan investasi APBN), sasaran, dan mitigasi risiko. Sementara SSB dan SBUM kurang optimal dari sisi sumber dana (belanja negara) sehingga memiliki *risiko contingent liability* dalam jangka panjang.

Gambar 2. Perkembangan Program Perumahan

	Subsidi Selisih Bunga (SSB) Dimulai sejak 2015	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Dimulai sejak 2015	FLPP Dimulai sejak 2010
Pendanaan	APBN	APBN	APBN++ (SMF&Bank)
Revolving Fund	✗	✗	✓
Beneficiaries: MBR	✓	✓	✓
Mekanisme Banking	✓	✓	✓
Skema Pembiayaan	Marjin bunga ditanggung Pemerintah (5% fixed)	Installment (Rp4 Juta)	20 tahun (5% fixed)
Pemanfaatan	Rumah Pertama	Rumah Pertama	Rumah Pertama
Potensi Risiko	Kenaikan suku bunga; Meningkatnya jumlah penerima manfaat; Ketepatan sasaran; Kenaikan beban fiskal	Meningkatnya jumlah penerima manfaat; Ketepatan sasaran; Bundling dengan program subsidi lainnya (<i>double subsidy</i>) Kenaikan beban fiskal	Ketepatan sasaran; Beban fiskal dapat dikontrol.

Sumber: Hasil Kajian Pusat Kebijakan APBN, BKF

Untuk mendorong efektivitas program rumah terjangkau, perlu dirancang skema pembiayaan perumahan yang optimal sehingga diperoleh informasi skema yang paling optimal dan strategi yang tepat untuk integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Adapun indikator analisis yang digunakan atas skema pembiayaan tersebut adalah kesesuaian dalam aspek *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *sustainability*. Maka dari itu, pemerintah berupaya agar program SSB dan SBUM nantinya dapat dikurangi secara bertahap dan digeser menjadi FLPP saja.

Terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Tapera sebenarnya memiliki beban fiskal yang lebih rendah dibandingkan program pembiayaan perumahan lainnya. Dalam setahun, beban tarif Tapera yang dibayarkan melalui APBN hanya dalam kisaran Rp1 triliun, sementara skema pembiayaan perumahan lainnya mencapai $\pm$ Rp 9 triliun. Namun demikian, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan program tersebut belum berjalan sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah pengenaan tarif 3 persen dirasa kurang *feasible* bagi sektor swasta. Seharusnya Tapera dapat menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah terjangkau, tidak hanya dari sisi fiskal namun juga dari aspek keberlanjutannya, termasuk penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri. Transformasi konsep tabungan perumahan yang tadinya hanya bagi ASN dan kemudian mencakup seluruh warga negara perlu diapresiasi. Karena hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Hanya saja berbagai kendala yang muncul menyebabkan program ini butuh penyesuaian dalam implementasinya. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah tetap menyediakan rumah terjangkau bagi ASN, TNI, dan Polri melalui skema eksisting, yaitu FLPP.

Dalam hal menjawab kendala teknis, BUMN dan sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah, perlu dirangsang untuk melakukan pengembangan perumahan dengan harga yang relatif terjangkau dan kualitas yang baik bagi MBR, dengan tanpa mengorbankan sisi profit bagi badan usaha. Hal ini krusial dan perlu mendapat perhatian serius karena Pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai stakeholder agar program rumah terjangkau dapat berkelanjutan. Di sisi lain, perbankan sebagai *intermediaries* juga memiliki peran strategis dalam menjangkau dan memberikan pembiayaan perumahan yang murah bagi MBR hingga sampai ke pelosok negeri, sehingga aspek *accessibility* atas pembiayaan perumahan dapat terpenuhi secara optimal.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAGIAN III

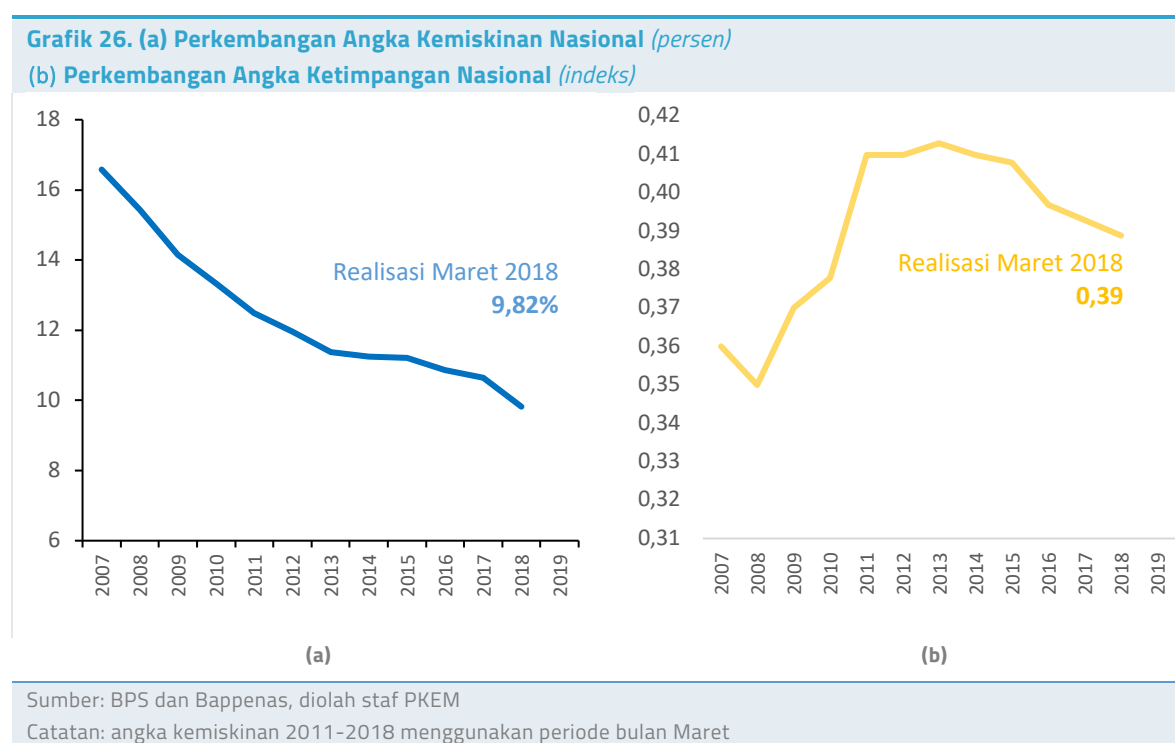
ULASAN KHUSUS:

UPAYA MENURUNKAN KEMISKINAN
DAN KETIMPANGAN MELALUI
BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN



A. PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DAN BANTUAN SOSIAL

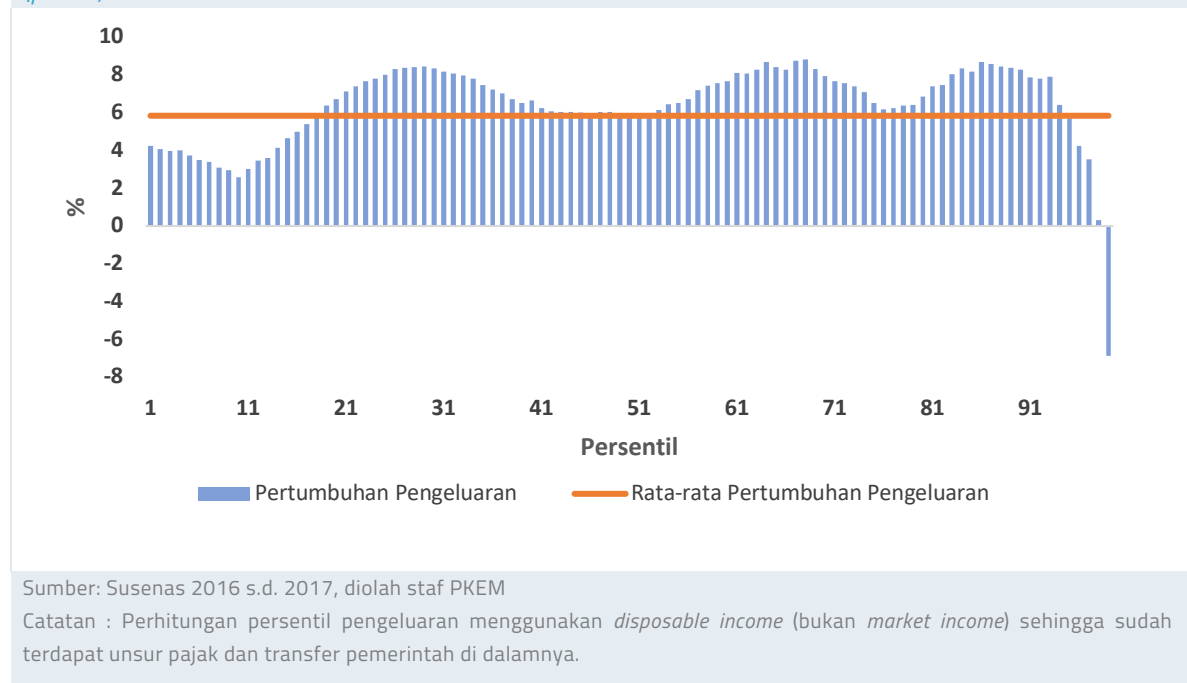
Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan terus mengalami penurunan bahkan mencapai *single digit* pada tahun 2018, yaitu 9,82 persen di bulan Maret dan 9,66 persen di bulan September 2018. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah sejak tahun 1999. Namun, masih terdapat indikasi adanya kemiskinan kronis pada penduduk kelompok pendapatan terbawah, yang membuat upaya untuk menurunkan kemiskinan perlu terus menjadi prioritas dan dilakukan secara lebih intensif. Di sisi lain, perkembangan ketimpangan nasional atau rasio gini juga menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sempat mengalami kenaikan rasio gini yang relatif cepat dalam periode 2003 hingga 2012. Rasio gini ini relatif stagnan di kisaran 0,41 pada periode 2012-2014, kemudian di tahun 2015 dan seterusnya ketimpangan menunjukkan tren menurun hingga mencapai 0,389 pada awal tahun 2018 dan kembali turun ke 0,384 di bulan September 2018.



Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah perbaikan tingkat pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini dapat diindikasikan oleh peningkatan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data Susenas Maret 2016-2017, secara nasional rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita per bulan penduduk 40 persen terbawah berada pada angka yang relatif tinggi (Grafik 27). Grafik 27 juga menunjukkan adanya perbaikan pengeluaran kelompok penduduk miskin meskipun lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan dengan pengeluaran kelompok yang lebih kaya. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbaikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antara lain didorong oleh kenaikan upah buruh tani dan bangunan, adanya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial (Bansos), dan perbaikan pendapatan aparatur pemerintah golongan bawah.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, rumah tangga (RT) yang bekerja di sektor ekstraktif (pertanian dan pertambangan) memberikan kontribusi utama terjadinya perubahan rasio gini, karena fluktuasi pengeluaran per kapita di sektor industri dan jasa-jasa relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh harga komoditas yang cenderung berfluktuasi. Selama periode 2003-2014, pertumbuhan pengeluaran per kapita kelompok 20 persen penduduk terkaya di sektor ekstraktif tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok lain sehingga rasio gini meningkat ke level tertinggi yaitu mencapai 0,413. Akan tetapi, pasca harga komoditas turun signifikan pada tahun 2015, pengeluaran per kapita kelompok 20 persen terkaya tumbuh lebih lambat dibandingkan kelompok lain sehingga menyebabkan rasio gini mengalami perbaikan. Gambaran ini menunjukkan semakin pentingnya diversifikasi sumber perekonomian, agar perekonomian dan tingkat kesejahteraan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada siklus harga komoditas.

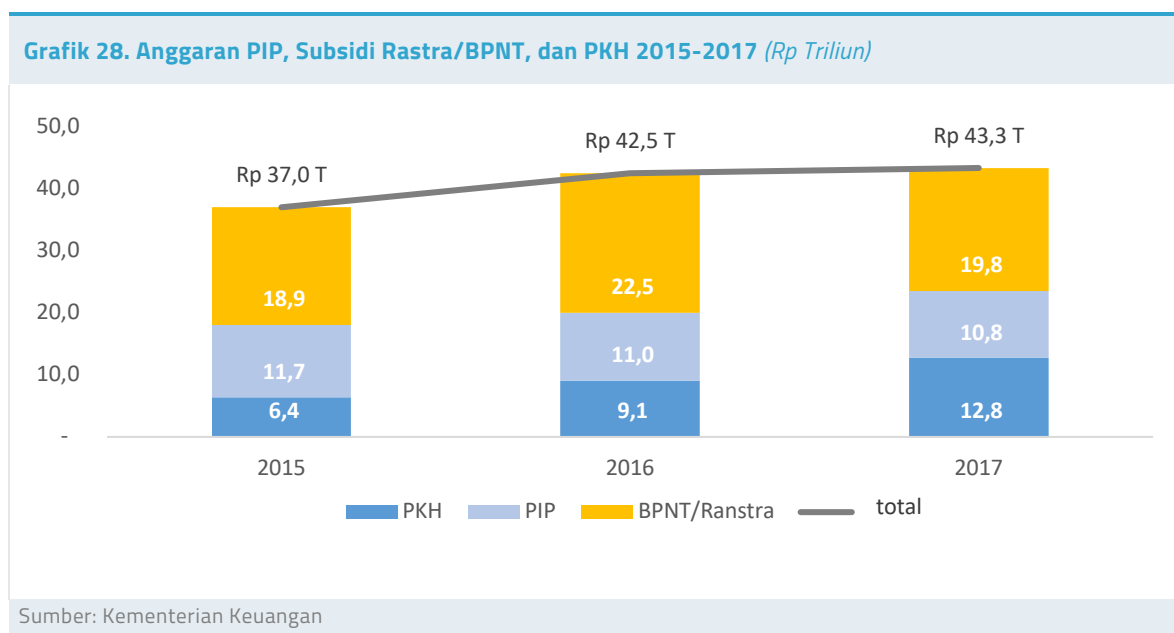
Grafik 27. Pertumbuhan Pengeluaran Masyarakat Berdasarkan Persentil Tahun 2016 s.d. 2017
(persen)



Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dan rasio gini, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah akan terus mengevaluasi program-program yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat agar kebijakan fiskal tersebut dapat lebih efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. Evaluasi ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih tingginya tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan *benefit incidence* untuk melihat lebih dalam efektivitas program, adanya *inclusion* dan *exclusion error*, serta kecukupan bantuan dengan melihat proporsi bantuan terhadap pengeluaran rumah tangga (RT). Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data susenas Maret 2015 dan susenas Maret 2017. Dari berbagai program, analisis ini hanya berfokus pada program-program utama yang ada saat ini

yaitu Bansos berupa Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sementara itu, anggaran Beras Sejahtera (Rastra)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan peningkatan dari Rp37 triliun (2015) menjadi Rp43,3 triliun (2017). Kenaikan ini dikarenakan adanya perluasan cakupan PKH yang diberikan kepada 3,5 juta RT pada tahun 2015 menjadi 6 juta RT pada tahun 2017. Anggaran PIP tidak mengalami perubahan yang signifikan karena besaran bantuannya tetap dan cakupan kepesertaan relatif sama. Sedangkan Rastra/BPNT tidak mengalami perubahan yang signifikan karena cakupan dan besaran bantuan relatif tidak banyak berubah. Khusus untuk bantuan pangan, pada tahun 2015-2016 masih berbentuk subsidi. Pada tahun 2017 dimulai *pilot project* BPNT yang berbentuk bantuan sosial bukan tunai yang diberikan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggaran bantuan pangan tahun 2017 terdiri dari Rp18,2 triliun berbentuk Subsidi Rastra dan Rp1,6 triliun berbentuk Bantuan Sosial (BPNT). Selain itu, karena terjadi transformasi Subsidi Pangan menjadi Bansos yang dimulai pada tahun 2017/2018, maka dalam kajian ini pengelompokan Subsidi Pangan sama dengan PKH dan PIP.

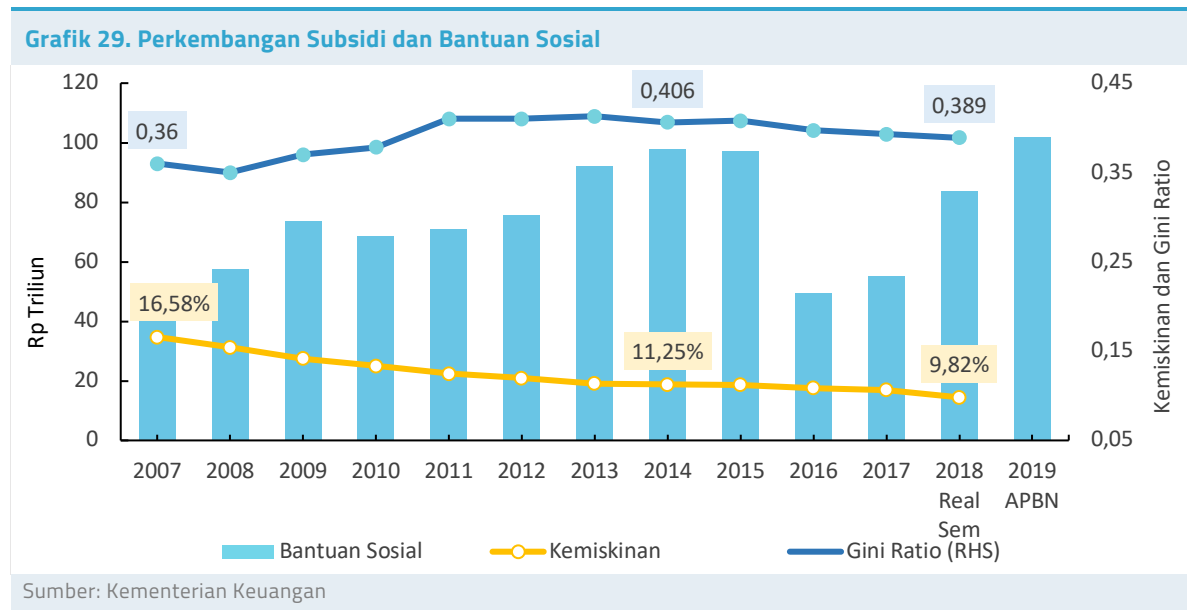


B. ANALISIS EFEKTIVITAS

Efektivitas program secara umum

Berdasarkan hasil perhitungan, PKH dan PIP masih merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2017. Namun demikian, hal yang perlu menjadi catatan adalah efektivitas program bansos terhadap penurunan angka kemiskinan dan rasio gini harus terus ditingkatkan. Jenis Bansos seperti BPNT, PKH, dan PIP

terus mengalami *upgrading* dan transformasi guna mengurangi *targeting error* dan memberikan dampak penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih optimal.



Rastra

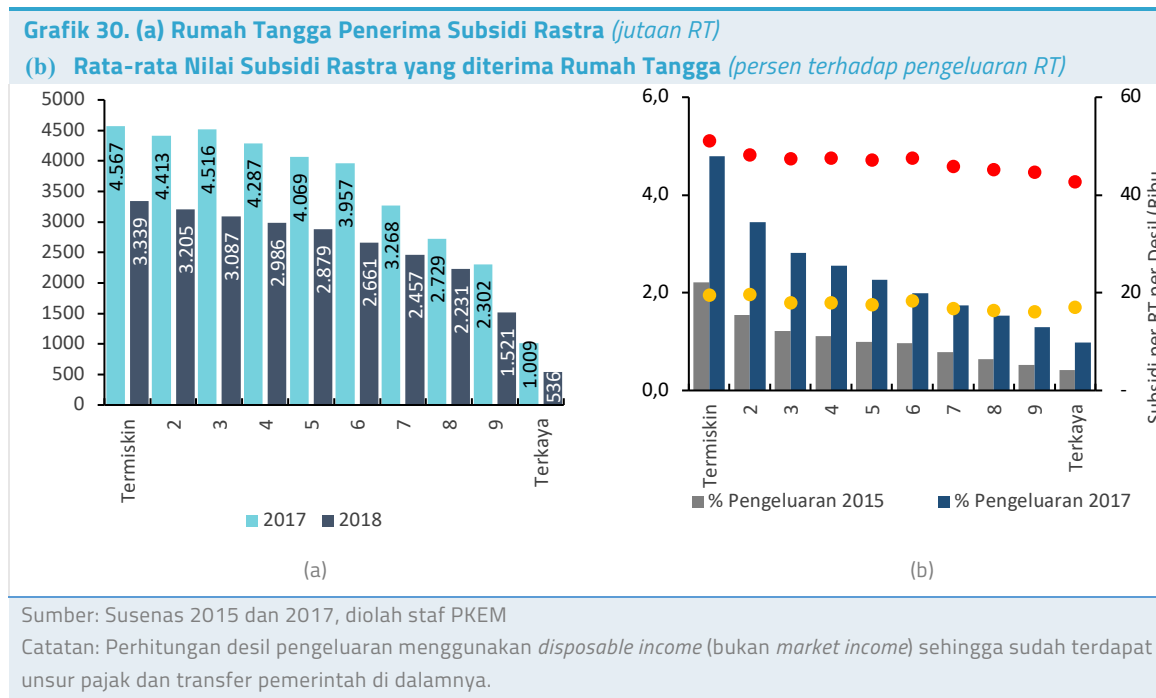
Benefit Incidence

Perhitungan *benefit incidence* menunjukkan bahwa Rastra bersifat progresif karena lebih dinikmati oleh kelompok RT yang lebih miskin. Namun demikian, perhitungan ini masih menunjukkan adanya *inclusion* dan *exclusion error*. *Inclusion error* terlihat karena masih terdapat RT di kelompok desil 4-10 yang menerima Subsidi Rastra. Kelompok RT 20 persen terkaya, yang seharusnya tidak menerima Subsidi dan Bansos, masih menikmati 7,7 persen dari total Subsidi Rastra. Sementara itu, indikasi *exclusion error* ditunjukkan oleh proporsi kelompok RT 25 persen termiskin yang belum semuanya menerima Rastra.

Kontribusi Subsidi Rastra masih relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran RT. Porsi Subsidi Rastra yang diterima terhadap pengeluaran RT lebih besar pada kelompok RT lebih miskin. Pada tahun 2017, Subsidi Rastra hanya berkontribusi sekitar 4,8 persen dari rata-rata pengeluaran kelompok RT 10 persen termiskin. Sementara itu, untuk kelompok RT 10 persen terkaya hanya berkontribusi sekitar 1 persen dari rata-rata pengeluaran. Secara nominal, kelompok RT 10 persen termiskin rata-rata menerima Subsidi Rastra sebesar Rp51.140 per bulan sementara kelompok RT 10 persen terkaya menerima subsidi Rastra sebesar Rp42.838 per bulan.

Selain isu ketidaktepatan sasaran, temuan lain yang perlu menjadi catatan dari analisis Susenas 2017 adalah jumlah RT yang menerima Rastra sebanyak 24,9 juta RT lebih banyak dari yang seharusnya yaitu 15,6 juta RT. Pada tahun 2018 telah dilakukan kajian lain untuk melihat efektivitas Rastra/BPNT pada level teknis program, yang merupakan transformasi dari

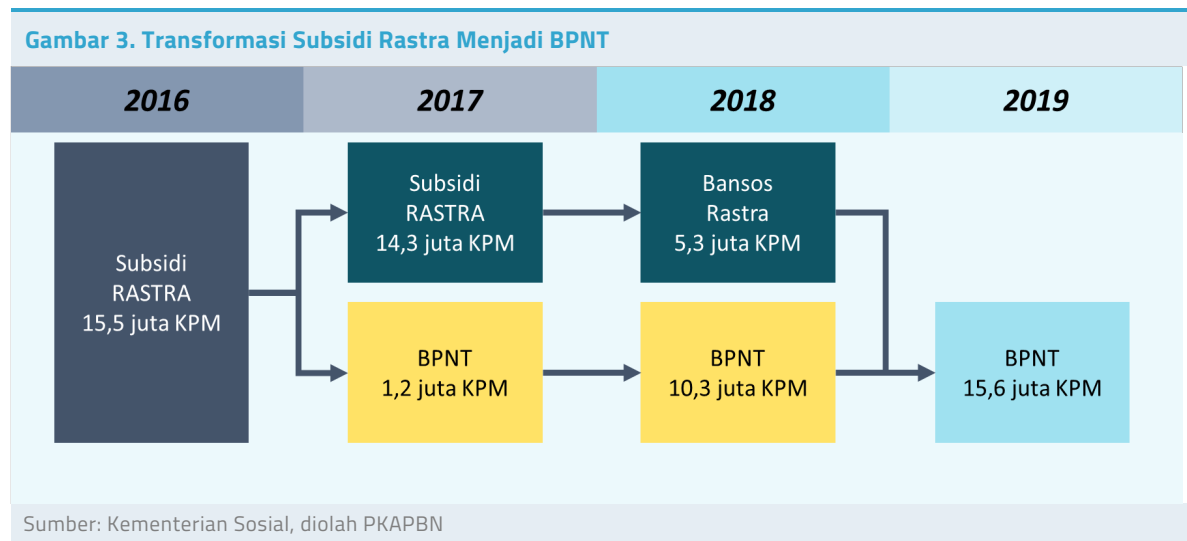
subsidi Rastra. Survei menemukan bahwa responden penerima bansos Rastra merasa tidak keberatan dengan adanya praktik bagi rata yang mengakibatkan jumlah beras yang diterima berkurang. Salah satu alasannya adalah tingginya rasa kebersamaan dan empati antarmasyarakat.



Untuk meningkatkan efektivitas program, Rastra secara bertahap bertransformasi menjadi Bantuan Sosial. Untuk tahun 2018, 10 juta KPM menerima bantuan pangan dalam bentuk non tunai yaitu BPNT dan 5,6 juta KPM menerima bantuan pangan dalam bentuk natura (Bansos Rastra). Transformasi Subsidi Rastra menjadi BPNT mulai dilakukan di 2017, dengan melakukan *piloting project* di 44 Kabupaten/Kota. Di tahun 2017 tersebut, penerima Subsidi Rastra menjadi sebanyak 14,3 juta KPM dan penerima BPNT sebanyak 1,2 juta KPM. Pada tahun 2018 proses *phasing-out* bantuan sosial *in-natura* Rastra untuk digantikan dengan BPNT dilakukan dalam 4 tahapan perluasan lanjutan, mencakup 219 kabupaten/kota dan 10,3 juta KPM. Sehingga total KPM penerima Bantuan Sosial Rastra hingga akhir tahun 2018 hanya tersisa 5,3 juta KPM dan penerima BPNT mengalami peningkatan menjadi 10,3 juta KPM.

Rencana pelaksanaan perluasan KPM dan daerah pelaksana BPNT pada tahun 2018 dilakukan secara bertahap yaitu melalui 4 tahap perluasan yaitu pada bulan April, Mei, Oktober, November, dengan hanya 44 Kabupaten/Kota dan 1,15 juta KPM di awal tahun hingga menjadi 219 Kabupaten/Kota dan 10,3 juta KPM di bulan November 2018. Diharapkan pada akhir tahun 2019 bantuan pangan sudah seluruhnya disalurkan dalam bentuk BPNT. BPNT diberikan kepada KPM yang termasuk kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) tahun 2015. Besaran manfaat BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan, bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan di E-waroeng, agen bank dan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Perum Bulog. Dalam BPNT, bantuan pangan tidak terbatas

pada beras tetapi juga diberi pilihan untuk membeli telur. Penambahan opsi telur diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas RPJMN 2015-2019.



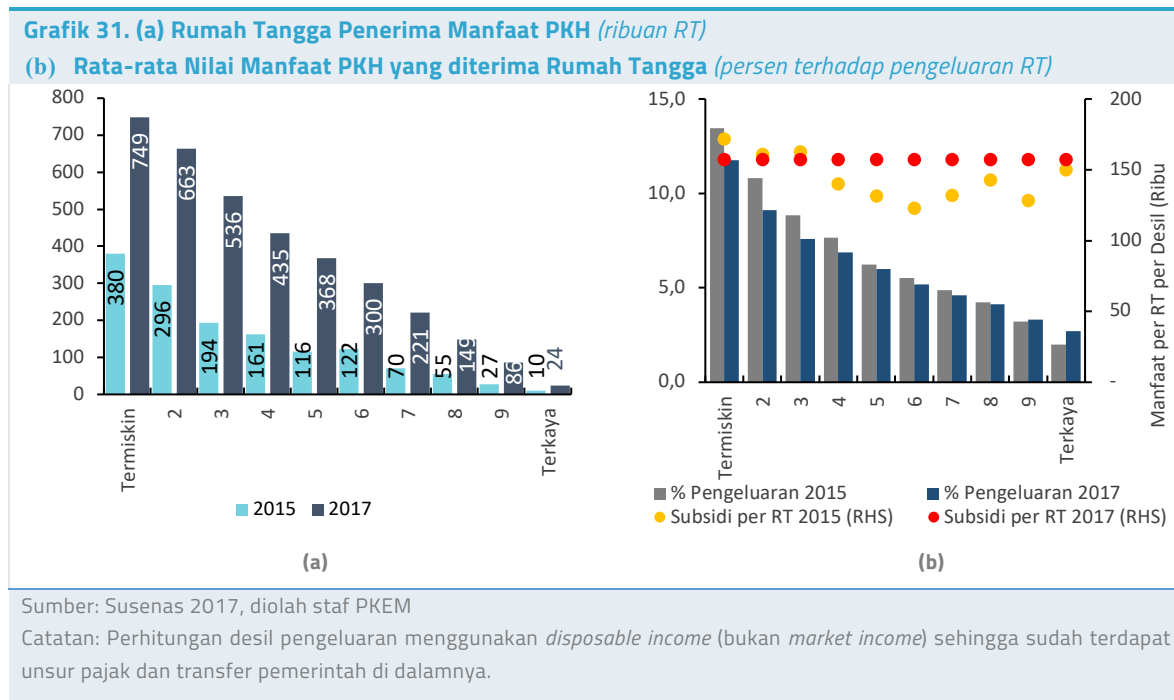
Perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu. Namun, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan BPNT adalah perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkait penggunaan layanan keuangan (keuangan inklusif) serta meningkatkan jumlah *supply side* dalam bentuk *e-waroeng*. Hal ini menarik untuk digali lebih lanjut menggunakan data Susenas tahun 2018 untuk melihat perubahan dari subsidi Rastra menjadi bansos Rastra/BPNT.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Benefit Incidence

Analisis *benefit incidence* menunjukkan bahwa PKH bersifat progresif karena RT yang lebih miskin menerima bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan RT yang kelas ekonominya lebih tinggi. Dari total bantuan PKH yang diberikan, kelompok RT 40 persen termiskin atau yang menerima manfaat sebesar 67,5 persen. Sisanya dinikmati oleh kelompok RT di kelas ekonomi yang lebih tinggi yang seharusnya tidak menerima Bantuan Sosial. Hal ini mengindikasikan masih adanya *inclusion error* di PKH. Kelompok RT 20 persen terkaya juga masih menikmati PKH walaupun dalam jumlah yang sangat kecil (3,1 persen dari total bantuan PKH).

Untuk tahun 2017, seluruh kelompok RT pada setiap desil rata-rata menerima bantuan PKH sebesar Rp157.500 per bulan. Untuk kelompok RT 10 persen termiskin, bantuan PKH yang diterima PKH berkontribusi sekitar 11,74 persen dari rata-rata pengeluaran, sementara untuk kelompok RT 10 persen terkaya hanya sebesar 2,72 persen dari rata-rata pengeluaran.



Beberapa studi yang telah dilakukan termasuk analisis *benefit incidence* sebelumnya di tahun 2015 menunjukkan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial yang paling efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki efektivitas dari program ini untuk membuat kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan terus membaik. Melalui perbaikan efektivitas PKH diharapkan angka kemiskinan dan ketimpangan akan terus menurun.

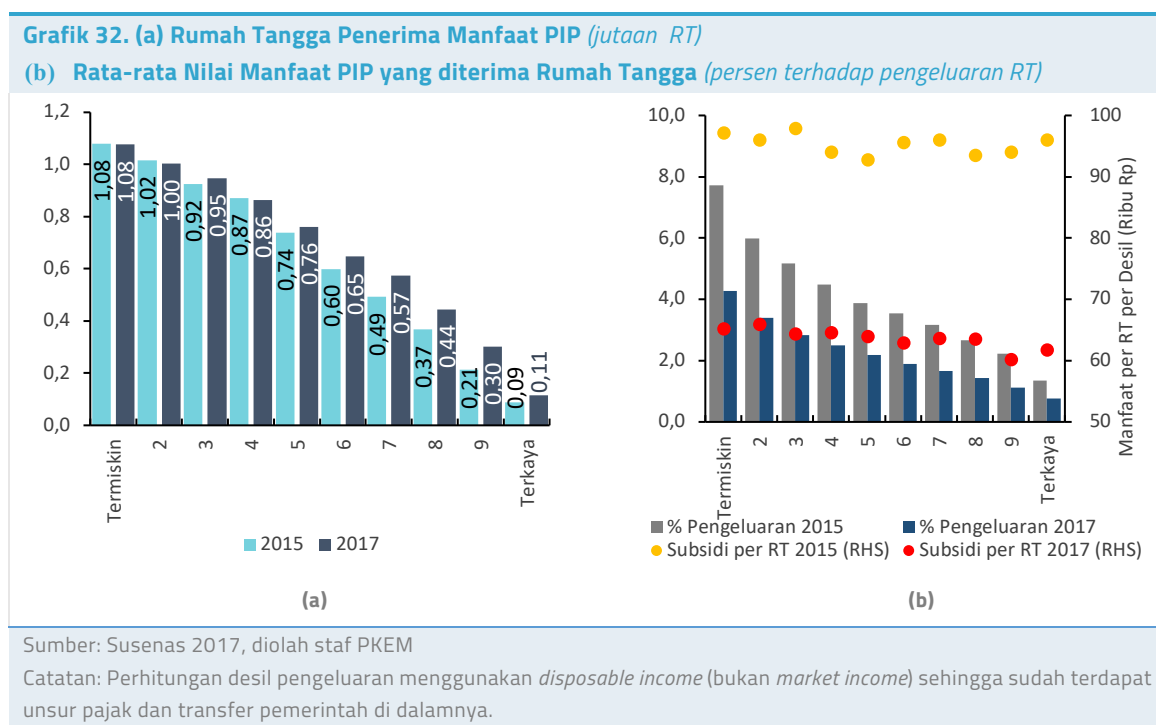
Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program untuk meningkatkan dampak program terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Perbaikan basis data secara berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan akurasi data *targeting* melalui penyempurnaan mekanisme pemutakhiran mandiri yang dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk tahun 2019 bantuan PKH kembali menggunakan skema *non-flat* sesuai dengan kondisionalitas keluarga penerima manfaat dan manfaat untuk masing-masing komponen pendidikan dan kesehatan dinaikkan menjadi dua kali lipat. Efektivitas juga dapat ditingkatkan dengan mensinergikan PKH dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian (Kelompok Usaha Bersama/KUBE, Kredit Usaha Rakyat/KUR, Pembiayaan Ultra-mikro/UMi) serta penguatan ketenagakerjaan (pelatihan kerja).

Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan diharapkan PKH dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan dalam jangka pendek. PKH juga memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan mendorong perubahan perilaku agar lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan. Aspek pemenuhan kewajiban PKH terkait pendidikan dan kesehatan menjadi krusial untuk pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan jangka panjang.

Program Indonesia Pintar (PIP)

Benefit Incidence

Selain PKH, PIP juga merupakan salah satu program bansos yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Manfaat yang diberikan melalui PIP bersifat progresif karena lebih dinikmati oleh penduduk lebih miskin. Dari total bantuan PIP yang diberikan, kelompok RT 40 persen termiskin menerima sekitar setengah dari total bantuan PIP yaitu 58,5 persen. Sementara itu, kelompok RT 20 persen terkaya masih menikmati 5,9 persen dari total bantuan PIP. Sama seperti pada PKH, hal ini juga mengindikasikan adanya *inclusion error* pada *targeting* penerima PIP.

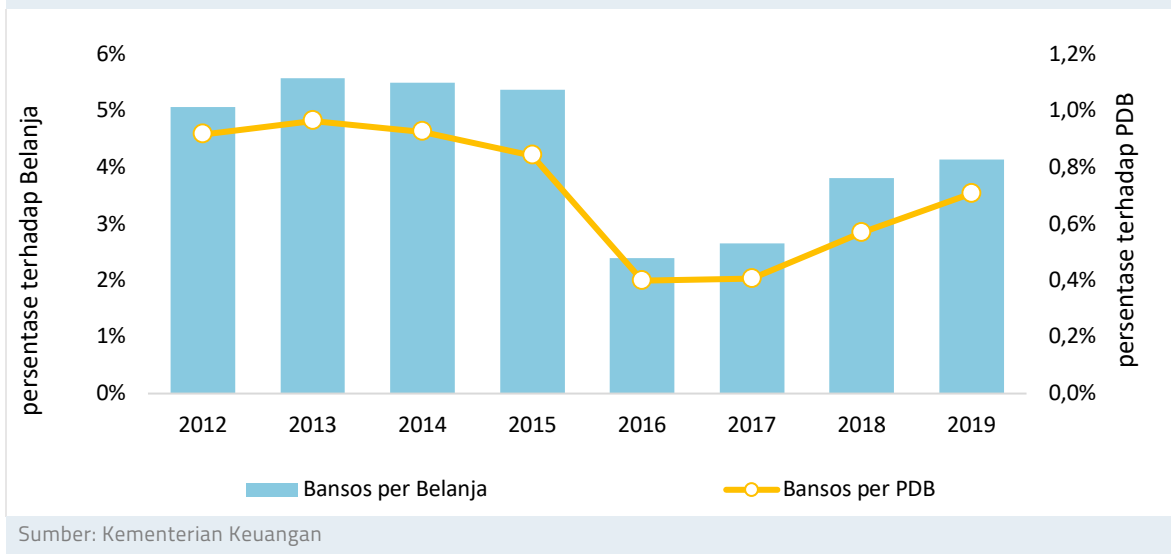


Porsi bantuan PIP terhadap pengeluaran RT lebih besar di kelompok RT yang status ekonominya lebih rendah. Untuk kelompok RT 10 persen termiskin, bantuan PIP berkontribusi sekitar 4,3 persen dari rata-rata pengeluaran sementara untuk kelompok RT 10 persen terkaya hanya sekitar 0,8 persen. Porsi bantuan PIP terhadap pengeluaran RT untuk tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan besaran bantuan PIP tetap dan belum pernah dilakukan penyesuaian sehingga nilai riilnya menurun.

Rasio bantuan PIP terhadap pengeluaran RT yang menurun dan masih adanya *inclusion* dan *exclusion error* berpengaruh terhadap menurunnya efektivitas PIP terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2017. Upaya perbaikan untuk mengatasi masalah ketepatan sasaran secara berkelanjutan dilakukan melalui sinkronisasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu juga penyaluran bantuan PIP secara non-tunai yang dilakukan secara bertahap juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan dan ketepatan jumlah.

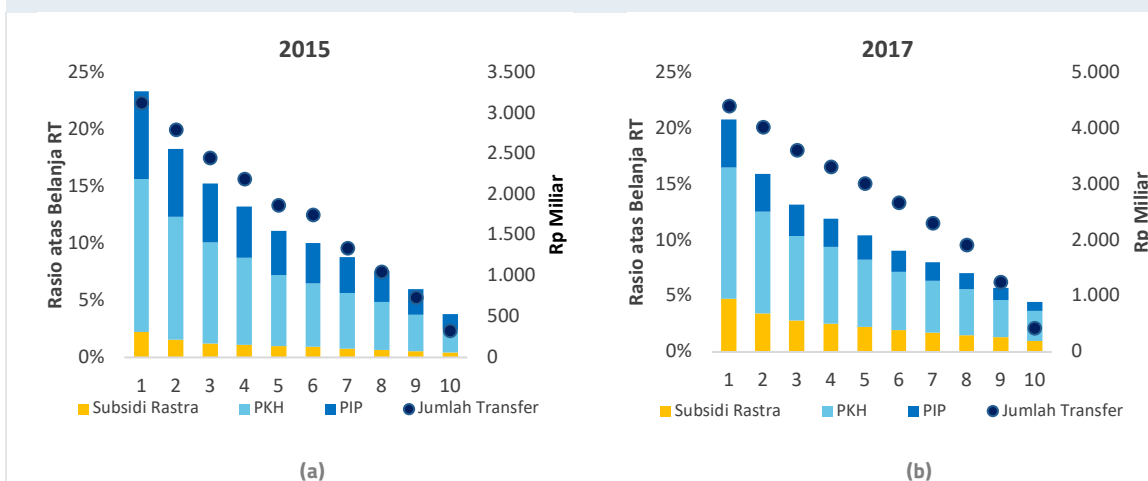
C. TOTAL MANFAAT BANSOS YANG DITERIMA RUMAH TANGGA

Grafik 33. Perbandingan Persentase Bansos terhadap PDB dan Belanja



Perbandingan antara jumlah Bansos pada tahun 2015 dan 2017 yang diterima oleh RT menunjukkan adanya perbaikan mekanisme dan lebih bersifat progresif atau pro rakyat miskin di tahun 2017 dibandingkan tahun 2015. Hanya saja rasio besaran transfer Pemerintah dalam bentuk Bansos ini terhadap total pengeluaran RT mengalami penurunan di tahun 2017 dibanding tahun 2015, terutama untuk penduduk 10 persen terbawah. Hal ini mengindikasikan nilai bantuan di 2017 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan kenaikan pendapatan rumah tangga. Sehingga, Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan program Bansos di tahun 2018 dan 2019 diantaranya melalui peningkatan nilai manfaat dalam penyaluran PKH dan menyasar penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Grafik 34. Perbandingan Subsidi dan Bansos Tahun 2015 dan 2017

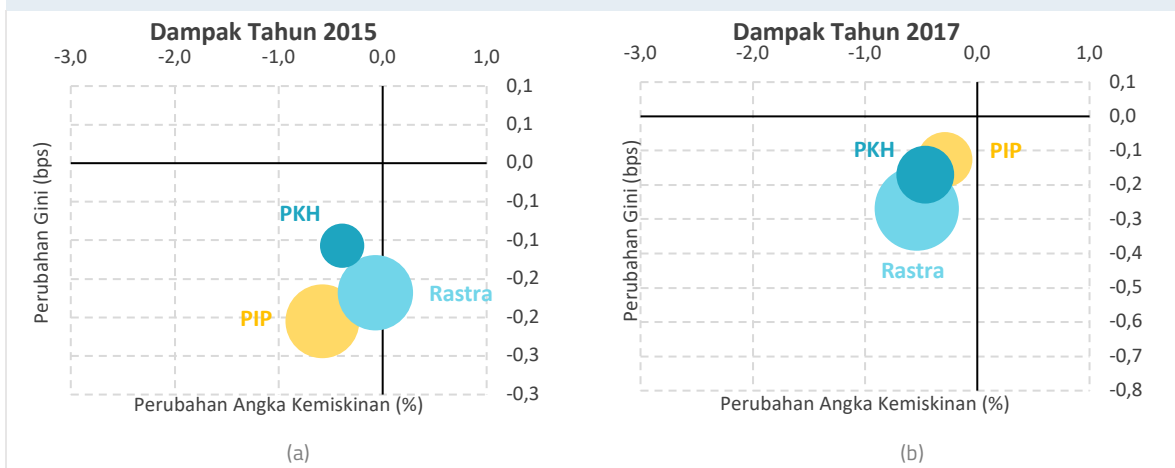


Sumber: Susenas 2015 dan 2017, diolah staf PKEM

Catatan: Perhitungan desil pengeluaran menggunakan *disposable income* (bukan *market income*) sehingga sudah terdapat unsur pajak dan transfer pemerintah di dalamnya.

Berdasarkan identifikasi nilai Rastra serta bansos (PKH dan PIP), diketahui bahwa kelompok 10 persen RT termiskin menerima Rastra dan bansos sebesar 21 persen dari total pengeluarannya dan secara bertahap porsi tersebut menurun. Pada tahun 2017, kelompok 10 persen RT terkaya ada yang menerima Rastra dan bansos tetapi rasionya terhadap pengeluaran RT mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 atau hanya sebesar 4,5 persen. Selain itu, pola penyaluran Rastra dan bansos di 2017 lebih progresif jika dibandingkan 2015, terlihat dari distribusi Rastra dan bansos baik secara *absolute term* maupun *relative term* (lihat Grafik 34).

Grafik 35. Dampak dan Efektivitas subsidi dan Bansos dalam menurunkan Kemiskinan dan Rasio Gini 2015 dan 2017



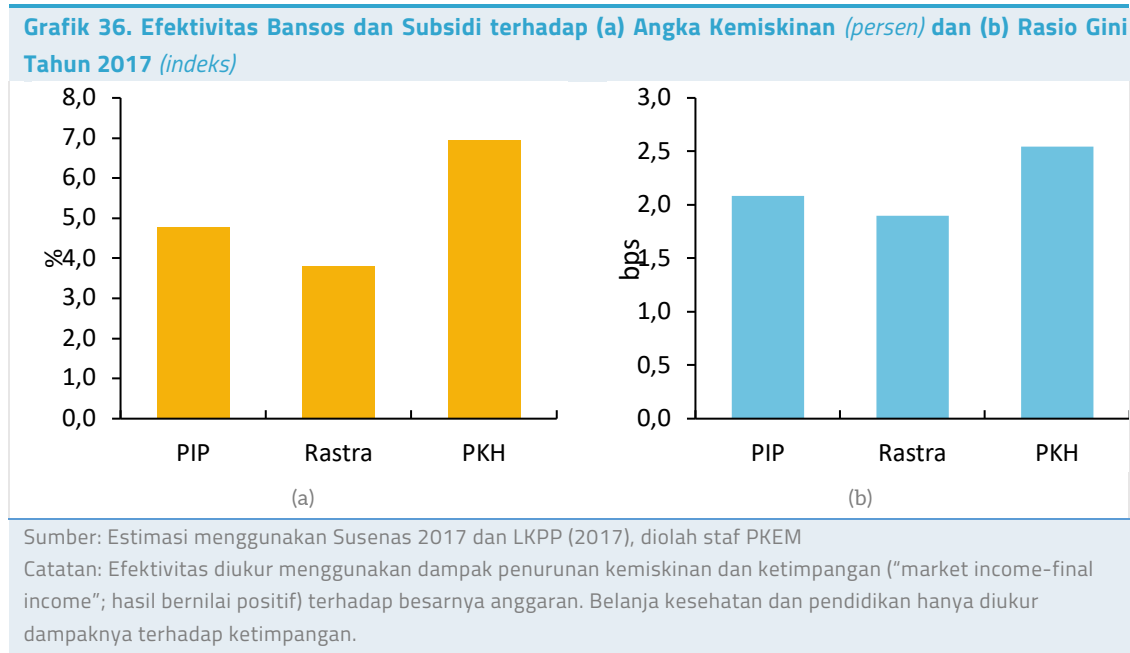
Sumber: Susenas 2015 dan 2017, diolah staf PKEM

Catatan: Perhitungan desil pengeluaran menggunakan *disposable income* (bukan *market income*) sehingga sudah terdapat unsur pajak dan transfer pemerintah di dalamnya.

Berdasarkan *best practice* negara-negara lain menunjukkan bahwa porsi nilai subsidi dan bansos terhadap pendapatan/pengeluaran RT miskin yang optimal yaitu sekitar 30 persen. Porsi subsidi dan bansos Indonesia pada 2017 berada di sekitar 29 persen terhadap pengeluaran RT miskin, yang artinya masih cukup ideal. Namun demikian, seiring dengan dinamika perekonomian dan transformasi kebijakan bansos, maka porsi penyaluran bansos terhadap pengeluaran RT perlu terus dioptimalkan untuk menjaga agar lebih tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Apabila bansos yang diberikan terlalu besar dikhawatirkan dapat membuat RT miskin dan rentan miskin menjadi ketergantungan dan kontraproduktif. Sebaliknya, jika terlalu rendah juga dapat berdampak terhadap upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Sama dengan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PKH masih merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan kata lain untuk setiap rupiah PKH (per Rp100 triliun) memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam menurunkan kemiskinan dan Rasio Gini. Efektivitas PKH dapat menurunkan kemiskinan sebesar 6,9 persen poin dan rasio gini sebesar 2,5 basis poin (Grafik 36). Oleh karena itu, dengan anggaran yang sama dengan program lainnya dampak PKH akan lebih besar dirasakan dibandingkan dengan jenis bansos lainnya. Grafik 36 menunjukkan bahwa Rastra merupakan

yang paling kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam hal penyaluran yaitu Bantuan Rastra akan bertransformasi penuh menjadi BPNT di tahun 2019. Harapan ke depannya Bansos akan tetap mampu menjaga konsumsi penduduk miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi ketimpangan namun tetap dapat menghindari unsur ketergantungan dan kontraproduktif terhadap pembangunan perekonomian.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Data Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Indikator	2018												2019	
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Produk Domestik Bruto (PDB)														
Pertumbuhan Ekonomi (%)			5,06			5,27			5,17				5,18	
Nominal harga konstan (triliun rupiah)			2.498,61			2.603,75			2.684,19				2.638,89	
Nominal harga berlaku (triliun rupiah)			3.511,65			3.685,27			3.841,76				3.798,68	
Inflasi (%)														
IHK	3,25	3,18	3,40	3,41	3,23	3,12	3,18	3,20	2,88	3,16	3,23	3,13	2,82	
Core	132,10	132,32	132,58	132,71	132,99	133,77	134,14	134,07	133,83	134,20	134,56	135,39	135,83	135,72
Administrative Price	2,69	2,58	2,67	2,69	2,75	2,72	2,87	2,90	2,82	2,94	3,03	3,07	3,06	3,06
Volatile Food	5,82	5,29	5,11	4,04	3,61	2,88	2,11	2,55	2,40	2,74	3,07	3,36	3,39	3,38
	2,62	3,10	4,06	5,08	4,33	4,60	5,36	4,97	3,75	4,48	4,32	3,39	1,76	0,33
Nilai Tukar (Rp/US\$)														
Rata-rata	13.380	13.590	13.758	13.803	14.160	14.049	14.415	14.560	14.869	15.179	14.692	14.500	14.176	14.023
End Of Period	13.413	13.707	13.756	13.877	13.951	14.404	14.413	14.711	14.929	15.227	14.232	14.481	13.973	14.069
Suku Bunga (%)														
Bi-7days Repo Rate	4,25	4,25	4,25	4,25	4,50	5,25	5,25	5,50	5,75	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00
Kredit Konsumsi (eop)	12,64	12,6	12,48	12,4	12,34	12,3	12,3	11,96	11,9	11,83	11,8	11,73		
Kredit Modal Kerja (eop)	10,72	10,69	10,59	10,53	10,51	10,49	10,55	10,48	10,59	10,47	10,48	10,34		
Kredit Investasi (eop)	10,51	10,43	10,38	10,3	10,29	10,35	10,36	10,37	10,54	10,38	10,51	10,38		
Harga Minyak (US\$/barel)														
Rata-rata (ICP)	65,6	61,6	61,9	67,4	72,5	70,4	70,6	69,4	68,3	69,2	68,6	54,8	56,6	61,3
WTI	64,7	61,6	64,9	68,6	67,0	74,2	68,8	69,8	73,3	65,3	50,9	49,0	51,6	55,0
Brent	68,8	64,5	69,1	74,9	77,1	78,6	73,1	77,2	83,0	73,9	58,4	57,7	60,2	64,0
SUN dan Saham														
Obligasi (Yield 5 YR)	5,78	6,05	5,94	6,51	6,83	7,57	7,67	7,98	8,05	8,35	7,82	7,91	7,85	7,51
Obligasi (Yield 10 YR)	6,27	6,63	6,68	6,92	6,99	7,80	7,77	8,20	8,12	8,54	7,87	8,03	8,01	7,82
Saham	6,606	6,597	6,189	5,995	5,984	5,799	5,936	6,018	5,977	5,832	6,056	6,194	6,533	6,443
NFB	35,392	-31,885	-4,361	-23,836	-17,976	-12,744	9,885	14,975	-5,919	10,055	45,265	-12,495	30,502	
Perbankan (%)														
CAR	23,2	23,1	22,5	22,25	22,19	22,01	22,56	22,83	22,91	22,97	23,32	23,3		
LDR	89,1	89,21	90,19	90,43	91,99	92,76	93,11	93,79	94,09	93,71	93,19	94,78		
NPL	2,9	2,9	2,75	2,79	2,79	2,7	2,7	2,7	2,66	2,67	2,7	2,59		
Pertumbuhan Kredit	7,45	8,25	8,49	8,9	10,23	10,65	11,19	11,91	12,43	13,09	12,05	11,7		

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, dan D/A

Data Penyerapan APBN Tahun 2017 - 2018

Uraian	2017			2018			2019		
	APBNP	Realisasi sd 31 Des	% thd APBNP	APBN	Realisasi sd 31 Des	% thd APBN	APBN	Realisasi sd 28 Feb	% thd APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,06	1.666,38	95,99	1.894,72	1.942,34	102,51	2.165,11	217,21	10,03
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.732,95	1.654,75	95,49	1.893,52	1.928,44	101,84	2.164,68	217,15	10,03
1. Penerimaan Perpajakan	1.472,71	1.343,53	91,23	1.618,10	1.521,38	94,02	1.786,38	177,24	9,92
a. Pajak Dalam Negeri	1.436,73	1.300,80	90,54	1.579,40	1.475,62	93,43	1.743,06	170,92	9,81
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,98	39,10	100,90	38,70	45,78	118,29	43,32	6,32	14,58
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	260,24	311,22	119,59	275,43	407,06	147,79	378,30	39,91	10,55
II. Hibah	3,11	11,63	374,17	1,20	13,90	1.161,37	0,44	0,06	14,40
B. Belanja Negara	2.133,30	2.007,35	94,10	2.220,66	2.202,24	99,17	2.461,11	271,83	11,04
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.366,96	1.265,36	92,57	1.454,49	1.444,45	99,31	1.634,34	145,68	8,91
1. Belanja K/L	798,59	765,13	95,81	847,44	836,22	98,68	855,45	71,23	8,33
2. Belanja Non K/L	568,37	500,23	88,01	607,06	608,23	100,19	778,89	74,46	9,56
II. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa	766,34	741,99	96,82	766,16	757,79	98,91	826,77	126,14	15,26
1. Transfer ke Daerah	706,34	682,23	96,59	706,16	697,93	98,83	756,77	121,15	16,01
2. Dana Desa	60,00	59,77	99,61	60,00	59,86	99,77	70,00	5,00	7,14
C. Keseimbangan Primer	(178,04)	124,41	69,88	(87,33)	(1,80)	0,02	(20,12)	(20,56)	102,22
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(397,24)	340,98		(325,94)	259,90		(296,00)	(54,61)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,92)	(2,51)		(2,19)	(1,76)		(1,84)	(0,34)	
E. Pembiayaan	397,24	366,62	92,29	325,94	300,36	92,15	296,00	197,56	66,74
I. Pembiayaan Utang	461,34	429,08	93,01	399,22	366,66	91,84	359,25	198,37	55,22
II. Pembiayaan Investasi	(59,73)	(59,75)	100,03	(65,65)	(61,11)	93,08	(75,90)	(2,00)	2,64
III. Pemberian Pinjaman	(3,67)	(2,05)	55,94	(6,69)	(4,25)	63,53	(2,35)	1,20	(50,93)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,01)	(1,01)	100,00	(1,12)	(1,12)	100,00	-	-	-
V. Pembiayaan Lainnya	0,30	0,36	119,70	0,18	0,18	100,00	15.000,00	1,70	0,01





KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat -
10710 Telp. +62 21 3441484

www.fiskal.kemenkeu.go.id

ISSN 2527-3140



9 772527 314007